



Akselerator Gerakan EKONOMI SYARIAH

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin

# Akselerator Gerakan EKONOMI SYARIAH



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110

ISBN 978-623-91896-3-1



9 786239 189631

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin

Akselerator Gerakan  
**EKONOMI  
SYARIAH**

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

2024



# Akselerator Gerakan **EKONOMI SYARIAH**

## **PENGARAH**

Ahmad Erani Yustika  
Masduki Baidlowi  
Masykuri Abdillah  
Guntur Iman Nefianto

## **PENULIS**

Sutan Emir Hidayat  
AM Hasan Ali

## **EDITOR**

Guntur Iman Nefianto  
Asrori S. Karni  
Yusro M. Santoso

## **TIM RISET DAN OLAH BAHAN**

Iwan Rudi Saktiawan, Jamilullah, Amiril Zulhaj, M. Quraisy, Caesar Pratama,  
Suci Ramdania, Nadya Rose, Ryanda Al Fathan, Rizki Anggun Pribadi,  
M. Raihan Aulia Firdausi, Syamsul Ma'arif,  
Adelina Zuleika, Yosita Nur Wirdayanti, Dece Kurniadi, Lidya Dewi Nurjannah,  
Fayca Rudhatin, Swartidyana, dan Pipie Puspitasari.

## **DUKUNGAN DATA, PELIPUTAN DAN FOTO**

Ahmad Lutfie  
Rusmin Nuryadin  
Aldi Yarman  
Jeri Wongiyanto  
Yohanes Liniandus

## **FOTO COVER**

Jeri Wongiyanto

## **DESAIN**

Amin S. Putra

**ISBN:** 978-623-91896-3-1  
15 x 23 cm | IX+147 halaman

## **PENERBIT**

Sekretariat Wakil Presiden





# KATA PENGANTAR

**E**KONOMI syariah dalam 5 tahun ini perkembangannya begitu gegap gempita. Spirit mendorong kegiatan ekonomi berbasis nilai-nilai agama (Islam) menyeruak sampai sudut-sudut wilayah nusantara. Di kampus, misalnya, bukan hanya didirikan jurusan ekonomi syariah (atau nama lain yang sejenis), tetapi juga ragam diskusi, seminar, dan penelitian dilaksanakan secara intensif. Pada lapak bisnis, serangkaian penciptaan dan pengembangan usaha terus didorong secara masif. Industri keuangan adalah sektor ekonomi syariah yang paling terdepan kemajuannya. Salah satu pengungkit besarnya ialah merger bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021. Saat ini BSI telah melejit menjadi salah satu dari 5 bank terbesar di Indonesia.

Sosok di balik pengembangan ekonomi syariah yang perlu diberi tinta tebal ialah Kiai Ma'ruf Amin, yang sejak akhir 2019 terpilih menjadi wakil presiden. Begitu dilantik menjadi wakil presiden, aneka konsep dan agenda kerja untuk pengembangan ekonomi syariah



dikerjakan secara spartan. Hal utama yang disentuh ialah perubahan lembaga yang mengawal agenda pengembangan ekonomi syariah. Semula lembaga itu bernama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang kemudian diperluas menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Ruang lingkup institusi ini menjadi lebih lebar, tidak hanya mengurus sektor keuangan.

Tidak berhenti di situ, Wapres juga menginisiasi pembentukan lembaga turunan dari KNEKS pada level provinsi, yang diberi nama KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah). Keberadaan KDEKS ini menjadi titik tumpu baru pengembangan ekonomi syariah, khususnya di daerah. Saat ini dari 38 provinsi di Indonesia telah terbentuk 31 KDEKS. Lokomotif ekonomi syariah menjadi lebih banyak, tidak hanya terkonsentrasi di pusat. Di luar itu, Wapres juga menggerakkan masyarakat untuk terlibat penuh dalam gerbong pengembangan ekonomi syariah, khususnya melalui organisasi MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan masih banyak lainnya. Wakil presiden menjadi pusaran arus utama di lembaga-lembaga tersebut.

Fokus lain yang dipertajam oleh Wapres adalah urusan halal, dari mulai proses percepatan sertifikasi, standarisasi, dan kerja sama dengan dunia internasional. Aspek ini dikawal langsung secara serius, baik dari sisi regulasi sampai implementasi. Kerap Wapres melawat ke negara lain demi memastikan perkara ini dijalankan secara sungguh-sungguh oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya, seluruh bangunan itu akan sulit berjalan bila tidak didukung oleh para pelaku dan keberadaan industri halal. Inilah yang membuat Wapres getol mengampanyekan perlunya Kawasan Industri Halal (KIH). Bahkan, saat ini telah terbentuk satu KIH yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal. Diharapkan KEK-KIH ini menjadi tulang punggung pengembangan produk dan para pelaku industri halal di masa depan.

Wapres dalam banyak kesempatan menyampaikan dua tantangan serius yang akan dihadapi. *Pertama*, menghidupkan bukan hanya keuangan syariah, tetapi juga ekonomi syariah secara keseluruhan. Wakil Presiden selalu menyatakan 4 isu utama pengembangan ekonomi syariah, yakni (1) pengembangan industri produk halal; (2) pengembangan keuangan syariah; (3) optimalisasi dana sosial syariah; dan (4) penumbuhan kapasitas usaha/bisnis syariah, termasuk UMKM.

Sekarang telah diiniasi kawasan industri halal di beberapa provinsi dan diharapkan menjadi tempat berbiaknya industri produk halal. Saat ini juga sedang dirintis modernisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial syariah, seperti wakaf dan zakat, agar menjadi lebih produktif dan bermakna bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi, pekerjaan rumah yang harus dipanggul masih amat banyak.

*Kedua*, memastikan agar pengembangan ekonomi syariah bersifat inklusif dan memiliki bobot pemberdayaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Problem ekonomi nasional adalah wataknya yang cenderung eksklusif, yakni hanya memberikan akses yang besar kepada pelaku ekonomi tertentu. Ekonomi syariah wajib bisa diakses dengan mudah oleh semua lapis pelaku ekonomi, bahkan yang bukan beragama Islam. Ekonomi syariah tidak didesain melayani kelompok warga tertentu, misalnya didasarkan suku, agama, ras, atau level pendapatan tertentu. Ekonomi syariah juga mesti menyantuni aspek pemberdayaan kepada pelaku ekonomi kecil sehingga keadilan ekonomi tegak berdiri. Kritik dari lembaga keuangan konvensional ialah sifatnya yang dianggap “eksploitatif” sehingga kurang memiliki dampak terhadap keadilan.

Singkat kisah, buku ini menjadi risalah perjalanan Wapres selama 5 tahun ini dalam mengawal agenda pengembangan ekonomi syariah. Ragam inisiasi kebijakan, program, dan kegiatan yang didorong oleh Wapres tertuang dengan jelas sehingga menjadi bahan baku informasi yang kaya bagi para partisipan gerakan ekonomi syariah. Dokumen ini juga diharapkan menjadi sumber gagasan untuk meninggikan capaian pembangunan ekonomi syariah di hari-hari mendatang. Wapres di ujung pengabdiannya masih berikhtiar dengan keras agar terbentuk Badan Ekonomi dan Keuangan Syariah (setingkat kementerian) agar pengembangannya menjadi lebih cepat efektif di hari-hari mendatang. Insha Allah seluruh pikiran dan tindakan Kiai Ma’ruf Amin tercatat sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir, sekaligus melipatgandakan kemajuan ekonomi syariah nasional. Selamat membaca. ❁

Jakarta, 1 Oktober 2024  
Kepala Sekretariat Wakil Presiden

**Ahmad Erani Yustika**



WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



## Sambutan Wakil Presiden

*Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.  
Bismillahirrahmanirrahiim.*

**EKONOMI** syariah merupakan wujud dan bukti nyata Islam sebagai *rahmatan lil alamin* melalui penyebaran kebaikan secara inklusif kepada seluruh alam, termasuk manusia dan lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, pemerataan dan keberlangsungan lingkungan sejalan dengan cita-cita pembangunan masyarakat global. Kita menyaksikan, dalam beberapa dekade ini ekonomi syariah berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Praktik-praktik ekonomi syariah saat ini tidak hanya ditemukan di negara-negara dengan mayoritas muslim namun juga dapat dijumpai dan diterima di negara-negara non muslim. Potensi pasar masyarakat muslim global yang besar dan terus tumbuh menjadi peluang ekonomi yang dilirik sejumlah negara. Tidak heran, negara-negara tersebut

terus berlomba memanfaatkan potensi ini, baik dalam memproduksi produk halal ataupun penyediaan jasa dan layanan syariah. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia, Indonesia harus mampu memanfaatkan kemajuan ekonomi syariah sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sehingga menjadi arus baru ekonomi Indonesia.

Visi Indonesia menjadi Produsen Halal Terkemuka di dunia bukanlah sekedar impian, namun harus direalisasikan. Ekonomi syariah harus mampu menjadi stimulan transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia emas 2045. Kita menyadari untuk mencapai visi besar ini tentunya bukan hal yang mudah. Oleh karenanya Pemerintah mengambil Langkah-langkah yang terarah dan berkelanjutan. Tema ekonomi syariah telah masuk ke dalam program prioritas Pemerintah pada RPJPN 2025-2045 dan rancangan teknokratis RPJMN 2025-2029. Penataan kelembagaan di Pusat dan Daerah terus dilakukan. Fokus dan prioritas program dan kegiatan semakin dipertajam. Itu semua membutuhkan kesungguhan dan kerjasama seluruh komponen bangsa untuk memajukan ekonomi syariah.

Buku bertajuk “Akselerator Gerakan Ekonomi Syariah” ini memotret capaian dan lika-liku pengembangan ekonomi syariah Indonesia. *Behind the scene* dari perjuangan menyalakan *ghiroh* ekonomi syariah diungkap. Kehadiran buku ini akan menawarkan pencerahan khususnya bagi generasi muda penerus bangsa, menepis anggapan yang kurang tepat tentang ekonomi syariah dan membangkitkan optimisme untuk kemajuan bangsa.

Semoga kehadiran buku ini makin memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah di Indonesia, sumber inspirasi serta menjadi media penyebarluasan nilai-nilai ekonomi syariah sebagai *rahmatan lil alamin*. 🌟

*Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariiq.*

*Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**Jakarta, 1 Oktober 2024**

Wakil Presiden Republik Indonesia,  
**Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin**

# Daftar Isi

- iii KATA PENGANTAR  
vi SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN  
viii DAFTAR ISI

## 2

### PROLOG

- 3 Mengapa Ekonomi Syariah  
4 *Mujahid* Ekonomi Syariah  
yang *Istikamah*  
4 *Ghiroh* Ekonomi Syariah  
7 Pemahaman Ekonomi  
Syariah

## 12

### Pejuang Ekonomi Syariah

- 15 *Thariqah* Ekonomi Syariah  
21 Kiprah di MUI hingga  
menjabat Wakil Presiden

## 24

### Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

- 26 Sebelum Menjadi Wakil  
Presiden  
36 Sebagai Wakil Presiden

## 68

### Penguatan Ekosistem untuk Akselerasi Pertumbuhan

## 74

### Memperkokoh Industri Halal

84

**Jasa Keuangan Syariah sebagai Jangkar Ekosistem Syariah**

- 86 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur melalui Inovasi Sukuk
- 89 Merajut Asa: Kiai Wapres dan Visi Besar Industri Asuransi Syariah Indonesia
- 90 Memacu Pembiayaan Syariah Terintegrasi Bagi UMKM Untuk Menumbuhkan Sektor Riil Indonesia
- 92 BMT 4.0: *Digital Transformation and Sustainability*

98

**Dana Sosial dan Pemberdayaan Umat**

- 99 Wakaf Tunai
- 101 Transformasi Pengelolaan Zakat Nasional
- 103 Transformasi Pengelolaan Wakaf Uang Nasional

114

**Wirausaha Menggerakkan Bisnis Syariah**

112

**Orkestrasi Percepatan Ekonomi Syariah di Daerah**

124

**Literasi Mengungkit Akselerasi**

- 126 Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
- 130 Pelatihan BMT Pesantren Untuk Inklusi Keuangan Syariah

132

**EPILOG**

- 132 Ekonomi Syariah di Kancanah Tren Ekonomi Global
- 134 Visi Ekonomi Syariah Indonesia
- 137 Modal Dasar Ekonomi Syariah Indonesia
- 139 Tantangan Ekonomi Syariah Indonesia

144

**TESTIMONI**

# PROLOG

Karena saya kalau soal ekonomi syariah terus hati saya bergetar, karena saya bersama semua teman ikut mulai gerakan ekonomi syariah di Indonesia yang kita dulu membuat semboyannya 'memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

(K.H. Ma'ruf Amin)

**S**AAAT ini, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mendapatkan momentum yang tepat. Dengan hadirnya sosok Kiai Ma'ruf Amin, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin pesat dan terarah.

Berbekal pengalaman yang sangat memadai, baik saat meniti karirnya di MUI maupun saat menjadi *Rais* *Aam* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Ma'ruf Amin layaknya seorang *mujahid* atau pejuang yang gigih dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Sebelum menjabat Wakil Presiden, strategi Kiai Ma'ruf Amin lebih banyak dalam bentuk memberikan rekomendasi kepada penyelenggara negara, baik dalam bentuk fatwa dari DSN MUI ataupun Komisi Fatwa MUI. Saat berkiprah di MUI, Kiai Ma'ruf Amin memosisikan negara dalam relasi sebagai *shadiqul hukumah*, mitra

strategis dalam mewujudkan agenda kesejahteraan dan kemaslahatan, bagi umat Islam di Indonesia khususnya, dan bagi penduduk Indonesia umumnya.

Sementara, saat menjabat sebagai Wakil Presiden dan Ketua Harian KNEKS, Kiai Ma'ruf Amin secara konsisten mengawal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menjadi semakin terarah dan terukur. Melalui instrumen kelembagaan KNEKS dan KDEKS, Kiai Ma'ruf Amin mendorong kelima aspek yang menjadi fokus pengembangan ekonomi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *Pertama*, pengembangan industri halal. *Kedua*, pengembangan keuangan syariah. *Ketiga*, pengembangan keuangan sosial syariah. *Keempat*, pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah; dan *Kelima*, pengembangan infrastruktur syariah.

## Mengapa Ekonomi Syariah

Syariat Islam sejatinya adalah wujud dari keadilan dan rahmat Allah di muka bumi, sebagaimana kerap disampaikan Kiai Ma'ruf Amin. Oleh karenanya, praktik ekonomi dan keuangan syariah dimaknai sebagai upaya menebarkan nilai-nilai kebaikan, antara lain sifatnya yang inklusif, universal, maslahat, serta mengusung keadilan dan keberlanjutan. *Rahmatan 'il alamin* menjadi ruh ekonomi dan keuangan syariah yang dikembangkan di Indonesia.

Dalam pandangan Kiai Ma'ruf Amin, mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sejatinya

• • • • •

**“Muamalah itu artinya, ekonominya sesuai dengan syariat Islam, yang tidak ada ribanya, tidak ada *dharar*-nya (bahayanya), dan tidak ada sesuatu yang dilarang dalam agama.” (Tausiyah Ramadan 1445 H di Masjid Agung Kota Manado, Sulawesi Utara, 7 Mei 2021).**

adalah upaya mengajak umat Islam untuk bermuamalah sesuai syariah. Karena syariah tidak hanya menyangkut akidah, ibadah serta akhlak, tetapi juga muamalah. Di tengah perekonomian Indonesia yang menganut sistem konvensional dan syariah (*dual economic system*), maka sudah semestinya umat Islam menjalankan kegiatan ekonomi sehari-hari dengan berlandaskan syariah.

Kiai Ma'ruf Amin menjelaskan, jika muamalah yang dijalankan tidak mengikuti syariah, maka sama dengan tidak ada (*nothing*). Meski secara fisik ada, tapi jika menurut syariah tidak ada, maka tidak dianggap ada, karena tidak bernilai (*ghairu mutaqaawim*). Untuk itulah ekonomi dan keuangan syariah dikembangkan, yakni agar umat Islam mengumpulkan harta yang *mal mutaqaawim* (boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal atau bernilai), dan oleh karenanya termasuk harta yang bernilai di sisi Allah SWT.

## Mujahid Ekonomi Syariah yang Istikamah

Semangat juang Kiai Ma'ruf Amin tidak pernah luntur, justru kian menguat setelah menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sekaligus menjadi Ketua Harian KNEKS. Terlahir dan bertumbuh dalam silsilah keluarga ulama, sekaligus cicit dari ulama besar Syekh Nawawi al-Bantani, Kiai Ma'ruf Amin beristikamah dalam lakunya sebagai *mujahid* ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Hingga menjelang akhir masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin terus mendorong aspek keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Menurutnya, keberlanjutan menjadi salah satu kunci yang akan menyempurnakan capaian keberhasilan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam era 5 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Oleh sebab itu, Kiai Ma'ruf Amin memberi arahan dan terus mendorong agar tema ekonomi dan keuangan syariah diakomodasikan dalam dokumen perencanaan program dan anggaran di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, beliau meyakini bahwa penguatan kelembagaan KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah mesti ditempuh agar upaya pemajuan ekonomi syariah di masa depan dapat diorkestrasikan lebih optimal.

## Ghiroh Ekonomi Syariah

Hadirnya Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Harian KNEKS semakin menggairahkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di

.....

**“Bagi umat Islam, syariah itu harus, wajib, karena muamalah yang harus kita lakukan adalah muamalah yang *masyru’ah*.”**  
**(Sarasehan Ekonomi Syariah Jawa Timur, 30 Agustus 2023).**

Indonesia. Kiai Ma’ruf Amin mampu menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hampir semua aspek ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mengalami pengembangan positif dan mendapatkan momentum yang tepat atas kehadiran Kiai Ma’ruf Amin di tengahnya. Hadirnya Kiai Ma’ruf Amin menjadikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin bergairah.

Industri halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah serta ekosistem ekonomi syariah adalah fokus program di KNEKS yang menunjukkan langkah strategis yang dilakukan oleh Kiai Ma’ruf Amin. Menggenapi kelima fokus tersebut, gagasan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di hampir semua provinsi menjadi pemicu gairahnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Berkeaan dengan pengembangan industri halal, Kiai Ma’ruf Amin mempunyai visi menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Dari visi yang diharapkan oleh Kiai Ma’ruf ini, menjadikan bergairahnya pengembangan industri halal di Indonesia. Mulai dari penguatan regulasi halal dan kelembagaan, pembentukan kawasan industri halal, penyiapan SDM, hingga diplomasi halal ke mancanegara untuk membuka pasar dan menarik investasi di sektor halal.

Di sisi yang lain, gairah pengembangan industri keuangan syariah yang dimotori oleh perbankan syariah juga memperlihatkan tren positif dalam mencatatkan kinerjanya. Selain perbankan syariah, gairah pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia juga ditopang oleh kinerja yang dilakukan oleh industri



keuangan syariah non bank, seperti perusahaan asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Satu prestasi tersendiri dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia, saat hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah *plat* merah, yakni Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Bahkan Kiai Ma'ruf Amin sudah meresmikan BSI Cabang Dubai, Uni Emirat Arab sebagai tonggak awal pengembangan bisnis keuangan syariah nasional di kancah global.

Ranah ekonomi syariah berikutnya yang tumbuh baik adalah keuangan sosial syariah. Lembaga pengelola dana keuangan sosial syariah terus bertambah. Mulai dari yang dikelola oleh Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kemudian ada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI), ataupun yang dikelola oleh swasta melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Saat ini, di satu sisi semakin banyaknya lembaga pengelola dana keuangan sosial syariah yang tumbuh, di sisi yang lain juga semakin mudahnya orang yang ingin berzakat, berinfaq, bersedekah atau berwakaf. Dengan kecanggihan sistem teknologi, orang yang mau berzakat atau bersedekah tidak harus datang ke lembaganya. Saat ini, orang yang ingin berzakat atau bersedekah bisa dari kamar tidurnya. Dengan cukup menggunakan *mobile banking* ataupun melalui aplikasi QRIS yang disediakan oleh beberapa bank syariah, seseorang sudah bisa berzakat ataupun bersedekah dari mana saja.

Di sisi yang lain, gairah pengembangan ekonomi syariah terlihat dari pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah di Indonesia. Pemangku kepentingan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menyadari betul perlu adanya pengembangan model bisnis dan kewirausahaan syariah. Kondisi ini didasari dari adanya problem tidak seimbangnya antara jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Faktanya saat ini, jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Maka dari itu, salah satu solusi yang dapat diambil oleh Pemerintah adalah dengan memperbanyak model bisnis dan kewirausahaan syariah. Adanya program pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah yang diinisiasi oleh KNEKS merupakan bagian dari wujud untuk menggairahkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.



Dalam perspektif yang lain, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berjalan positif sesuai dengan kondisi tren pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global. Walaupun di awal tahun 2020, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ataupun di dunia global dihadapkan pada ancaman pandemi *Covid-19* yang nyaris membuat roda perekonomian tidak bergerak. Namun pasca pandemi *Covid-19*, tren pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berjalan positif. Secara global, sebagaimana yang dilansir dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023 oleh OJK, ekonomi syariah tumbuh konsisten dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Global Islamic Economy Indicator Score (GIEI)* tahun 2023/2024, Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan raihan nilai 80,1, naik satu peringkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. *GIEI* terdiri dari beberapa kriteria, yaitu *Islamic finance, halal food, moslem friendly travel, modest fashion, media & recreation*, dan *halal pharma & cosmetics*. Apabila dilihat dari masing-masing kriteria yang ditetapkan oleh *GIEI* tersebut, Indonesia menempati posisi 10 teratas untuk setiap kriterianya kecuali pada *moslem-friendly travel*. *GIEI* tahun 2023/2024 juga mencatatkan Indonesia dalam Top 10 kategori *Media & Recreation*, yaitu pada posisi 6.

## Pemahaman Ekonomi Syariah

Pemahaman ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tidak luput dari nada sumbang. Perlu upaya pelurusan dalam bentuk klarifikasi, sehingga pemahamannya bisa kembali pada jalan yang benar, *shirathal mustaqim*. Adanya pemahaman yang kurang benar mengenai ekonomi dan keuangan syariah tersebut, bukan tanpa alasan. Alasannya bisa jadi karena beberapa faktor. Di antaranya, (1) karena kurangnya memahami hakekat dari ilmu ekonomi syariah itu sendiri; (2) bisa jadi disebabkan oleh tuntutan untuk selalu mengakomodasikan perkembangan yang terjadi dalam ekonomi dan keuangan konvensional; *ketiga*, lebih mengutamakan perilaku *tasahhul*, mempermudah, tanpa menghiraukan kaedah ketundukan pada prinsip syariah.

Beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan pemahaman ekonomi dan keuangan syariah, di antaranya: *pertama*, ekonomi syariah dikesankan sebagai sesuatu yang eksklusif; *kedua*, ekonomi

syariah dengan turunan pengembangannya dalam bentuk praktik bank syariah dianggap tidak ada bedanya dengan praktik yang dijalankan oleh bank konvensional; *ketiga*, asumsi sekelompok orang yang menganggap ekonomi syariah hanyalah bank syariah; *keempat*, praktik ekonomi syariah yang dilakukan oleh industri perbankan syariah dianggap *cost*-nya lebih mahal. *Kelima*, ekonomi syariah tidak mempunyai kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

*Pertama*, ekonomi syariah yang dikesankan sebagai sesuatu yang eksklusif. Ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa ekonomi syariah hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, yakni umat Islam saja. Artinya, selain umat Islam tidak bisa mengambil manfaat dari adanya konsep dan implementasi ekonomi syariah. Anggapan seperti ini keliru besar. Kenapa? Karena realitanya ekonomi Islam mempunyai nilai yang inklusif. Konsep dan implementasi ekonomi syariah dapat diterima oleh masyarakat umum, tidak hanya umat Islam. Di beberapa tempat, misalnya di wilayah yang penduduknya minoritas umat Islam, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), praktik ekonomi syariah yang dijalankan oleh bank syariah ataupun perusahaan pembiayaan syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat NTT yang mayoritas non muslim.

Di sisi yang lain, sesungguhnya kalau memahami hakekat ekonomi syariah yang prinsip utamanya adalah pelarangan praktik riba (baca: bunga), sebagaimana di-*nash* dalam QS al-Baqarah [2]: 275, ada juga kesamaan nilai yang terkandung dalam Kitab Perjanjian Baru (Injil) ataupun Kitab Perjanjian Lama (Taurat). Kedua Kitab ini, Taurat dan Injil, kalau kita telusuri di dalamnya mengajarkan hal yang sama, yakni sama-sama mengajarkan larangan riba (bunga).

Misal dalam Ulangan 23:19 disebutkan, “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan”. Begitu pula kita dapat menemukan penjelasan larangan bunga di Imamat 25:35-36, “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba”.

Selain dalam Ulangan dan Imamat, larangan bunga juga dapat ditemukan dalam Keluaran 22: 25-27, “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu,



maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya--pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepada-Ku, Aku akan mendengarkannya, sebab Aku ini pengasih”.

Dari sini dapatlah dipahami, bahwa praktik ekonomi syariah mempunyai nilai yang inklusif karena dapat diterima oleh kelompok orang di luar Islam berdasarkan kesamaan nilai ajaran yang terkandung dalam kitab sucinya masing-masing. Orang di luar Islam dapat mengambil manfaat dari konsep dan praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

*Kedua*, ekonomi syariah dengan turunan pengembangannya dalam bentuk praktik bank syariah dianggap tidak ada bedanya dengan praktik yang dijalankan oleh bank konvensional. Asumsi ini sering kita dengar dari beberapa orang yang sesungguhnya mereka belum memahami hakekat dari praktik yang dijalankan oleh bank syariah. Memang dari sisi fungsi yang diemban oleh bank syariah ataupun bank konvensional memiliki kesamaan, yakni sama-sama menjalankan fungsi *funding* (penghimpunan dana) dan fungsi *financing* (penyaluran dana). Namun dari sisi substansi konsepnya sangat berbeda. Perbedaan utamanya ada pada pelarangan riba (bunga).

Secara konseptual, bank syariah yang konsep utamanya diturunkan dari pemahaman ekonomi syariah, mengacu pada prinsip adanya larangan riba (bunga) dalam setiap produk dan transaksi yang dilaksanakannya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank konvensional. Pada bank konvensional memberikan ruang toleransi adanya praktik bunga, yang kemudian dikenal dengan istilah bunga bank. Bahkan bunga di lembaga keuangan konvensional merupakan *ruh* yang dijalankan oleh bank konvensional itu sendiri. Tanpa menggunakan instrumen bunga, bank konvensional tidak akan dapat berjalan. Dengan adanya bunga, bank konvensional dapat membukukan keuntungan dari operasional yang dijalanakannya.

Berbeda dengan bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Prinsip utamanya adalah pelarangan bunga (riba). Larangan riba merupakan *core business* yang dijalankan oleh bank syariah. Karena praktik riba dilarang, maka sebagai solusinya menggunakan



instrumen lainnya yang dibolehkan. Misal, menggunakan instrumen bagi hasil, jual-beli, sewa menyewa ataupun instrumen lainnya yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Instrumen tersebut merupakan warisan yang dapat ditemukan dalam kajian kitab *fiqh* muamalah.

Dalam kitab *fiqh* muamalah dapat ditemukan berbagai macam instrumen yang dapat dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah. Misal instrumen jual-beli (*al-ba'i*) dengan berbagai variannya. Atau menggunakan instrumen bagi hasil yang dalam praktiknya dapat berupa skema *mudharabah* atau *musyarakah*. Selain itu, ada instrumen sewa menyewa (*ijarah*), *rahn*, *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, dan *qard*.

*Ketiga*, asumsi sekelompok orang yang menganggap ekonomi syariah hanyalah bank syariah. Asumsi ini juga perlu diluruskan atau perlu diklarifikasi agar lebih jelas dan bisa didudukkan pada tempat pemahaman yang benar. Sesungguhnya pemahaman yang benar adalah ekonomi syariah atau ekonomi Islam bukan hanya bank syariah. Bank syariah hanya bagian dari praktik ekonomi syariah. Mengapa ekonomi syariah diidentikkan dengan bank syariah? Karena awal mula orang mengenal ekonomi syariah secara kelembagaan melalui bank syariah.

Namun, sejatinya cakupan dari praktik ekonomi syariah cukuplah luas. Tampaknya, tidak salah jika KNEKS ingin mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal ini, ibaratnya sebuah kereta, rangkaian gerbong kereta tersebut merupakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Di dalamnya, ada berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, perusahaan pembiayaan syariah. Selain itu ada industri halal dan bisnis syariah lainnya, seperti industri pariwisata syariah. Kemudian ditopang dengan pilar dana sosial Islam yang terdiri dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Di sisi yang lain, pemahaman ekonomi syariah dapat juga melalui praktik yang dijalankan dalam skala mikro dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga keluarga muslim. Tanggung jawab seorang suami muslim dengan bekerja setiap hari untuk menafkahi keluarganya adalah bagian dari cerminan praktik ekonomi syariah.

*Keempat*, praktik ekonomi syariah yang dilakukan oleh industri perbankan syariah dianggap mempunyai *cost* yang lebih mahal. Kondisi ini muncul dari perspektif nasabah. Ada anggapan kalau berhubungan dengan bank syariah, melalui produk penyaluran



dananya, beban biaya (*cost*) yang ditanggung nasabah lebih besar dibanding dengan bank konvensional. Aslinya, masalahnya ada pada tata kelola yang lebih baik dan efisien.

Sekiranya bank syariah dalam menjalankan kinerjanya dilakukan dengan cara yang baik, mengacu pada prinsip *good corporate governance* (GCG) sekaligus dilakukan secara efisien, maka anggapan di atas bisa ditepis. Masalahnya, tatkala bank syariah ada yang dikelola masih dalam kondisi belum efisien kemudian dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah efisien, maka asumsi di atas dimungkinkan terjadi. Efisiensi dipengaruhi berbagai faktor. Skala produksi adalah salah satu faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola atau pelaku di industri perbankan syariah untuk bisa menjalankan kinerjanya secara efisien, sehingga *image* “mahal” bisa dikikis.

*Kelima*, ekonomi syariah tidak berkontribusi positif bagi pembangunan nasional. Data menunjukkan bahwa kontribusi aktivitas usaha syariah terhadap PDB nasional pada Desember 2023 adalah 46,72%. Realita ini mematahkan pandangan bahwa ekonomi syariah tidak berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

Melalui KNEKS, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin selaku ketua harian, memberikan arahan agar perencanaan dan program kerja ekonomi syariah yang ada pada kementerian dan lembaga disusun dengan lebih terarah, terukur dan fokus. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diarahkan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

Isu miring seputar ekonomi syariah perlu diluruskan dan diklarifikasi agar pemahaman ekonomi syariah masih tetap dalam koridor jalan yang benar, *shirathal mustaqim*. Dengan itu cita-cita ekonomi syariah sebagai bagian penopang yang kokoh dari pembangunan nasional semakin menguat dan terbukti kenyataannya. 🌟

# Pejuang Ekonomi Syariah

Tetapi Allah juga meminta kita supaya upaya-upaya yang kita lakukan itu berjalan di atas landasan tuntunan-Nya, atau *manhajul imarah*, harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, harus *masyru'ah*. Itulah sebabnya maka kita harus mengembangkan kegiatan ekonomi itu di atas prinsip-prinsip syariah.

(K.H. Ma'ruf Amin)

**SOSOK** Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, punya atensi dan keahlian di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Di dalam diri Kiai Ma'ruf Amin mengalir darah seorang pejuang. Iya betul, darah seorang pejuang yang ingin memasyarakatkan ekonomi syariah dan sekaligus ingin menyejahterakan ekonomi masyarakat. Aliran darah seorang pejuang tersebut merupakan warisan dari leluhurnya yang juga seorang ulama dan pejuang, seperti yang ada pada sosok Syekh Nawawi al-Bantani.

Syekh Nawawi tercatat dengan nama lengkap al-Imam al-Allamah as-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani at-Tanari as-Syafi'i. Lahir di Desa Tanara, sebuah desa kecil di wilayah Kecamatan Tirtayasa (dulu, sekarang masuk wilayah Kecamatan Tanara), Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Syekh Nawawi merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Kesultanan Banten, putra dari Sunan Gunung Jati, Cirebon.



Nasab Syekh Nawawi terhubung sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui Kesultanan Banten.

Karya tulisan kitab dari Syekh Nawawi al-Bantani menjadi rujukan bagi pengembangan keilmuan dan keislaman, tidak hanya di kalangan dunia pendidikan di Indonesia, seperti di lingkungan Pondok Pesantren atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia. Namun, lebih dari itu karya kitab Syekh Nawawi al-Bantani menjadi rujukan pengembangan keilmuan dan keislaman dunia Islam. Beberapa penulis orientalis seperti Snouck Hurgronje, Karel A. Steenbrink dan Martin van Bruinessen memberikan catatan tersendiri mengenai kiprah Syekh Nawawi. Karel A. Steenbrink sebagaimana mengutip pendapat yang disampaikan oleh Snouck Hurgronje menilai sosok Syekh Nawawi sebagai

**Kuliah umum dan peluncuran buku K.H. Ma'ruf Amin: Bapak Ekonomi Syariah Indonesia di Banda Aceh.**

pribadi yang *tawadhu'*, rendah hati dan sederhana dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan Martin van Bruinessen menyebutkan bahwa beberapa karya kitab Syekh Nawawi al-Bantani merupakan syarah kitab yang telah dipergunakan di lingkungan pondok pesantren.

Ada pepatah yang sering diungkapkan oleh masyarakat Indonesia, yakni pepatah 'buah jatuh tidak jauh dari pohonnya'. Dalam bahasa Jawa, makna yang mirip dengan pepatah tersebut biasa diungkapkan dengan istilah '*kacang ora ninggal lanjaran*'. Kedua pepatah ini sepertinya dapat mewakili gambaran Kiai Ma'ruf Amin yang dalam dirinya mengalir darah semangat juang dari Syekh Nawawi al-Bantani, kakek buyutnya. Ada kesamaan visi perjuangan antara Syekh Nawawi al-Bantani dan Kiai Ma'ruf Amin. Keduanya sama-sama menjadikan kemaslahatan umat sebagai tujuan dalam menapaki kehidupannya. Kalau Syekh Nawawi al-Bantani lebih fokus berjuang melalui karya-karya kitabnya yang dijadikan referensi pengembangan keilmuan dan keislaman di lingkungan pesantren, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, maupun dunia Islam pada umumnya. Sementara Kiai Ma'ruf Amin lebih fokus berjuang melalui jalur pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai penerus perjuangan Syekh Nawawi al-Bantani, Kiai Ma'ruf Amin mempunyai tanggung jawab yang sama, sebagaimana tanggung jawab yang pernah diemban oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Sebagai seorang ulama sekaligus pejuang, Syekh Nawawi mempunyai tanggung jawab besar atas eksistensi umat Islam tidak hanya di Indonesia, namun juga di jagat dunia Islam, khususnya dalam pengembangan keilmuan dan

.....

**Selama ini, pada diri Kiai Ma'ruf Amin sudah melekat label ekonomi syariah. Ibarat mata uang koin, antara dirinya dengan ekonomi syariah sudah menyatu, tidak bisa dipisahkan.**

keislaman. Begitu pula Kiai Ma'ruf Amin merasa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bagi Kiai Ma'ruf Amin, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mempunyai kontribusi yang positif dalam proses pembangunan ekonomi nasional.

Selama ini, pada diri Kiai Ma'ruf Amin sudah melekat label ekonomi syariah. Ibarat mata uang koin, antara dirinya dengan ekonomi syariah sudah menyatu, tidak bisa dipisahkan. Ekonomi syariah adalah *thariqah* atau jalan yang dipilih Kiai Ma'ruf Amin untuk mencari keridhaan dari Allah SWT. Bisa jadi, setiap orang mempunyai jalan pengabdianya masing-masing untuk bisa *wushul* sampai ke Allah SWT. Kiai Ma'ruf Amin memilih *thariqah* ekonomi syariah sebagai salah satu lahan perjuangan dan penghambaan kepada Allah SWT.

### **Thariqah Ekonomi Syariah**

Langkah Kiai Ma'ruf Amin menetapkan *thariqah* ekonomi syariah sebagai jalan perjuangan merupakan pilihan yang tepat. Dalam diri Kiai Ma'ruf Amin mengalir darah kuat seorang ulama yang mempunyai tanggung jawab besar untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk di dalamnya, bagaimana mengimplementasikan ekonomi syariah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam berbagai pidatonya sebagai Wakil Presiden, Kiai Ma'ruf Amin sering menyitir ungkapan yang saat ini menjadi *tagline* komunitas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), yaitu "memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat".

Kiai Ma'ruf Amin mengakui turut serta menggerakkan ekonomi syariah sejak dulu. *"Karena saya kalau soal ekonomi syariah terus hati saya bergetar, karena saya bersama semua teman ikut mulai gerakan ekonomi syariah di Indonesia yang kita dulu membuat sembojannya 'memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat,'"* ungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada acara Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah di Jakarta (15/11/2019).

*"Dan dengan adanya panduan yang kita berikan itu, kita harapkan fungsi MUI dan DSN dalam rangka memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat semakin kuat dalam rangka himayatul ummah 'anil muamalah ghairi syar'iyah (menjaga umat supaya jangan sampai bermuamalah dengan sesuatu yang tidak syariah),"* tutur Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara peresmian



Pembukaan Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui *video conference* (22/07/2020).

Bertepatan dengan acara Ijtima Sanawi atau Pertemuan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2023 di Jakarta (13/10/2023), Kiai Ma'ruf Amin juga menuturkan narasi memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Ketika gerakan ekonomi syariah dimulai sekitar tahun 2000, banyak masyarakat menyangsikannya BMI berdiri 1994. *"Dulu kita mulai tahun 2000, kita sebut sebagai gerakan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat,"* tutur Kiai Ma'ruf Amin.

Ungkapan di atas sejatinya memiliki 2 (dua) maksud dan tujuan. *Pertama*, ungkapan memasyarakatkan ekonomi syariah mempunyai makna bahwa ekonomi syariah di Indonesia pada tataran tertentu masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sehingga perlu adanya langkah strategis untuk memasyarakatkannya. Kondisi ini disebabkan oleh pandangan bahwa ekonomi syariah adalah konsep yang baru. Masyarakat sudah lebih dulu *familiar* berinteraksi melalui ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional dianggap sudah memasyarakat terlebih dahulu dibanding dengan ekonomi syariah. Memang betul, secara kelembagaan praktik ekonomi konvensional melalui lembaga keuangan konvensional, seperti bank, pegadaian atau asuransi, sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman penjajahan kolonial. Hal ini terbukti jika kita menelusuri sejarah keberadaan bank, pegadaian ataupun asuransi konvensional di Indonesia yang sudah ada sejak era sebelum Indonesia merdeka.

Misal, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendeklarasi eksistensinya sejak tahun 1895. Bahkan Pegadaian mengklaim keberadaannya dimulai sejak VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), Perusahaan Hindia Timur Belanda, mendirikan Bank Van Leening, sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, pada tahun 1746. Begitu pula dengan sejarah asuransi konvensional di Indonesia, AJB Bumiputera yang sudah eksis sejak tahun 1912.

Sedangkan ekonomi syariah secara kelembagaan baru dikenal di awal tahun 90-an, tepatnya tatkala Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tahun 1991. Saat ini entitas BMI, tercatat sebagai PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. BMI merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan syariah. BMI didirikan atas inisiasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan



Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Setelah BMI, sebagai bank syariah yang pertama berdiri di Indonesia, selanjutnya diikuti dengan berdirinya perusahaan asuransi syariah. Tercatat sebagai perusahaan asuransi syariah yang pertama berdiri di Indonesia adalah perusahaan PT Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994. Pada tahun yang sama, PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. Satu tahun kemudian, tepatnya pada 2 Juni 1995 didirikan PT Asuransi Takaful Umum, sebagai anak perusahaan dari PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Berdasarkan perbandingan waktu kelahiran lembaga keuangan konvensional (LKK) dan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, jaraknya cukup jauh. Sekitar hampir dua setengah abad rentang waktu kemunculan LKK dengan LKS. Dengan asumsi penghitungannya dimulai dari kemunculan Bank Van Leening, sebagai wakil dari LKK, yang diklaim sebagai cikal bakal adanya Perusahaan Pegadaian pada tahun 1746. Sedangkan LKS dihitung dari kemunculan BMI pada tahun 1991. Artinya, masyarakat Indonesia memang sudah mengenal dan berinteraksi terlebih dulu dengan LKK, melalui transaksinya dengan Bank Van Leening di era kolonial.

Adanya kelambatan *start* dalam memulai pengenalan ekonomi dan keuangan syariah ke masyarakat Indonesia, dibandingkan dengan awal pengenalan ekonomi dan keuangan konvensional, menjadikan satu sebab munculnya slogan perlunya ‘memasyarakatkan ekonomi syariah’ yang sering dikemukakan oleh Kiai Ma’ruf Amin dalam beberapa forum acara yang dihadapinya. Kiai Ma’ruf Amin menyadari bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan. Di antara tantangan tersebut masih rendahnya literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 telah merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Menurut Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih sangat rendah. Masih adanya gap 40 persen antara tingkat literasi keuangan secara keseluruhan jika dibandingkan tingkat literasi keuangan syariah. Gap literasi tersebut mempunyai arti, dari 100 orang hanya 9 orang yang benar-benar melakukan keuangan syariah. Sedangkan tingkat inklusi keuangan



**Indonesia  
Sharia Economic  
Festival 2023.**

syariah di Indonesia, berdasarkan SNLIK, baru mencapai angka 12,12 persen, tertinggal jauh dari indeks keuangan secara umum yang mencapai 85,10 persen.

Dalam beberapa forum, Kiai Ma'ruf Amin merasa perlu menekankan adanya program peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin terus menekankan pentingnya pening-



katan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang efek dominonya berdampak pada besarnya penerimaan dan penerapan ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kontribusi ekonomi dan keuangan syariah pada perekonomian nasional. *“Semakin besar literasi ekonomi dan keuangan syariah, semakin besar pula penerimaan dan penggunaan produk ekonomi dan keuangan syariah oleh masyarakat, yang berujung pada*

.....

**“Saya minta tingkatkan terus literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, setidaknya untuk mencapai 50 persen. Ini akan berkorelasi dengan meluasnya pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia”, ujar Kiai Ma’ruf Amin.**

*peningkatan sektor ini terhadap perekonomian nasional”,* ungkap Kiai Ma’ruf Amin pada acara Musyawarah Nasional VI MES Tahun 2023 di Jakarta (01/10/2023).

Kiai Ma’ruf Amin menargetkan literasi dan inklusi keuangan syariah bisa mencapai 50 persen. Kiai Ma’ruf Amin menegaskan perlu adanya peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah demi memperluas pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, pada saat menghadiri dan membuka acara *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) tahun 2023 di Jakarta (26/10/2023).

Walaupun begitu, sesungguhnya praktik ekonomi syariah dalam skala mikro, sudah dijalankan oleh umat Islam Indonesia. Tentunya pendekatan ini tidak dilakukan secara kelembagaan. Maksudnya, tidak dipahami dalam bentuk interaksi ekonomi antara umat Islam Indonesia dengan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia. Namun, pendekatan yang digunakan melalui model praktik yang dilakukan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim sejati, tentunya dalam dirinya dituntut untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tuntutan tersebut adalah dalam bentuk pengamalan praktik ekonomi sesuai dengan yang ada dalam ajaran Islam. Bentuk praktik ekonomi syariah yang dilakukan secara personal oleh seorang muslim dapat berwujud dalam kegiatan ekonomi antar individu, misal dalam bentuk jual beli ataupun pemenuhan kebutuhan keluarga yang dilakukan oleh kepala rumah tangga, tentunya semua itu dipandu dengan ketentuan yang ada dalam ajaran Islam.

Sedangkan ungkapan *kedua*, yakni mensyariahkan ekonomi masyarakat mempunyai maksud bahwa ada sebagian praktik ekonomi masyarakat di Indonesia yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah Islam. Sehingga masih perlu adanya *tagline* “mensyariahkan ekonomi masyarakat”. Mensyariahkan ekonomi masyarakat tidak hanya dipahami secara formal kelembagaan dengan mendorong adanya proses ‘hijrah’ dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Namun lebih dari itu, mendengungkan narasi mensyariahkan ekonomi masyarakat sebagai bagian ketundukan dan kepatuhan, khususnya umat Islam di Indonesia, pada ketentuan ekonomi yang sudah digariskan oleh Allah dalam agama Islam.

### **Kiprah di MUI hingga menjabat Wakil Presiden**

Kiprah Kiai Ma’ruf Amin dalam memperjuangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terekam jejaknya sejak ia masih aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kiai Ma’ruf Amin mulai aktif di MUI sejak tahun 1996, sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat sampai tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2000, Kiai Ma’ruf Amin di MUI ditunjuk sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat hingga tahun 2006. Tidak hanya berhenti sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, pada periode berikutnya, tepatnya pada tahun 2014–2015, Kiai Ma’ruf Amin mendapat amanah sebagai Wakil Ketua MUI Pusat. Karir puncak Kiai Ma’ruf Amin di MUI Pusat menjabat sebagai Ketua Umum MUI Pusat dari tahun 2015 sampai 2019. Selain itu, Kiai Ma’ruf Amin merangkap sebagai Ketua Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sebagai bagian dari MUI, tentunya Kiai Ma’ruf Amin sadar atas tanggung jawab besar yang diembannya. Tanggung jawab tersebut tidak lain adalah menjaga umat Islam Indonesia agar tetap dalam kaedah syariah Islam, khususnya dalam mengonsumsi produk yang halal dan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah Islam. MUI sebagai wadah para alim ulama yang mempunyai latar belakang berbeda organisasi, alim ulama yang berlatar belakang dari berbagai organisasi, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al Ittihadiyyah, DMI dan al-Washliyah, mempunyai peran penting dalam mengawal tugas *himayatul ummah*, menjaga umat Islam Indonesia. Dalam kaitannya dengan penjagaan umat Islam Indonesia pada aktivitas



**Ijtima Sanawi  
Dewan Pengawas  
Syariah 2023.**

ekonomi, ada dua aspek yang dilakukan oleh MUI, yang kedua aspek tersebut posisi Kiai Ma'ruf Amin di MUI mempunyai peran yang strategis.

*Pertama*, peran Kiai Ma'ruf Amin di Komisi Fatwa MUI Pusat. Kiai Ma'ruf Amin di Komisi Fatwa MUI Pusat mempunyai peran yang strategis. Peran strategis yang dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin, sebagai Ketua Komisi Fatwa, lebih pada mengawal umat Islam Indonesia untuk mengonsumsi produk halal. Sudah banyak fatwa produk halal yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat. Fatwa produk halal ini nantinya dapat menjadi pandu atau pedoman bagi umat Islam Indonesia. Pada posisi seperti ini, MUI memerankan dirinya sebagai *khadimul ummah*. Menurut Kiai Ma'ruf Amin ada dua peran yang dapat dilakukan oleh MUI, sebagaimana *tagline* MUI yang sudah familiar selama ini, yakni peran MUI sebagai *khadimul ummah wa shadiqul hukumah*, pelayan umat dan mitra pemerintah.

*Kedua*, peran Kiai Ma'ruf di DSN-MUI. Tidak bisa dimungkiri bahwa Kiai Ma'ruf Amin adalah sosok yang



selama ini ada di balik eksistensi DSN-MUI. DSN-MUI merupakan salah satu organ yang ada di bawah struktur organisasi MUI dengan salah satu tugasnya memberikan panduan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini, DSN-MUI telah menetapkan sebanyak 156 fatwa yang berkaitan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Sebuah prestasi yang layak mendapat acungan jempol bagi DSN-MUI, karena sudah memproduksi fatwa yang nantinya dapat dipedomani oleh pelaku di industri bisnis dan keuangan syariah di Indonesia.

Selanjutnya, kiprahnya Kiai Ma'ruf Amin sebagai orang nomor dua di Indonesia, yakni sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Posisi strategis sebagai Wapres, terlihat dengan seksama tidak disia-siakan oleh Kiai Ma'ruf Amin dalam melakukan proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin menyadari, dengan posisinya sebagai Wapres dapat melakukan banyak hal untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebagai Wapres, Kiai Ma'ruf Amin mendapat mandat regulasi untuk menjadi Wakil Ketua KNEKS sekaligus merangkap Ketua Harian KNEKS. Bagi Kiai Ma'ruf Amin, KNEKS menjadi medan perjuangan selanjutnya, setelah dari MUI, untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebagai Ketua Harian KNEKS, Kiai Ma'ruf Amin dituntut untuk mampu mengorkestrasikan strategi dan kebijakan yang mendukung proses percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. KNEKS layaknya *dirigen* yang memandu pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. ❁

# Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dan kita, atas dasar itu pula kita sejak tahun 2000-an di Indonesia mengembangkan ekonomi syariah yang kita sebut dengan, memulai dengan “mensyariahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah”.

(K.H. Ma'ruf Amin)

**KEMUNCULAN** praktik ekonomi dan keuangan syariah di suatu negara dapat diklasifikasi menjadi dua model. *Pertama*, model *bottom up*. Model ini menampilkan fenomena praktik ekonomi dan keuangan syariah bermula dari gerakan arus bawah. Tidak dari arus atas. Maksudnya, lahirnya praktik ekonomi dan keuangan syariah di suatu negara bukan bermula dari dorongan pemerintah. Masyarakat bergerak dan menginisiasi adanya praktik ekonomi dan keuangan syariah. *Kedua*, model *top down*. Model ini memberikan ruang besar bagi pemerintah untuk aktif dalam memunculkan praktik ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Pemerintah mempunyai kepentingan dan agenda tersendiri dengan hadirnya ekonomi dan keuangan syariah.

Ada hal yang menarik untuk dicermati dengan kemunculan praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Awalnya, praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia bermula dari gerakan arus bawah. Tepatnya pada awal tahun 1990-an. Saat itu, sebelum lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai



bank syariah pertama di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal terlebih dulu praktik ekonomi syariah secara kelembagaan dalam wujud Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Tercatat dalam sejarah perkembangan BMT di Indonesia, paling tidak ada dua BMT yang sudah berdiri pada tahun 1980-an, yakni BMT Teknosa di Masjid Salman ITB Bandung dan BMT Ridho Gusti di Jakarta.

Berdirinya BMI menjadi tonggak sejarah perkembangan keuangan syariah di Indonesia. BMI didirikan atas dasar inisiasi umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia saat itu menginginkan agar dapat bertransaksi melalui bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerap aspirasi umat Islam Indonesia. MUI bersama komponen umat Islam lainnya, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), berkomunikasi dengan Pemerintah untuk menyampaikan aspirasi umat Islam Indonesia. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Presiden Soeharto, memberikan kesempatan berdirinya BMI, sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan waktu, keberadaan praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin menguat karena mendapat *support* dari negara. Negara hadir melalui Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pada gilirannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tentunya, sudah banyak regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK, baik berupa Undang-Undang, Peraturan BI ataupun Peraturan OJK itu sendiri. Misal, dari sisi aturan perundang-undangan, praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sudah memiliki sederet Undang-Undang, di antaranya UU Wakaf, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara, dan terakhir UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang semakin menguatkan sektor keuangan syariah di Indonesia. Selain itu juga ada Peraturan Presiden No 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Selain adanya keterlibatan Pemerintah, BI dan OJK dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, tidak menafikan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui dua organ lembaga yang ada dibawahnya, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Komisi Fatwa MUI. DSN-MUI men-*support* fatwa-fatwa



yang berkenaan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Data per September 2023 sudah ada 156 fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Sedangkan Komisi Fatwa MUI lebih banyak menerbitkan fatwa-fatwa tentang produk halal, yang dalam praktiknya juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Fatwa yang dihasilkan oleh DSN MUI dan Komisi Fatwa MUI, dapat menjadi referensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebagian besar fatwa DSN MUI dan Komisi Fatwa sudah di-*taqnin*, dalam bentuk regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dari kondisi ini, dapat dicermati kalau praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia bermula dari fase *bottom up* dan kemudian berlanjut pada fase *top down*. Selanjutnya, kehadiran dan keberlanjutan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran seorang Kiai Ma'ruf Amin. Baik perannya sebelum menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, ataupun perannya saat menjadi Wakil Presiden RI.

## Sebelum Menjadi Wakil Presiden

Dari sisi kebijakan pemerintah, praktik ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sebelum Kiai Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden RI sudah terlihat mengarah pada fase *top down*. Artinya, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah mendapat *support* dari negara, melalui berbagai kebijakan Pemerintah. Beberapa kebijakan Pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di era sebelum Kiai Ma'ruf Amin menjadi Wakil Presiden RI, di antaranya: *pertama*, penguatan kelembagaan industri keuangan syariah; *kedua*, lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang selanjutnya berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS); *ketiga*, target pencapaian *market share* 5% bagi industri perbankan syariah di Indonesia; dan *keempat*, berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Praktik ekonomi dan keuangan syariah sebelum Kiai Ma'ruf Amin memperoleh amanah sebagai Wakil Presiden dapat dilihat dari peran posisinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus merangkap sebagai Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI, serta sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Posisi Kiai Ma'ruf Amin di ketiga lembaga tersebut seperti segitiga emas yang bernilai sangat strategis. Strategis dalam keikutsertaannya

mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin tidak menyia-nyikan posisinya di tiga lembaga tersebut untuk kemanfaatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin sangat sadar dengan posisinya di tiga lembaga tersebut sangat membantu dalam pengembangan bisnis di industri keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai Ketua MUI, Kiai Ma'ruf Amin dapat menggerakkan organisasi keislaman yang ada dalam wadah MUI, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, dan al-Wasliyah, untuk bisa dalam satu barisan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan posisi Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membawa dampak positif dengan menerbitkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Fatwa-fatwa ekonomi dan keuangan syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI sangat membantu pertumbuhan dan operasional industri keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, saat yang sama Kiai Ma'ruf Amin memegang posisi penting sebagai Rois Aam PBNU. Sebagai orang nomor satu di tubuh NU, Kiai Ma'ruf Amin mempunyai pengaruh yang kuat di internal NU dan kalangan pengasuh pondok pesantren. Pengaruh yang kuat di NU, dimanfaatkan betul oleh Kiai Ma'ruf Amin untuk menyatukan barisan di internal NU dan pondok pesantren untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

*Pertama*, penguatan kelembagaan industri keuangan syariah. Kebijakan Pemerintah pertama yang dapat direkam dalam buku ini dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah

• • • • •

**Sebagai Ketua MUI, Kiai Ma'ruf Amin dapat menggerakkan organisasi keislaman yang ada dalam wadah MUI, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, al-Wasliyah, untuk bisa dalam satu barisan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.**



penguatan dari sisi kelembagaan di industri keuangan syariah di Indonesia. Fenomena ini diantaranya ditandai dengan penetapan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya UU Perbankan Syariah, posisi industri perbankan syariah secara kelembagaan semakin kuat. UU Perbankan Syariah mempertegas berlakunya *dual banking system*, dua model sistem perbankan, di Indonesia, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Pada kondisi ini, posisi Kiai Ma'ruf Amin sangat jelas dan tidak diragukan dalam memperjuangkan perbankan syariah di Indonesia. Muhaimin Iskandar atau yang biasa akrab dipanggil Cak Imin, dalam satu kesempatan di bulan Agustus 2018, di saat ramainya pencalonan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden bersama Joko Widodo, mengatakan bahwa keberadaan bank-bank syariah di Indonesia tidak akan pernah ada tanpa andil dari Ma'ruf Amin. "Catat ya, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan Bank Syariah lainnya, tidak akan pernah ada tanpa (peran) Kiai Ma'ruf. Beliau adalah Bapak ekonomi *mustadh'afin*", ucap Cak Imin.

Sebelum menjadi Wakil Presiden, Kiai Ma'ruf Amin tercatat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank syariah, baik bank syariah swasta ataupun bank syariah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Diantaranya, Bank Mega Syariah Indonesia (2004-2019), Bank BNI Syariah (1999-2019), dan Bank Muamalat Indonesia (2001-2009). Sebagai bagian dari organ Dewan Pengawas Syariah, Kiai Ma'ruf Amin menyadari betul tanggung jawabnya untuk mengawal operasional bank syariah tersebut agar masih tetap dalam koridor kesesuaian dengan prinsip syariah. Ini yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya wajib ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan di bank konvensional tidak ada persyaratan keharusan adanya DPS. DPS di bank syariah dan LKS lainnya yang berbadan hukum Perseroan Terbatas merupakan *mandatory* dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penjelasan mengenai keberadaan DPS di perseroan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah terdapat di UU Perseroan Terbatas pasal 109.

Pada tahun 2017, NU Online sempat membuat berita dengan judul "Kiai Maruf Jelaskan Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional". Pada kesempatan di acara Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan tema "Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan



Syariah di Indonesia” yang diselenggarakan di Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputar, Rabu (17/5/2017), Kiai Ma’ruf Amin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum MUI menjelaskan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. “Saya katakan, bedanya (bank syariah dan bank konvensional) seperti langit ketujuh dan sumur bor”, kata Kiai Ma’ruf Amin.

Pada acara tersebut Kiai Ma’ruf Amin mempunyai kesempatan yang baik untuk menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Menurut Kiai Ma’ruf Amin, masih ada orang yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Mereka mengatakan, perbedaan di antara keduanya hanya bersifat pelabelan semata, seperti yang satu karyawannya berjilbab, sementara yang satu tidak. Yang satu mengucapkan, *assalamualaikum* dan yang satunya lagi mengucapkan selamat pagi kepada nasabah. Padahal, menurut Kiai Ma’ruf Amin, keduanya mempunyai banyak perbedaan prinsip yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pada tataran substansional, ada perbedaan mendasar dari sisi praktik pengelolaan dana di bank syariah dan bank konvensional.

Peran lain yang dilakukan oleh Kiai Ma’ruf Amin, sebelum menjadi Wakil Presiden RI, dalam penguatan industri keuangan syariah di Indonesia, terlihat dari posisinya sebagai Ketua Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jabatan sebagai Ketua Harian DSN-MUI, diemban oleh Kiai Ma’ruf Amin mulai tahun 1999. Sebagai Ketua Harian DSN-MUI, Kiai Ma’ruf Amin ikut serta berperan aktif dalam menguatkan keberadaan industri keuangan syariah di Indonesia. Posisi DSN-MUI mempunyai kedudukan yang strategis. DSN-MUI merupakan mitra kerja bagi Pemerintah, BI dan OJK dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia.

DSN-MUI mempunyai visi, memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Misi yang diemban oleh DSN-MUI adalah menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Sedangkan tugas DSN-MUI, diantaranya adalah: menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk dan jasa LKS, LBS dan LPS lainnya; mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS dan LPS lainnya; membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; mengeluarkan



surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS, LBS dan LPS lainnya; memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS dan LPS lainnya; memberikan rekomendasi calon Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan/atau mencabut rekomendasi ASPM; menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait; menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS dan LPS lainnya; menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan; menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS, LBS dan LPS lainnya; melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis dan ekonomi syariah; dan menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Saat menjadi Ketua Harian DSN-MUI, Kiai Ma'ruf Amin beberapa kali membentuk kelompok kerja bersama dengan OJK. Kelompok kerja ini terdiri orang DSN dan OJK yang *expert* dalam satu hal yang berkaitan dengan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, DSN-MUI setiap tahun memiliki agenda rutin *Ijtima Sanawi* (*annual meeting*) untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di industri keuangan dan bisnis syariah. Ijtima sanawi berlangsung sejak DSN-MUI dinakhodai Kiai Ma'ruf Amin hingga berlangsung saat ini. Dalam forum ini, DPS di industri jasa keuangan



**Saat menjadi Ketua Harian DSN-MUI, Kiai Ma'ruf Amin beberapa kali membentuk kelompok kerja bersama dengan OJK. Kelompok kerja ini terdiri orang DSN dan OJK yang *expert* dalam satu hal yang berkaitan dengan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.**

dan bisnis syariah, mendapatkan penyegaran dan *up date* informasi berkenaan dengan regulasi, fatwa ataupun perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

*Kedua*, lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNKS yang saat ini lebih dikenal dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 91 Tahun 2016. Berdirinya KNKS diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah. Selain itu, KNKS diharapkan dapat memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara otoritas, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lain di sektor keuangan syariah. Dalam perkembangannya, KNKS berkembang menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2020. Salah satu alasan perubahan KNKS menjadi KNEKS adalah dalam rangka peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Eksistensi KNKS tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosok Kiai Ma'ruf Amin. Direktur Eksekutif KNKS, Ventje Rahardjo, di awal bulan Februari 2019 menyempatkan bertemu dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Ma'ruf Amin. "Hari ini kami mendapat arahan yang cukup jelas," kata Ventje, di Rumah Situbondo Menteng Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. Ventje menyatakan, Kiai Ma'ruf Amin menginginkan, agar KNKS segera berfungsi. Ada tiga pesan yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin kepada Ventje; (1) KNKS mempercepat pertumbuhan bank syariah; (2) KNKS mempercepat pertumbuhan ekosistem digital syariah termasuk *payment* sistem syariah; (3) KNKS membantu pertumbuhan zakat baik penyaluran maupun distribusi zakat di Indonesia. Ventje menambahkan Kiai Ma'ruf Amin menginginkan KNKS mengupayakan *holding* bank-bank syariah milik negara.

Saat masih menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari pasangan Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa pasangan calon presiden nomor urut 01 (Jokowi) telah melakukan langkah nyata untuk mengembangkan ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan. "Untuk keuangan syariah kita bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah yang disebut KNKS yang diketuai Presiden sendiri", kata calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Ma'ruf Amin dalam debat kelima Pilpres 2019, Sabtu (13/4/2019), sebagaimana diberitakan oleh bisnis.



com. Kiai Ma'rif Amin kemudian melanjutkan bahwa Pemerintah akan terus memperkuat posisi lembaga keuangan dengan penguatan kelembagaan. Kemudian akan mendorong pelayanan yang lebih *market friendly* dan membangun sumber daya yang kuat.

Keberadaan KNKS berdiri saat periode pemerintahan dipegang oleh duet Jokowi dan Jusuf Kalla. Artinya, komitmen rezim Jokowi-JK untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia sudah bisa dirasakan dan cukup kuat, dengan melahirkan KNKS. Namun, belum terdengar *greget* peran KNKS. Saat itu, di tahun 2018, Praktisi Ekonomi Syariah Gunawan Yasni, mengatakan sekiranya Kiai Ma'rif Amin menjadi Wakil Presiden, KNKS akan benar-benar berfungsi. "Maka kalau Pak Kiai Ma'rif Amin jadi Wakil Presiden harapannya KNKS benar-benar berfungsi dan bukan hanya nama saja", ujar Gunawan kepada CNBC Indonesia.

Peran aktif Kiai Ma'rif Amin sebagai Ketua Umum MUI terlihat pada posisinya yang masuk dalam struktur organisasi KNKS. Di KNKS, Kiai Ma'rif Amin mewakili MUI sebagai bagian dari Dewan Pengarah KNKS. Selain diisi oleh Ketua Umum MUI, Dewan Pengarah KNKS terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

*Ketiga*, target pencapaian *market share* 5% di industri perbankan syariah. Ada semacam kebijakan yang tidak tertulis dari otoritas perbankan di Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan *market share* industri perbankan syariah di Indonesia. Saat itu, sebelum ada OJK, otoritas perbankan masih ada di Bank Indonesia (BI). Melihat kondisi *market share* bank syariah di Indonesia yang masih kecil, BI berkeinginan meningkatkan *market share* tersebut dengan menargetkan pada angka 5% dari total *market share* di industri perbankan nasional. Kondisi ini menjadi tantangan sendiri bagi pelaku di industri perbankan syariah. Bahkan, ada yang memaknai pencapaian target *market share* 5% menjadi semacam *trap*, karena saat itu dirasa sulit untuk mencapainya.

Sebuah portal online, *alineia.id*, memberikan informasi tentang *market share* bank syariah dengan judul yang cukup mengagetkan.

Alinea.id mengangkat berita tersebut dengan judul 'Lolos jebakan 5%, pangsa pasar perbankan syariah masih mandek di 7%'. Sumber berita yang diperoleh alinea.id berasal dari Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muhammad Ismail Riyadi. "Market share bank syariah sangat-sangat lamban dulu dikenal jebakan 5% tapi akhirnya bisa naik 7%", ujar Ismail saat memaparkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Bogor.

Target pencapaian *market share* 5% sejatinya sudah dicanangkan oleh otoritas perbankan Indonesia sejak Deputy Gubernur BI-nya dijabat oleh Siti Fadrijah. Saat menghadiri acara *Indonesia Sharia Expo* di Jakarta, Rabu (24/10/2007), sebagaimana dilansir oleh antaranews.com, Siti Fadrijah menyatakan bahwa target pertumbuhan pangsa aset perbankan syariah senilai 5 persen pada akhir 2008 bukan merupakan angka mati, tapi semangat untuk maju bagi perbankan syariah. "Saya sudah katakan target 5 persen bukan harga mati tapi spirit untuk maju menggaet industri perbankan syariah untuk berjalan satu arah. Jadi dengan adanya target semua pihak harus jalan ke sana, tidak masing-masing," kata Bu Fad, panggilan Siti Fadrijah.

Peran Kiai Ma'ruf Amin sebelum menjadi Wapres, baik sebagai Ketua Umum MUI ataupun sebagai Rais Aam PBNU, dalam mendorong tercapainya target *market share* 5% di industri perbankan syariah, terlihat dalam bentuk *support*-nya mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin kerap menyampaikan gagasannya di berbagai forum diskusi, seminar atau sosialisasi ekonomi syariah. Bahkan Kiai Ma'ruf Amin menjadi *icon*-nya. Salah satu yang menjadi penyelenggara forum seperti itu adalah Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) sebagai lembaga nirlaba independen yang pendiriannya diinisiasi oleh Bank Indonesia untuk membantu melakukan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat.

Forum *halaqoh* juga menjadi wadah menyampaikan gagasan dan edukasi. Di antaranya *halaqoh* para ulama kiai pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur yang diadakan oleh PKES di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Acara tersebut dilaksanakan pada tahun 2007. Kiai Ma'ruf Amin saat itu masih menjabat sebagai Rais Syariah PBNU dan Koordinator Harian Ketua MUI Pusat. Dengan *power* pengaruhnya yang kuat di internal NU, Kiai Ma'ruf Amin dapat mengumpulkan para ulama kiai pengasuh pondok pesantren

se Jawa Timur di Tambak Beras Jombang. Pada kesempatan itu, Kiai Ma'ruf Amin mengajak kepada peserta *halaqoh*, para kiai pengasuh pesantren, untuk bermuamalah melalui transaksi di bank syariah.

Di sisi yang lain, Kiai Ma'ruf Amin memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengajak masyarakat mengembangkan ekonomi syariah. Pada forum silaturahmi dan sosialisasi fatwa MUI pada Rabu (24/2/2016), DSN MUI menggelorakan ajakan untuk pencapaian pangsa pasar perbankan syariah sebesar 5%. Menurut Kiai Ma'ruf Amin, pada tahun 2015 pencapaian target pangsa pasar masih di bawah 5%, dengan kondisi perekonomian Indonesia melewati krisis di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Kiai Ma'ruf Amin juga mengungkapkan keberhasilan pengembangan keuangan syariah jika ada kerjasama saling mendukung dengan lembaga otoritas keuangan dan bisnis, semacam BI, OJK dan Kementerian Keuangan. *"Ini sudah terbukti di masa lalu, sekarang dan insyaallah seterusnya"*, ujar Kiai Ma'ruf Amin.

Dari berbagai contoh aktivitas kerja yang dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin di atas, baik kapasitasnya sebagai orang NU ataupun sebagai orang MUI, semuanya terbukti diarahkan untuk mendukung pencapaian target *market share* 5% di industri perbankan syariah. Dalam benak Kiai Ma'ruf Amin ada tanggung jawab besar untuk mengawal pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, termasuk target capaian pangsa pasar 5% bank syariah.

*Keempat*, berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Isu mengenai produk halal tidak luput dari perhatian Kiai Ma'ruf Amin. Bagi Kiai Ma'ruf Amin, adanya penjaminan produk halal merupakan bagian dari menjaga agama (*hifdzud din*). Sehingga umat Islam Indonesia dapat memperoleh kepastian dalam mengonsumsi produk halal. Sebelum ada BPJPH, kehalalan produk makanan dan minuman di Indonesia ditangani oleh lembaga swasta, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwanya dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan dan Kosmetika (LPPOM) yang juga secara struktural di bawah MUI.

BPJPH didirikan pada Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. Saat berdirinya BPJPH tahun 2017, posisi Kiai Ma'ruf Amin masih sebagai Ketua Umum MUI. Ada catatan

• • • • •

**Kiai Ma'ruf Amin juga mengungkapkan keberhasilan pengembangan keuangan syariah jika ada kerjasama saling mendukung dengan lembaga otoritas keuangan dan bisnis, semacam BI, OJK dan Kementerian Keuangan. "Ini sudah terbukti di masa lalu, sekarang dan insyaallah seterusnya", ujar Kiai Ma'ruf Amin.**

yang menarik terkait dengan peran Kiai Ma'ruf Amin dibalik berdirinya BPJPH. Awalnya, ada dua kelompok yang merespon perlu atau tidak perlunya BPJPH. *Pertama*, tentunya kelompok yang tidak menginginkan adanya BPJPH dengan alasan selama ini produk halal sudah ada lembaga yang menanganinya; dan *kedua*, kelompok yang mempunyai *interest* dengan hadirnya BPJPH. Kelompok kedua lebih banyak diwakili oleh pihak Pemerintah melalui Kementerian Agama.

Kementerian Agama RI melalui laman portalnya pada Sabtu (17/12/2016) sempat membuat tajuk berita dengan judul "Sekjen: Ketum MUI Dukung Pemerintah Selenggarakan Jaminan Produk Halal". Saat itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, mengatakan bahwa Ketua MUI, Kiai Ma'ruf Amin, mendukung upaya penyelenggaraan jaminan produk halal yang akan dilakukan oleh Pemerintah. "Sama sekali tidak ada keberatan dari MUI untuk mengalihkan program sertifikasi tersebut", terang Nur Syam usai menjadi narasumber pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang digelar oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.

Masih menurut Nur Syam, dalam FGD tersebut Kiai Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa MUI melakukan program sertifikasi halal karena mendapat tugas dari Pemerintah. Karenanya, sesuai dengan regulasi, program sertifikasi halal harus dilakukan oleh Pemerintah, maka tidak ada alasan mencegah atau menolaknya. "Beliau (Kiai Ma'ruf Amin) menyatakan, tidak benar jika ada

anggapan bahwa MUI keberatan untuk mengalihkan sertifikasi halal ke Pemerintah”, ujar Nur Syam.

Saat itu, tepatnya di bulan Oktober 2017 Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menyebut BPJPH tidak akan melampaui kewenangan MUI. Lukman menyebut MUI mempunyai 3 kewenangan terkait dengan penentuan produk halal. “Keberadaan, eksistensi MUI masih sangat penting dalam kaitan jaminan produk halal ini. Setidaknya ada 3 kewenangan yang dimiliki MUI, meskipun produk halal ini sudah berdiri”, kata Lukman di Gedung Kementerian Agama, , Rabu (11/10/2017). Pada saat itu, Kiai Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI hadir bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad. Lebih lanjut kata Lukman, ketiga kewenangan MUI tersebut adalah; (1) terkait dengan kehalalan suatu produk; (2) melakukan atau memberikan sertifikat kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); dan (3) terkait dengan auditor yang bergerak dalam industri halal harus dalam persetujuan MUI.

Dari gambaran di atas terlihat logika berpikir seorang Kiai Ma’ruf Amin yang *alim* dan mumpuni, bahwa sebelum ada ketentuan regulasi, dalam hal ini UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagai orang nomor satu di MUI mempunyai tanggung jawab agama untuk melakukan penjaminan produk halal bagi umat Islam Indonesia melalui lembaga MUI. Namun setelah negara menyadari dan perlu hadir dalam penjaminan produk halal, kewenangan mengadministrasikan pernyataan kehalalan suatu produk, dikembalikan oleh MUI ke Pemerintah melalui Kementerian Agama RI dengan BPJPH-nya.

Dari keempat kebijakan Pemerintah di atas, yakni terkait dengan kebijakan penguatan lembaga keuangan syariah, adanya KNKS, *market share* 5% dan BPJPH, semuanya terjadi pada saat Kiai Ma’ruf Amin sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Selanjutnya, setelah Kiai Ma’ruf Amin memegang amanah sebagai Wakil Presiden RI, kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin menguat dan mendapatkan momentum yang tepat, berkat posisi strategis Kiai Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI.

## Sebagai Wakil Presiden

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah saat Kiai Ma’ruf Amin menjalankan amanahnya sebagai Wakil Presiden RI mendapatkan momentum yang tepat. Tidak salah jika ada para pihak yang menyebut

fase ini sebagai era keemasan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Banyak kebijakan yang didorong oleh Pemerintah untuk kemajuan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pada posisi ini, jika menyebut Pemerintah maka tidak bisa terlepas dari keikutsertaan Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI ataupun posisinya sebagai Ketua Harian KNEKS dalam penguatan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Kiai Ma'ruf Amin terpilih menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Joko Widodo sebagai Presiden RI. Keterpilihan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI, sudah banyak diprediksi oleh para pihak mempunyai dampak positif dan sangat kuat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *Kompas.id* pada Kamis (09/08/2018) merekam jejak prediksi adanya potensi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia jika Kiai Ma'ruf Amin terpilih menjadi Wakil Presiden RI. Dalam laman portal *online*-nya, *kompas.id* memberikan judul beritanya dengan "Ma'ruf Amin Ditunjuk

Rapat Pleno Dewan  
Pertimbangan Majelis  
Ulama Indonesia.





Sebagai Wapresnya Jokowi, Ekonomi Syariah Berpotensi Tumbuh". Saat itu, Presiden Jokowi mendeklarasikan Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi dalam panggung pemilu 2019. Ekonom memperkirakan, jika Kiai Ma'ruf Amin terpilih, ekonomi syariah nasional berpotensi tumbuh.

"Pak Ma'ruf adalah sosok yang menurut saya memperjuangkan ekonomi syariah sebagai salah satu arus utama ekonomi nasional", ujar Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Irfan Syauqi Beik, saat dihubungi oleh *kompas.id*, Kamis (09/08/2018) malam. Apabila Kiai Ma'ruf Amin terpilih nantinya, masih menurut Irfan, posisinya strategis dalam mengatur kebijakan dan potensi industri halal nasional. Berdampingan dengan Jokowi, pembangunan infrastruktur untuk menunjang industri halal Indonesia menjadi prioritas.

Selain *kompas.id*, rekaman jejak digital terkait dengan potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, jika Kiai Ma'ruf Amin terpilih menjadi Wapres, juga dilakukan oleh *detik.com*. Pada Jum'at (10/08/2018) *detik.com* mengabarkan dengan memberi judul beritanya dengan "Pengusaha: Ma'ruf Amin Bisa Dorong Ekonomi Syariah". Saat itu, *detik.com* mengambil sumber berita dari Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani. Menurut Rosan, sejatinya Kiai Ma'ruf Amin memiliki karier dan *track* yang cukup mumpuni di sektor ekonomi syariah. "Keberadaan Pak Ma'ruf Amin ini, pembangunan ekonomi syariahnya luar biasa, beliau sudah menjabat di berbagai institusi perbankan syariah. Kita akui itu", ungkap Rosan. Oleh karenanya, masih menurut Rosan, dengan dipilihnya Kiai Ma'ruf Amin sebagai Cawapres, maka ekonomi syariah Indonesia lebih bisa maju dari negara-negara lainnya.

Tidak ketinggalan, *mediaindonesia.com* juga memberitakan relasi pengaruh pencalonan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Cawapres Jokowi dengan potensi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam hal ini, *mediaindonesia.com* mengambil sumber referensi beritanya dari pakar ekonomi Lana Soelistianingsih. Menurut Lana, ada harapan yang disematkan pada Kiai Ma'ruf Amin sebagai Cawapres terpilih mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019, yaitu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah. "Semoga, apabila Ma'ruf Amin terpilih menjadi wakil presiden dalam Pemilu 2019, bersama petahana. Ia bisa mencetak blue print ekonomi syariah yang bisa diwujudkan 5-10 tahun mendatang," ungkap Lana kepada *Media Indonesia*.



.....

## Pemerintah merasa perlu melakukan perubahan KNKS menjadi KNEKS yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Prediksi yang disampaikan oleh para pakar ekonomi dan banyak pihak bukanlah isapan jempol belaka. Namun, menjadi realitas yang sedang berjalan. Pasca diangkatnya Kiai Ma'ruf Amin menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Jokowi, semakin nyata penguatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin sepertinya sangat sadar dengan posisi strategisnya sebagai Wakil Presiden saat ini. Mumpung mendapat amanah yang strategis sebagai Wakil Presiden dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Mungkin ada orang yang bilang seperti ini, kapan lagi kalau bukan saat ini memberikan kontribusi riil dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Ada beberapa koridor strategi yang digunakan Pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Strategi besar tersebut adalah: *pertama*, strategi menata kelembagaan dan penguatan regulasi, diantaranya diwujudkan dalam bentuk revitalisasi KNKS menjadi KNEKS, pembentukan KDEKS di tingkat provinsi, serta perbaikan regulasi seperti *spin off* Unit Usaha Syariah dan jaminan produk halal; *kedua*, strategi fokus, prioritas dan punya daya ungkit besar. Melalui rapat pleno KNEKS disusun program kerja yang menyinergikan program-program kementerian dan lembaga. Tiap kementerian dan lembaga diminta fokus dan menetapkan target kerja yang terukur. Sertifikasi halal, pembiayaan syariah sektor riil, penataan Kawasan industri halal, literasi syariah dan diplomasi



adalah beberapa yang menjadi fokus; *Ketiga*, strategi keberlanjutan. Pemajuan ekonomi syariah adalah proses yang tidak *instant*. Perlu konsistensi semua pihak. Upaya penting adalah dengan meletakkan perencanaan pengembangan ekonomi syariah pada perencanaan pembangunan di Pusat dan Daerah melalui pencantuman tema ekonomi syariah pada RPJPN dan RPJMN serta RPJPD dan RPJMD. Jalur berikutnya adalah penguatan pembentukan Badan yang secara khusus menangani ekonomi syariah untuk menjawab tantangan ke depan yang makin kompleks.

Pada kesempatan kali ini, akan diulas mengenai keberhasilan Kiai Ma'ruf Amin dalam implementasi kebijakan dan strategi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Paling tidak ada tujuh capaian di era Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden dalam penguatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *Pertama*, penguatan kelembagaan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS); *kedua*, keberhasilan dalam melakukan merger bank syariah plat merah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI); *ketiga*, mendorong berdirinya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS); *keempat*, penguatan industri halal nasional; *kelima*, revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; *keenam*, pengaturan mengenai Unit Usaha Syariah di Bank Konvensional, dan *ketujuh*, diplomasi ekonomi syariah di kancah global.

*Pertama*, penguatan kelembagaan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS). Keberadaan KNEKS merupakan revitalisasi dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Semula, pada tanggal 8 November 2016 Pemerintah secara khusus mendirikan KNKS. Tujuan pendirian KNKS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi syariah. Selanjutnya, sejak diundangkan pada tanggal 10 Februari 2020, atas usulan Kiai Ma'ruf Amin, Pemerintah merasa perlu melakukan perubahan KNKS menjadi KNEKS yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional untuk memperlihatkan peran Wapres. Sektor yang ditangani KNEKS diperluas dengan memasukkan sektor ekonomi. Selain itu, keberadaan KNEKS diharapkan menjadi pemacu visi menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Pencanangan titik awal untuk



memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan *hub* ekonomi syariah dunia dilakukan seiring dengan peluncuran Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada bulan Mei 2019.

KNEKS sudah memiliki Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Saat itu kelembagaannya masih KNKS. Tepatnya Selasa (14/5/2019) Presiden Joko Widodo beserta Dewan Pengarah KNKS meluncurkan MEKSI 2019-2024 di Gedung Bappenas, Jakarta. Kepala Bappenas saat itu, Bambang Brodjonegoro mengatakan, MEKSI 2019-2024 merupakan peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Rancangan kebijakan dan strategi yang ada di MEKSI 2019-2024 diarahkan benar-benar untuk mendorong perkuatan ekonomi syariah di Indonesia.

Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin berharap penguatan kelembagaan dari KNKS menjadi KNEKS dapat mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *"Saya mengharapkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan mengalami percepatan setelah KNKS diperkuat dan diperluas cakupannya menjadi KNEKS. Selaku Ketua Harian, saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah"*, kata Wapres saat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis ke-56 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, secara virtual, Selasa (22/06/2020).

KNEKS merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tugas KNEKS antara lain mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, KNEKS mengaktifkan empat fungsi, yakni: *pertama*, pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; *kedua*, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis ekonomi dan keuangan syariah; *ketiga*, perumusan dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah di sektor ekonomi keuangan syariah; *keempat*, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Dari sisi struktur organisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), KNEKS terdiri dari: pimpinan,



sekretaris merangkap anggota, anggota, manajemen eksekutif dan sekretariat KNEKS. Pimpinan terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Presiden dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian yang dijabat oleh Wakil Presiden. Sedangkan sekretaris diperankan oleh menteri yang membidangi penyelenggaraan urusan keuangan sekaligus merangkap sebagai anggota. Adapun anggota KNEKS sebagaimana diatur dalam Pasal 9, terdiri dari: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Agama, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri.

Keberadaan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden di KNEKS mempunyai nilai yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Wakil Presiden, Kiai Ma'ruf Amin di KNEKS menempati posisi sebagai Wakil Ketua dan sekaligus menjalankan fungsi sebagai Ketua Harian. Sebagai Ketua Harian, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin mempunyai tugas membantu dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KNEKS serta memberikan arahan kepada sekretaris, anggota dan manajemen eksekutif.

Mengawali tahun 2020, tepatnya pada hari Senin (20/01/2020), Kiai Ma'ruf Amin mendapat kunjungan dari Manajemen Eksekutif KNKS yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif Ventje Rahardjo. Dalam pertemuan tersebut Manajemen Eksekutif KNKS menyampaikan rencana-rencana pengembangan ekonomi syariah yang akan dilakukan pada tahun 2020-2024. Wakil Presiden, Kiai Ma'ruf Amin, memberikan arahan terkait beberapa hal, diantaranya mengenai pengembangan industri halal, keuangan syariah, penghimpunan zakat dan wakaf, SDM dan regulasi serta penguatan lembaga KNKS yang akan menjadi KNEKS.

Pada Maret 2020, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas persiapan *Halal Industries Summit* (HIS) 2020 di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Hadir dalam kesempatan



rapat terbatas tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Fachrul Razi, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Soekoso. Selain itu dari Direktur Eksekutif KNEKS, Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal, dan Direktur Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal.

Pada rapat terbatas tersebut, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin menekankan bahwa kegiatan HIS 2020 yang mengambil tema "Promoting Halal Industries For Global Prosperity", adalah forum halal internasional pertama di dunia yang bersifat antar pemerintah (*inter governmental meeting*). Forum tersebut diarahkan sebagai *business event*, yang diawali dengan rangkaian kegiatan Pre-HIS, seperti *Indonesia Sharia Economy Festival* (ISEF) yang dikoordinasikan dengan Bank Indonesia sebagai *vocal point*. Sementara HIS 2020 diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri.

Pada tahun 2020, di mana saat itu kondisi dunia global masih dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi pandemi *Covid-19*, Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Harian KNEKS menyadari perlunya adaptasi dalam pengembangan strategi. Salah satu pilihan pengembangan strategi, menurut Kiai Ma'ruf Amin, melalui proses digitalisasi. Pandemi *Covid-19* telah membuat masyarakat beradaptasi, melalui gaya hidup yang berbeda. Hal ini tidak dapat dihindari dan bahkan perlu kita pacu inovasi yang memberikan manfaat dan keunikan tersendiri dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. "*Perkembangan teknologi dan digitalisasi tentunya sudah memberikan banyak perubahan, dalam gaya hidup bermasyarakat tidak terkecuali dalam melakukan aspek muamalah*", ujar Ketua Harian KNEKS Kiai Ma'ruf Amin dalam sebuah acara yang mengambil tema "*Digitalization Leading The Islamic Economy in The New Normal*" pada Selasa (15/12/2020).

Menurut Ketua Harian KNEKS Kiai Ma'ruf Amin, saat ini telah lahir banyak aplikasi digital dan pertumbuhan *start up* yang memberikan peluang besar dalam merealisasikan potensi ekonomi syariah secara nasional maupun global. Oleh karena itu, keduanya perlu diberdayakan agar ekonomi dan keuangan syariah memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Misal, Indonesia yang sebelumnya telah menerbitkan sukuk



ritel dan *green* sukuk pada tahun 2018. Keduanya, sukuk ritel dan *green* sukuk, dapat diperdagangkan dengan mudah secara daring. Kondisi ini, dalam kaca mata Kiai Ma'ruf Amin, dapat menarik generasi muda untuk turut berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah. Selain itu, saham syariah juga dapat dibeli melalui *Sharia Online Trading System (SOTS)*. Pemanfaatan *fintech* dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah digital juga menjadi ciri perkembangan pesat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Di penghujung tahun 2020, KNEKS dan Bank Indonesia menyelenggarakan sayembara *brand* ekonomi syariah. Sayembara tersebut dalam rangka menggali ide dan meningkatkan literasi ekonomi syariah di masyarakat. Sayembara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh satu logo yang akan merepresentasikan ekonomi syariah Indonesia dengan memenuhi karakter 8K, yakni kesejahteraan, kesetaraan, kepedulian, keberpihakan, kenyamanan, kebanggaan, karakter, dan kolaborasi. Tujuan dan *brand* ekonomi syariah adalah untuk mempersatukan langkah seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Mengangkat *tagline* "Kebaikan untuk Semua", *brand* ekonomi syariah menjadi logo atau simbol milik negara yang dapat digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Selain itu, *brand* ini dapat memperkuat *positioning* ekonomi syariah Indonesia di dunia. Berkaitan dengan *brand* ekonomi syariah, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa *brand* ekonomi syariah dapat digunakan untuk kepentingan literasi, edukasi dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah secara masif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah.

Ada beberapa isu menarik yang berkaitan dengan KNEKS dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin pada tahun 2021. Di antaranya terkait isu riset yang selaras dengan industri ekonomi syariah. Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin mengatakan KNEKS perlu mengembangkan penelitian yang selaras dengan kebutuhan industri ekonomi dan keuangan syariah. "*Inisiatif strategis yang dilakukan oleh KNEKS di antaranya ialah penyelarasan riset ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan industri dan pemangku kepentingan lainnya*", kata Wapres dalam sambutannya di acara *1<sup>st</sup> Islamic Economic Education Summit*, di Jakarta, Kamis (20/10/2021).



Berkaitan dengan riset ekonomi dan keuangan syariah, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, meminta adanya kolaborasi riset antara KNEKS dengan berbagai pihak. *"Dalam rangka merealisasikan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024, saya nantikan kolaborasi BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional), Pemerintah Daerah, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah), pelaku usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan produk halal di Indonesia,"* kata Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin saat meresmikan Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) BRIN di Kabupaten Gunung Kidul pada Jum'at (22/4/2022).

Pada Selasa, 23/8/2022, Wakil Presiden meresmikan *Topping of Menara Syariah*, di Pantai Indah Kapuk PIK 2 di Kabupaten Tangerang. Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin mengharapkan Menara Syariah akan menjadi pusat keuangan syariah terbesar di Asia Tenggara dan menjadi *Islamic Finance Hub* yang memainkan peran vital dalam industri keuangan syariah di dunia. *"Menara ini dibangun berlandaskan niat yang mulia, yaitu untuk menghadirkan pusat keuangan syariah yang pertama di Indonesia, yang nantinya kita harapkan pula menjadi yang terbesar di Kawasan Asia Tenggara",* ungkap Wapres.

Menara Syariah, bagi Wapres, adalah simbol dari harapan dan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pemain utama keuangan syariah di dunia. Lebih lanjut, Wapres mengharapkan para pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah, seperti KNEKS, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat memanfaatkan keberadaan Menara Syariah ini secara optimal, khususnya sebagai pusat berlangsungnya koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Menara Syariah merupakan hasil kerja sama investor dalam negeri dan luar negeri.

Dalam kesempatan yang berbeda, di tahun 2023, Wakil Presiden Kiai Maruf Amin mengingatkan perlunya penguatan ekosistem syariah berbasis digital. Dalam pandangan Wapres, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-3 pada *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) dan posisi ke-4 pada *The State of Global Islamic Economic Report 2022* secara keseluruhan industri unggulan halal. Untuk meningkatkan posisi tersebut, diperlukan penguatan ekosistem syariah, salah satunya melalui instrumen syariah berupa digitalisasi keuangan, seperti



*financial technology (fintech)*. Pada kesempatan tersebut, menurut Wapres, *fintech* bisa mendorong percepatan inklusi keuangan syariah, sekaligus perluasan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk untuk pembiayaan industri halal.

Berkaitan dengan penguatan ekosistem syariah berbasis digital, Wapres perlu menekankan empat *point* penting, yakni: *pertama*, perlu peningkatan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengintegrasian layanan *fintech* syariah, seperti uang elektronik syariah, dan pembiayaan syariah dengan program pengembangan UMKM industri halal; *kedua*, perlu layanan *fintech* syariah untuk mengembangkan inovasi yang mengakomodasi kebutuhan UMKM industri halal dengan memperhatikan aspek risiko, keamanan dan keberlanjutan; *ketiga*, *fintech* agar dapat memasifkan peningkatan literasi dan edukasi kepada pelaku UMKM industri halal dan masyarakat mengenai manfaat dan layanan *fintech* syariah; *keempat*, *fintech* syariah dapat diperluas hingga menjangkau pasar global dan memberikan ragam pelayanan yang aman, efisien serta murah bagi UMKM.

**Kedua**, keberhasilan dalam melakukan merger bank syariah plat merah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI merupakan bank syariah yang terlahir dari hasil merger tiga bank syariah plat merah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN, yakni Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Kebijakan merger ketiga bank syariah tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengakselerasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Market share* industri perbankan syariah pernah terjebak pada keinginan pencapaian di angka 5% dari total *market* industri perbankan nasional. Namun usaha ke arah pencapaian *market share* 5% terasa berat. Pergerakan angkanya kecil tidak signifikan. Bisa jadi hal ini disebabkan larinya bank syariah kalah cepat dibanding bank konvensional. Akhirnya, *market share* bank syariah terjebak pada angka 5%, sulit naik.

Dalam menghadapi kondisi di atas, diperlukan langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Menyebut Pemerintah, pastinya tidak bisa menafikan posisi Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden dan sekaligus sebagai Ketua Harian KNEKS. Merger bank syariah merupakan bagian upaya dari Pemerintah untuk memperbesar skala produksi dan meningkatkan efisiensi bank syariah. Upaya tersebut



telah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

**Peresmian *Landmark* BSI Aceh.**

Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin menyatakan bahwa bank syariah hasil merger akan memberikan dorongan bagi Indonesia menjadi pemain keuangan syariah yang diperhitungkan pada tingkat lokal maupun global. Bank syariah hasil merger diharapkan dapat tumbuh lebih efisien, mampu bersaing dan memiliki ekspansi usaha yang lebih luas. *"Dengan bergabungnya ketiga bank syariah tersebut, maka bank syariah yang baru diharapkan dapat bersaing secara kompetitif di tingkat global"*, tutur Wakil Presiden, Selasa (27/10/2020). Kiai Ma'ruf Amin menambahkan merger ketiga bank syariah tersebut, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah, dapat mulai beroperasi pada Februari 2021.



Masih di awal tahun 2021, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) agar segera menyelesaikan proses integrasi atau merger yang berasal dari tiga bank himbara syariah. Wapres mengatakan terwujudnya merger ini merupakan energi baru bagi pengembangan ekonomi syariah. *"Saya harapkan segera menuntaskan integrasi operasionalnya. Berbagai SOP harus segera diselesaikan baik dalam proses bisnis maupun dalam manajemen risiko"*, ungkap Wapres saat Rapat Kerja Nasional BSI pada Kamis (25/2/2021). Tak hanya soal operasional saja yang diingatkan oleh Wapres, lebih dari itu Wapres berharap ada peleburan budaya kerja baru di BSI. Wapres menandaskan pegawai Bank Syariah Indonesia, bukan lagi pegawai Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah ataupun BRI Syariah.

Di sisi yang lain, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin berkeinginan agar BSI tidak hanya bermain di tataran lokal dalam negeri. Namun, lebih dari itu Wapres berharap agar BSI dapat berperan di kancah global. Wapres ingin BSI dapat menjadi kiblat industri keuangan syariah dan ekosistem halal dunia. Wapres mengibaratkan saat ini BSI harus berani untuk berenang di samudra, bukan hanya bermain di kolam saja. *"Harapannya agar BSI tidak hanya berperan di kancah nasional tetapi juga di kancah global. Ibaratnya, bank syariah tidak hanya bermain di kolam kecil saja, yang lingkupnya kecil, tetapi dapat berenang di samudera yang luas,"* tutur Wapres saat kunjungan kerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), dan melakukan peninjauan ke kantor perwakilan BSI di *Gate District 3, DIFC, Sheikh Zayed Road*, 4 November 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres memberikan dukungan pada BSI agar bisa tumbuh lebih cepat dan menjadi *Top Ten Global Islamic Bank*. Menurut Wapres, hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan UEA dapat menjadi *wasilah* bagi BSI untuk terus mengembangkan bisnis mereka khususnya di area Timur Tengah dan Afrika Utara. Apalagi saat ini Indonesia dan UEA telah memiliki perjanjian kerja sama Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (*Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE-CEPA). IUAE-CEPA merupakan perjanjian yang dapat menjadi pintu masuk Indonesia ke UEA yang merupakan *hub* untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara tujuan non tradisional seperti di kawasan Teluk, Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan.



Perhatian Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin terhadap perkembangan BSI tidak diragukan lagi. Hampir setiap kejadian yang berhubungan dengan BSI tidak luput dari perhatian Wapres. Misal, saat BSI mendapat serangan siber di tahun 2023. Dalam pandangan Wapres, serangan siber ke BSI merupakan pengalaman buruk yang tidak boleh terulang lagi. Wapres meminta BSI agar terus membenahi sistem teknologinya dan secepatnya memulihkan pelayanan perbankan. *"Saya minta BSI membenahi sistem teknologinya agar tidak terjadi lagi, dan sekarang juga cepat untuk mengembalikan, sehingga tidak mengganggu [layanan] dan merusak kepercayaan [nasabah]"*, ujar Wapres saat dikonfirmasi oleh wartawan usai meresmikan Kampung Bahari Nusantara TNI AL Tahun 2022, secara serentak yang dilakukan di 68 Satuan Komando Kewilayahan, di Kepulauan Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin (15/5/2023).

Dalam kondisi yang lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah melontarkan ungkapan yang cukup menohok, walau ungkapan tersebut dikemas dalam sebuah *guyonan*. Kata Wapres banyak 'setan' di bank syariah sehingga bikin sulit tumbuh. *"Di bank-bank syariah banyak 'setannya' ini. Makanya pangsa pasarnya masih 10%, belum naik-naik. Karena, setannya itu membuat ragu [nasabah baru]. Ah, sama saja bank syariah dengan bank konvensional, enggak ada bedanya. Jadinya mereka ragu,"* ungkap Wapres saat memberikan sambutan di agenda Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), di Gedung Kantor Pusat BSI, Jakarta, Senin (13/5/2024).

*Guyonan* Kyai Ma'ruf Amin di tengah pelaku industri perbankan syariah di Indonesia bukan tanpa sebab. Pasalnya, meskipun aset keuangan syariah nasional terus meningkat, termasuk di dalamnya kontribusi perbankan syariah, tetapi pangsa pasar keuangan syariah per Juli 2023 baru sekitar 10,9% atau lebih rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional. Sedangkan Indonesia mempunyai potensi yang besar di sektor perbankan syariah yang belum tergarap secara optimal. Menurut Wapres, sebanyak 87% penduduk Indonesia mayoritas merupakan muslim sehingga cukup potensial untuk mendorong pangsa pasar, pertumbuhan, dan kontribusi perbankan syariah di masa mendatang.

Di penghujung kepemimpinannya, tepatnya di bulan Juni 2024, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin mendapat kehormatan dari BSI untuk membuka secara resmi *BSI International Expo 2024* di Jakarta

*Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (20/6/2024). Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi komitmen BSI untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah terutama di segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai arus baru pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen BSI ini sebagai jawaban bagi segelintir orang yang menganggap BSI hanya berpihak pada pembiayaan korporasi besar saja. Selain itu, Wapres juga meminta pengembangan BSI ke depan harus bisa membidik sektor produktif, mulai ekosistem bisnis umrah dan haji, pendidikan, fesyen, kosmetik hingga makanan dan minuman.*

**Saksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Sulut, Wapres minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berdampak nyata pada masyarakat.**

*“Saya harapkan BSI International Expo ini bisa menjadi agenda tahunan yang konsisten diselenggarakan oleh BSI sehingga ekonomi halal Indonesia semakin dikenal dunia. Saya juga mengapresiasi peran BSI dalam mendukung peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan membawa mereka bisa naik kelas,” tandas Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin.*





**Ketiga**, mendorong berdirinya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). KDEKS merupakan “perpanjangan tangan” KNEKS yang ada di tingkat daerah. Adanya KDEKS adalah pilihan langkah strategis di era Kiai Ma’ruf Amin sebagai orang nomor dua di Indonesia. Pembentukan KDEKS menjadi salah satu dari 13 program prioritas KNEKS di tahun 2022. Tepatnya, saat berlangsungnya Rapat Pleno KNEKS yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021, Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Harian KNEKS, menetapkan 13 program prioritas KNEKS tahun 2022. Salah satu dari 13 program prioritas tersebut, adanya pembentukkan KDEKS di daerah.

KDEKS adalah salah satu infrastruktur pendukung dalam membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. KDEKS menjalankan fungsi sebagai katalisator untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, dalam upaya mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai pusat halal dunia di tahun 2024. Tujuan dibentuknya KDEKS diharapkan dapat menjadi katalisator membangun dan menguatkan sinergi antara para pemangku kepentingan untuk percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah sehingga berdampak secara nasional.

Proses pembentukan KDEKS provinsi tidaklah serentak. Tiap daerah punya dinamika sendiri. Isu ketiadaan regulasi, kecukupan anggaran, pemilihan SDM dan pandangan tertentu terhadap ekonomi syariah mewarnai pembentukan KDEKS.

Pada berbagai kesempatan, Wakil Presiden menyampaikan bahwa pembentukan KDEKS adalah untuk menangkap peluang pasar sektor halal, mengangkat potensi ekonomi lokal, membantu pengusaha ultra kecil, mikro, kecil dan menengah (UMKM), mengupayakan pengentasan kemiskinan dan *stunting* serta memberi perhatian pada komunitas-komunitas seperti pesantren, desa dan perempuan. Dengan pendekatan ini, daerah semakin tergerak untuk membentuk KDEKS.

Secara umum, KDEKS provinsi dipimpin oleh Gubernur. Ini menunjukkan antusiasme daerah dalam mengembangkan ekonomi syariah. Bahkan di Sulawesi Utara, Gubernurnya yang *nota bene* bukan seorang muslim, bersedia memimpin KDEKS-nya. Ini memperlihatkan inklusivitas dari ekonomi syariah. Bentangan peluang untuk menangkap pasar, meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah cukup besar melalui ekonomi syariah.



Sampai Oktober 2024 telah terbentuk 31 KDEKS provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Gorontalo, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, dan Maluku.

Wapres memberi arahan khusus tiap KDEKS sesuai konteks dan tantangan setempat. Berikut diberikan gambaran pengukuhan KDEKS di tiga provinsi dari tiga pulau besar: Kalimantan Selatan (Kalsel, Pulau Borneo), Aceh (Pulau Sumatera), dan Jawa Barat (Jabar, Pulau Jawa).

Ketika meresmikan “Kalsel Halal Fair 2023”, pada 11 April 2023, Wapres juga mengukuhkan KDEKS Kalsel. Pada kesempatan ini, Wapres berharap, literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah meningkat. KDEKS Kalsel diharapkan menggali dan mengembangkan potensi serta mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan syariah di Kalsel, melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.

Kehadiran KDEKS Kalsel diharapkan dapat mengakselerasi beragam capaian dalam keempat bidang ekonomi dan keuangan syariah: industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah.

Dalam pengembangan industri produk halal, Kiai Ma’ruf minta, percepatan sertifikasi halal diprioritaskan. Baik sertifikasi halal rumah potong hewan, maupun percepatan sertifikasi halal UMKM. Diperoleh laporan bahwa dari 23 ribuan produk makanan-minuman yang tercatat pada Dinas Perindustrian Kalsel, baru sekitar 2 ribu produk yang bersertifikat halal. Sertifikat halal ini menjadi kewajiban sejak Oktober 2024. *Gap* produk yang belum tersertifikasi halal agar menjadi perhatian. KDEKS Kalsel juga diminta mendorong perluasan dan penguatan berbagai aspek lain terkait industri produk halal, seperti industri kesehatan syariah, sentra Industri Kecil dan Menengah Halal, dan pariwisata ramah muslim.

Di bidang keuangan syariah, Bank Indonesia menunjukkan, penyaluran kredit perbankan syariah tahun 2022 mencapai Rp6,44 triliun. Tumbuh 21,11% dibanding tahun sebelumnya. Kiai Ma’ruf



minta KDEKS Kalsel terus memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Pembiayaan pembangunan juga agar memanfaatkan penerbitan Sukuk Daerah dan pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah.

Terkait dana sosial syariah, KDEKS Kalsel diminta mengoptimalkan pemanfaatan potensi zakat dan wakaf yang dihimpun dari masyarakat. Data Bank Indonesia mencatat, tahun 2022 penerimaan zakat mencapai Rp8,3 triliun, infak mencapai Rp8,4 triliun, dan penyalurannya sebesar Rp14,3 triliun.

KDEKS Kalsel diarahkan mengawal pengelolaan zakat untuk membantu program-program sosial. Seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil. Dilaporkan, hingga Juli 2022, nilai aset wakaf di Kalsel mencapai Rp79,6 triliun. Sebagian besar berupa tanah.

Ke depan, KDEKS Kalsel juga harus terus mendorong program wakaf uang dan wakaf produktif. Selain itu, dapat memperkuat lembaga keuangan mikro syariah melalui pengembangan digitalisasi Koperasi Simpan

**Peresmian dan penanaman perdana Kawasan Pangan Nusantara (KPN).**



Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) berbasis masjid, pesantren, dan komunitas lainnya.

Terkait bisnis dan kewirausahaan syariah, Kiai Ma'ruf mengapresiasi Program *One Pesantren One Product* (OPOP). Melalui OPOP, semangat dan kapasitas inovasi para santri di pondok pesantren diharapkan kian meningkat dan memberikan hasil nyata, sehingga tercipta santri-santri berdaya.

Program lain yang perlu didorong antara lain: Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) di kantin-kantin, area wisata, maupun pusat makanan di Kalsel; pembentukan Halal Export Center sebagai tempat pendampingan UKM Eksportir Produk Halal; serta Rumah Produksi Bersama guna membantu pengelola kawasan atau sentra industri halal.

Selain empat bidang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, KDEKS Kalsel diminta dapat berkontribusi pada penciptaan ekosistem dan infrastruktur syariah yang solid. KDEKS Kalsel dapat mendorong diversifikasi kurikulum ekonomi syariah di sekolah, utamanya sekolah menengah umum dan kejuruan. Diharapkan, literasi ekonomi dan keuangan syariah dapat tertanam dalam wawasan generasi muda sedini mungkin.

Kegiatan lain dalam rangka peningkatan literasi juga membutuhkan peran KDEKS, seperti kampanye merek ekonomi syariah, penyusunan pedoman bagi penceramah, ustadz, dan kiai untuk mengenalkan ekonomi dan keuangan syariah melalui ceramah.

Untuk wilayah Sumatera, penguatan KDEKS Aceh dilakukan Wapres pada 7 September 2023. KDEKS Aceh ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur tertanggal 17 Juli 2023. Wapres yakin, KDEKS Aceh akan memacu laju pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Serambi Mekkah. Tidak terbatas pada penguatan keuangan syariah, tetapi juga sektor industri produk halal, dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan, hingga peningkatan edukasi, literasi sekaligus inklusi ekonomi syariah.

Beberapa pesan disampaikan Kiai Ma'ruf pada pengurus KDEKS Aceh. *Pertama*, agar menyusun program dan kebijakan secara holistik pada semua sektor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Layaknya arsitek, KDEKS mesti mampu merancang bangunan program dan kebijakan yang kokoh dan bagus, dengan menggandeng partisipasi aktif semua pihak dalam mengoptimalkan kinerja sektor-



sektor unggulan. Ekonomi syariah agar dijadikan jawaban atas berbagai permasalahan riil, termasuk kemiskinan, tengkes atau *stunting*, dan pemberdayaan UMKM.

*Kedua*, KDEKS Aceh agar mendorong investasi dan kolaborasi yang diwarnai kekhasan Aceh. Dimana terdapat petani kopi Aceh yang diharapkan konsisten meningkatkan kualitas dan mengubah cara pandang produksi agar berorientasi pada ekspor. Data realisasi ekspor kopi Aceh tahun 2022 tercatat sebesar Rp701 miliar dengan volume lebih 7 ribu ton. Komoditas ekspor di Aceh perlu digali dan dipadukan dengan hilirisasi, agar makin banyak produk halal khas Aceh yang mendunia.

Secara khusus, Wapres minta segera dilakukan terobosan sertifikasi halal seiring meningkatnya minat masyarakat global untuk mengonsumsi produk halal. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan investasi dan konsistensi. Seperti dukungan sarana dan infrastruktur wilayah, pengembangan kapasitas UMKM, dan adopsi teknologi digital. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan perlu terus diperluas, termasuk kemitraan usaha besar dan UMKM.

*Ketiga*, KDEKS Aceh agar membudayakan inovasi dan kreativitas yang melipatgandakan nilai tambah dan kemanfaatan bagi umat. Pengembangan ekonomi syariah ditantang untuk dibarengi dengan peningkatan kualitas dan daya saing secara konkret. Untuk itu, inovasi sektor kuliner halal, gaya busana muslim, dan destinasi pariwisata ramah muslim sangat penting dan perlu segera dilakukan agar memberi nilai tambah berlipat ganda.

Aceh dikenal dengan kerajinan tradisional yang menawan. Sentuhan motif khas Aceh pada busana muslim, misalnya, penting terus diperkenalkan secara kreatif dan inovatif di ajang fesyen lokal maupun mancanegara. Di luar itu, Aceh dinobatkan sebagai Destinasi Wisata Budaya Halal terbaik di dunia pada 2019.

Untuk Pulau Jawa, pengukuhan KDEKS provinsi paling akhir adalah Jawa Barat, pada 23 April 2024. Kiai Ma'ruf Amin mengawali sambutan pengukuhan dengan menyatakan berbagai keunggulan Jabar menjadi salah satu penopang penting tumbuhnya ekonomi nasional. Jumlah populasi yang besar di Jabar menghadirkan potensi pasar yang besar pula. Wapres menyambut baik rantai nilai produksi terintegrasi yang telah terbangun di Jabar.



Di tingkat nasional, Jawa Barat salah satu penyumbang terbesar PDB nasional, pengeksport komoditas terbesar, serta realisasi investasi tertinggi. Kiai Ma'ruf berharap, capaian ini mampu dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kiai Ma'ruf mencermati, Jawa Barat kini tengah menggarap berbagai proyek pengembangan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang selaras dengan prinsip kemaslahatan syariah.

Pemprov Jawa Barat terus memperkuat ekosistem infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah, termasuk melalui penyusunan peraturan dan rencana pembangunan daerah sektor ekonomi syariah. Ada regulasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal serta tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Terobosan itu telah membuahkan hasil. Di tahun 2023, Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan pada lima kategori Adinata Syariah. Walaupun saat itu KDEKS belum dikukuhkan.

Ke depan, Kiai Ma'ruf minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap selaras dan sinergis dengan prioritas pembangunan, kekhasan dan keunggulan daerah, serta kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya. KDEKS Jabar diharapkan semakin mendorong dan mengakselerasi empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar manfaatnya semakin dirasakan.

Kiai Ma'ruf berpesan agar KDEKS Jabar mengoptimalkan pengembangan sektor industri halal melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor unggulan daerah. Mendorong pemanfaatan Kawasan Industri Halal Jabar melalui insentif, baik fiskal maupun non fiskal, guna meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan produk halal.

• • • • •

***“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,” tandas Wapres Kiai Ma'ruf Amin.***



Akselerasi sertifikasi halal, khususnya produk UMKM dan di sektor hulu, seperti rumah potong hewan unggas dan ruminansia, guna mencapai target kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2024. Perlu pula dukungan anggaran untuk penambahan kuota program sertifikasi halal gratis di Jabar. Di samping itu, terus kembangkan sektor pariwisata ramah muslim sebagai destinasi tujuan wisata unggulan daerah.

Selain itu, Kiai Ma'ruh juga menyampaikan perlunya memperluas inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembangunan daerah melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital. Keuangan syariah telah turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah.

Sejak 2013 hingga 2023, di Jawa Barat terdapat 315 proyek dengan nilai sekitar Rp17.8 triliun yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Untuk itu, perlu dukungan keberhasilan implementasi proyek-proyek ini.

Implementasi kebijakan dan strategi yang *keempat*, adalah penguatan industri halal nasional. Kebijakan Pemerintah yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan penguatan industri halal nasional. Masalah produk halal bukan sekedar lagi menjadi tuntutan menjalankan kewajiban agama. Namun, lebih dari itu isu produk halal sudah selangkah lebih maju menjadi *lifestyle* bagi kalangan umat Islam. Bahkan tidak hanya umat Islam saja yang menyadari pentingnya mengonsumsi produk halal. Permintaan produk halal di kalangan orang non muslim mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan produk halal di pasar non muslim dikarenakan konsumen non muslim menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka sebagai bagian dari tren makan sehat dan aman dikonsumsi dibandingkan dengan produk non halal.

Pemerintah mengambil langkah strategis dalam penguatan industri halal nasional melalui penajaman perencanaan, implementasi rencana dan kerjasama dengan industri global. Pada aspek perencanaan, Pemerintah melalui menyusun Masterplan Industri Produk Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029. MPIHI diharapkan akan menyelaraskan pengembangan industri syariah dengan industri nasional sebagaimana direncanakan pada RPJMN dan RPJPN, sekaligus menjadi acuan untuk penyusunan RKP yang berkaitan dengan industri syariah.

MPIHI 2023-2029 mengusung *tagline* "Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan", sesuai dengan perkembangan kondisi dunia dan arah transformasi ekonomi Indonesia, sebagai bagian dari par-



tisipasi global untuk masa depan. Pelaksanaan MPIHI digambarkan melalui *road map* pengembangan industri halal dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. *Road map* pengembangan industri halal yang disusun bertujuan sebagai panduan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam mencapai visi “Menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia, dengan 4 strategi utama, yakni: (1) peningkatan produktivitas dan daya saing; (2) penerapan serta penguatan kebijakandan regulasi; (3) penguatan keuangan dan infrastruktur; dan (4) penguatan *halal brand and awareness*.”

Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin, pada rapat penguatan penguatan industri halal di Indonesia, 25 November 2021 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan *stakeholders* lain, Wapres menegaskan kembali arahan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024. Dengan demikian, pengembangan ekosistem halal, yang salah satunya melalui pembangunan kawasan industri halal (KIH), harus terus diakselerasi. *“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,”* tandas Wapres Kiai Ma’ruf Amin. Setelah mengevaluasi implementasi KIH, Wakil Presiden menggagas perlunya peningkatan KIH menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal.

Sosok Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin, senantiasa melakukan monitoring atas kebijakan yang telah diambil. Di antara bentuk monitoring yang dilakukan oleh Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin adalah dengan melakukan rapat pleno KNEKS. Pada Selasa (20/12/2022) Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin menggelar Rapat Pleno III KNEKS di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Dalam Rapat Pleno ini, Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin, selaku Ketua Harian KNEKS, mengingatkan kembali bahwa target Indonesia menjadi Produsen Halal terkemuka di dunia. Lebih lanjut Wapres menyampaikan, keberhasilan dalam menjadikan Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia akan memberi banyak dampak positif bagi negara dan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. *“Perwujudan visi Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia dapat mendorong industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sebagai arus baru ekonomi Indonesia di tingkat domestik maupun global,”* ungkap Wapres.

**Kelima**, memberikan kontribusi dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Adanya UU P2SK merupakan upaya negara untuk mewujudkan pembangunan nasional yang didukung



dengan perekonomian yang tangguh. Pendekatan yang digunakan dalam UU P2SK menggunakan metode omnibus untuk menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif.

Salah satu peran Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin untuk pengayaan materi UU P2SK adalah dengan gagasan penguatan kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dalam UU P2SK, posisi DPS sebagai pihak yang terafiliasi sebagaimana komisaris ataupun direksi. Maka dari itu, pada kesempatan di acara Ijtima Sanawi DPS tahun 2023, Wapres berharap agar DPS untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas, mendorong peningkatan pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas industri

**Bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.**



keuangan syariah, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya membesarkan industri keuangan syariah. Kiai Ma'ruf Amin juga mendorong penguatan peran Majelis Ulama Indonesia untuk mengawal aspek kesyariahan pada institusi keuangan syariah.

**Keenam**, pengaturan Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank Konvensional. Saat ini, pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia melalui beberapa model. Paling tidak ada tiga model pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. *Pertama*, melalui Bank Umum Syariah (BUS); *Kedua*, melalui Unit Usaha Syariah yang “menempel” di Bank Konvensional; dan *ketiga*, melalui BPRS. Awalnya BPRS merupakan kepanjangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, namun istilah tersebut sudah direvisi dalam UU P2SK menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Adanya UUS di bank konvensional merupakan salah satu strategi untuk melakukan akselerasi pengembangan industri perbankan syariah. Fenomena UUS di bank konvensional, bisa diibaratkan seperti sebuah rumah yang mempunyai 2 kamar. Kamar pertama memberikan layanan transaksi secara konvensional. Sedangkan kamar kedua memberikan layanan transaksi secara syariah. Dalam UU Perbankan Syariah, UU No. 21 tahun 2008, pengaturan mengenai UUS di bank konvensional cukup jelas. Dalam regulasi tersebut, ada mandat untuk melakukan *spin off* bagi UUS di bank konvensional. Parameter *spin off*-nya ada dua macam, yakni dari sisi aset dan jangka waktu.

Berdasarkan Pasal 68 UU Perbankan Syariah dijelaskan bahwa dalam hal bank umum konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka bank umum konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Dari sisi jangka waktu, berarti pada bulan Juni 2023 semua UUS di bank konvensional harus sudah melakukan pemisahan dari bank induknya menjadi entitas perusahaan baru sebagai Bank Umum Syariah.

Namun, pelaksanaan *mandatory* tersebut tidaklah berjalan dengan mudah. Ada dinamika tantangan yang harus disikapi secara bijak. Termasuk fakta bahwa kebanyakan aset UUS masih relatif kecil, sehingga akan tidak efisien operasionalnya jika dipaksakan untuk melakukan *spin off* dari induknya. Selain itu, dari sisi yang lain kadang fenomena UUS di bank konvensional perlu komitmen yang kuat dari



pemegang saham induknya. Jangan sampai adanya UUS seperti 'pohon bonsai'. Berkembang namun terhambat, sehingga terlihat masih terus tampak kecil dan 'menggemaskan'. Bukan tidak mungkin ada desain untuk sekedar memanfaatkan peluang syariah dari pelaku bisnis yang menguasai perusahaan induknya.

Berkenaan dengan itu, muncullah jalan tengah melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. Pengaturan *spin off* UUS dalam POJK tersebut diatur dalam Pasal 59. Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit lima puluh triliun rupiah wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat dan berkelanjutan.

**Ketujuh**, diplomasi ekonomi syariah di kancah global. Kebijakan berikutnya terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah kebijakan diplomasi ekonomi syariah di kancah global. Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin yang berposisi sebagai Ketua Harian KNEKS mempunyai maksud khusus memperkenalkan ekonomi dan keuangan syariah di kancah global. Sudah saatnya dunia melihat, mengakui dan mengapresiasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dalam kancah dunia global, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sudah mendapat pengakuan dunia. Di antaranya, pada tahun 2020 Indonesia menerima penghargaan *Global Islamic Finance Awards (GIFA) Advocacy Award 2020* yang diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Ma'ruf Amin, kapasitasnya sebagai Ketua Harian KNEKS. Acara GIFA 2020 diselenggarakan di Islamabad, Pakistan. Selaku Ketua Harian KNEKS, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang disampaikan. Hal ini merupakan sebuah bentuk kepercayaan dan tantangan GIFA kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih berperan aktif terhadap kemajuan ekonomi dan keuangan syariah, serta perekonomian global.

*"Atas nama KNEKS dan Pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan GIFA Awards Committee atas penghargaan ini. Kami menerima ini sebagai sebuah tantangan untuk terus bekerja keras mewujudkan visi Indonesia menjadi global hub ekonomi syariah dan*



*industri halal dunia, serta memberikan dampak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber ekonomi baru pasca pandemi Covid 19 yang melanda di seluruh dunia”,* ungkap Wapres.

Penghargaan GIFA tidak hanya diterima di tahun 2020. Namun, di tahun 2021, Indonesia melalui KNEKS kembali lagi menerima penghargaan prestisius GIFA 2021 sebagai *Global Islamic Finance Leadership Award 2021* untuk kategori institusi. Selain itu, Wakil Presiden RI Kiai Ma’ruf Amin juga memperoleh penghargaan *11<sup>th</sup> GIFA Laureates Award 2021* selaku kepala negara yang mempromosikan perbankan dan keuangan syariah di negara Indonesia. Dalam pidatonya, Wapres menjelaskan bahwa ekonomi syariah berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia guna menyongsong pertumbuhan ekonomi nasional inklusif yang berdampak dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat pertahanan ekonomi nasional.

Peran Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di kancah global bisa dapat terekam melalui beberapa *event* internasional yang dihadapkannya.

Salah satunya saat Wapres menghadiri *Global Muslim Business Forum*, di Kota Kuching Serawak “Bumi Kenyalang”, Malaysia, Selasa (28/11/2023). Pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan pesan kehadiran ekonomi syariah dianggap sebagai penyeimbang dan solusi mengatasi ketimpangan ekonomi. *“Prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, inklusi, universal, kemakmuran, dan menjaga keberlangsungan lingkungan menjadi penyeimbang dan solusi yang harus kita suarakan di tengah masyarakat global,”* ujar orang nomor dua di Indonesia ini yang sekaligus juga sebagai Ketua Harian KNEKS.

Lebih lanjut, Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah adalah peluang pertumbuhan ekonomi baru, karena jumlah muslim global dan belanja masyarakat muslim terus meningkat. Selain itu, lanjut Wapres, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah butuh dukungan kuat dari ulama dan umara. *“Saya mengajak seluruh pemimpin yang hadir dalam forum ini untuk memperluas dan memperkuat kerja sama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,”* seru Wapres. Oleh karena itu, imbuh Wapres, kerja sama dan kolaborasi harus merangkul banyak negara dan mengedepankan prinsip kemitraan yang setara, inklusif dan saling menguntungkan, dengan perencanaan dan implementasi



yang efektif dan efisien. Terakhir dalam forum ini, Wapres mengajak negara-negara muslim untuk menyatukan visi dan misi terkait dengan arah pengembangan industri halal global ke depan.

Dalam kesempatan yang lain, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin menyatakan bahwa peran Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global telah mendapat berbagai pengakuan. Salah satunya, Indonesia dinilai terus konsisten menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bauran strategi pembangunan nasional. *"Bauran strategi ini bermakna penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sebab, tantangan pembangunan bukan semata soal meraih pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, namun memastikan pertumbuhan yang diraih benar-benar mampu menafkahi masyarakat sampai lapisan masyarakat paling bawah,"* tutur Wapres saat membuka Banten Halal Festival Ramadhan: Dari Banten Untuk Dunia, yang digelar di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa (02/04/2024). Oleh sebab itu, sambung Wapres, Pemerintah bersama seluruh elemen bangsa mempunyai tugas besar untuk melanjutkan pembangunan kesejahteraan yang berdampak nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pembangunan dunia, terutama melalui sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Rekam jejak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin dalam melakukan diplomasi ekonomi dan keuangan syariah di kancah global, diantaranya kunjungannya ke Negara Tirai Bambu, Jepang, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, Slovakia, Uzbekistan, Yunani dan Malaysia. Tujuan utama Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin melakukan kunjungan ke negara tersebut dalam rangka melakukan diplomasi halal. Pada kesempatan tersebut Wakil Presiden berdiskusi dengan pemimpin pemerintahan dan pelaku bisnis. Kiai Ma'ruf Amin mengajak mitra global untuk berinvestasi di Indonesia mengembangkan industri halal, membuka peluang ekspor produk halal Indonesia dan kerjasama sertifikasi halal.

Pada kunjungan ke Tiongkok, Wakil Presiden bertatap muka dengan PM Li Qiang di Nanning, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Fujian, Zhou Zuyi di kota Fuzhou dan pebisnis papan atas Tiongkok. Para pemangku kepentingan di Tiongkok sangat berhasrat agar intensitas interaksi ekonomi terus dikelola, koordinasi, dirawat dan dieksekusi. Bahkan PM Li Qiang, siap bergandengan tangan dengan



Wakil Presiden bertatap muka dengan PM Li Qiang di Nanning.

Indonesia di segala bidang, termasuk bisnis halal, seraya menyatakan solidaritas yang wajib digalang dengan memilih istilah *'berat sama dipikul, ringan sama dijinjing'*. Li Qiang bahkan mengagumi Wapres sebagai pemimpin agama yang mendorong ekonomi halal selama puluhan tahun. Wapres dengan lincah menanggapi ajakan PM Li dengan memaklumkan kesempatan kolaborasi yang lebih lebar antara negara, khususnya di bidang ekonomi, dan relasi antar-warga (*people to people contact*).

Wapres juga bercakap dalam frekuensi yang sama saat bersua dengan 10 pengusaha papan atas yang bergerak di bidang makanan dan kelautan. Mereka amat tertarik dan butuh pengembangan usaha halal, yang potensinya luar biasa besar, baik di Indonesia maupun Tiongkok.

Setelah dari Tiongkok, Wakil Presiden melanjutkan muhibah perjalanan diplomasi halal ke negara Slovakia. Tepatnya, Minggu (26/11/2023), Wakil Presiden menghadiri pertemuan dengan *Islamic Foundation* dan Pebisnis Halal di *Grand Hotel River Park, Bratislava, Slovakia*. Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa selain memproduksi dan memasarkan produk halal, Slovakia juga mempunyai potensi besar untuk menjadi *hub* industri halal di kawasan Eropa Tengah dan negara sekitar. Di sisi yang lain, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin juga mengajak para pelaku bisnis halal di Slovakia untuk datang dan berinvestasi produk halal ke Indonesia. *"Saya juga mengundang pebisnis Slovakia untuk berkunjung ke Indonesia, terutama pada Halal Expo 2024, guna menjajaki peluang perdagangan dan investasi produk halal"*, ujar Wapres. Harapan Wapres, pertemuan ini menjadi awal kerjasama Indonesia dan Slovakia di sektor industri halal yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

**Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin bertemu dengan Deputi Perdana Menteri (PM) Republik Slovakia, Denisa Sakova.**





**Wakil Presiden  
Kiai Ma'ruf Amin  
berkunjung ke  
Wellington  
Selandia Baru.**

Pada kunjungan ke Slovakia, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin bertemu dengan Deputy Perdana Menteri (PM) Republik Slovakia, Denisa Sakova. Dalam pertemuan ini, Wapres berharap Slovakia bisa menjadi pintu masuk produk halal Indonesia di Uni Eropa. Kiai Ma'ruf Amin menekankan pentingnya kemitraan strategis kedua negara, termasuk melalui peningkatan kerja sama ekonomi, pertahanan, iptek, hingga tenaga kerja.

Selain ke Tiongkok dan Slovakia, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin juga melakukan diplomasi halal ke Selandia Baru. Menurut Juru Bicara Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, Masduki Baidhowi, ada konsistensi Wakil Presiden dalam menjadikan Indonesia sebagai bagian dari halal dunia. "Ada konsistensi kunjungan Wapres ke beberapa negara, sebelumnya Eropa. Sekarang New Zealand. Konsistensi itu adalah cita-cita agar bagaimana Indonesia menjadi bagian penting dari halal dunia," ujar Cak Duki, panggilan akrab Masduki Baidhowi,.

Pada kesempatan lawatan ke negara Kiwi ini, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin melakukan penguatan



kerjasama internasional dengan bertemu Perdana Menteri Selandia Baru Rt Hon Christoper Luxon, Wakil Perdana Menteri Rt Hon Winston Peters dan sejumlah tokoh penting lainnya. Wapres juga menghadiri acara forum bisnis dengan para pelaku industri halal. Wapres menyampaikan bahwa dirinya ingin membuka peluang kerja sama yang lebih besar antara pelaku industri halal Selandia Baru dengan mitranya di Indonesia. *“Ekonomi halal saya yakini akan terus berkembang, karena penerapan dan prinsip halal tidak hanya dibatasi oleh kaidah agama, namun juga mencakup standar kesehatan, kebersihan, dan keselamatan yang tinggi”*, ujar Wapres meyakinkan. 🌟

**Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin saat kunjungan ke Dubai Uni Emirat Arab.**



# Penguatan Ekosistem untuk Akselerasi Pertumbuhan

Tetapi Allah juga meminta kita supaya upaya-upaya yang kita lakukan itu berjalan di atas landasan tuntunan-Nya, atau *manhajul imarah*, harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, harus *masyru'ah*. Itulah sebabnya maka kita harus mengembangkan kegiatan ekonomi itu di atas prinsip-prinsip syariah.

(K.H. Ma'ruf Amin)



**KIAI** Wapres memiliki perumpamaan yang mudah diingat dan dipahami tentang ekosistem ekonomi syariah. Kyai Wapres mengibaratkan ekosistem itu seperti rumah. Rumah terdiri dari berbagai unsur yang berbeda yang saling terhubung dan saling menguatkan. Bahkan dalam sebuah rumah, ada bagian yang tidak terlihat, namun merupakan hal yang penting, yakni pondasi.

Rumah ekonomi syariah, terdiri dari empat pilar beserta pondasinya yang biasa disebut sebagai infrastruktur ekonomi syariah. Empat pilar dan satu pondasi ini adalah lingkup ekonomi syariah merujuk Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2020 tentang KNEKS. Empat pilar tersebut adalah industri halal, keuangan syariah, dana sosial syariah dan kegiatan usaha syariah. Sedangkan infrastruktur ekonomi syariah adalah SDM, regulasi, riset, penguasaan teknologi informasi, dan perlindungan konsumen serta *branding*.

Empat pilar tersebut adalah industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah dan kegiatan usaha syariah. Sedangkan infrastruktur eko-



nomi syariah adalah SDM, regulasi, riset, penguasaan teknologi informasi, dan perlindungan konsumen serta *branding*. Rincian ekosistem ekonomi syariah, dapat dilihat pada: *Gambar 1 Infrastruktur Ekosistem Syariah*.

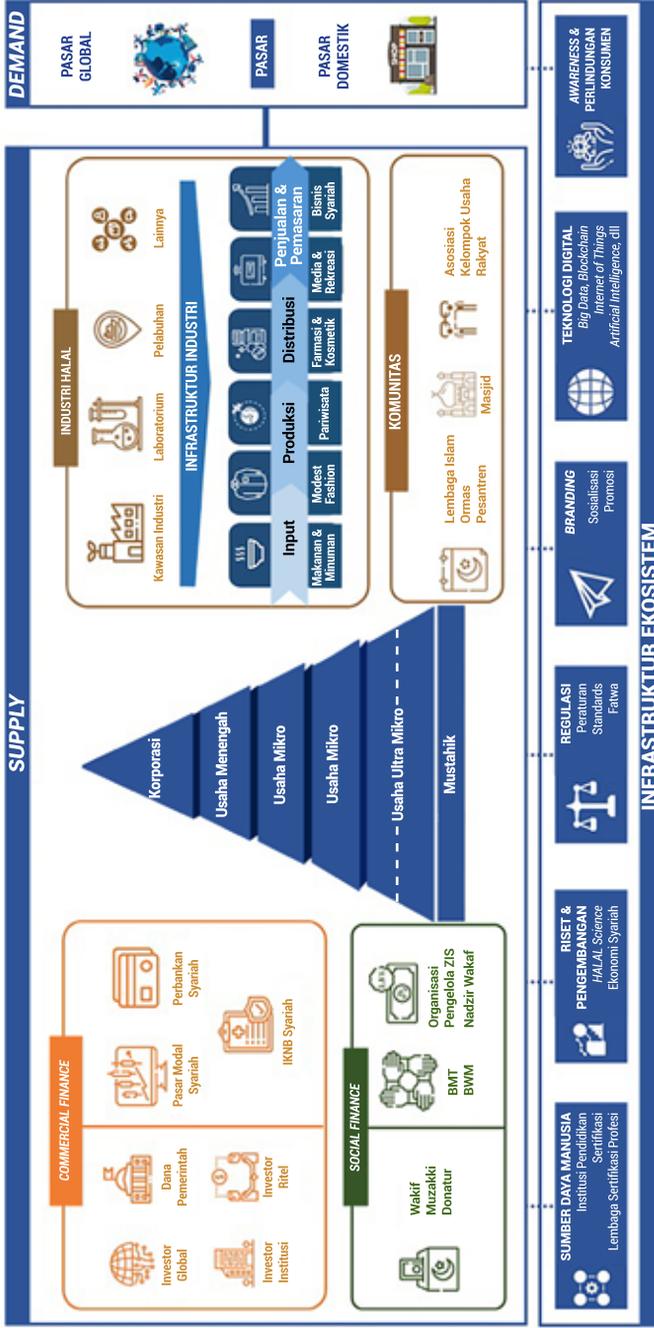
Ekosistem ekonomi syariah terbangun atas dua komponen, yakni komponen *supply* dan *demand*, sebagaimana rumusan dasar ilmu ekonomi yang tidak bisa meninggalkan prinsip penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dari sisi *supply*, diperankan oleh pelaku usaha yang terdiri dari *commercial finance* (seperti perbankan syariah, IKBN Syariah, Pasar Modal Syariah), *social finance* (seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf). Di sisi yang lain, pelaku usaha juga ada industri halal yang infrastrukturnya telah disiapkan mulai dari hulu ke hilir serta didukung oleh komunitas baik dari organisasi keagamaan, asosiasi atau komunitas pondok pesantren. Dari sisi pelaku usaha, sebagai bagian dari pihak yang melakukan penawaran, terdiri dari korporasi, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, usaha ultra mikro, dan ada mustahik. Semuanya ini berjalan dengan adanya dukungan dari *human capital*, riset dan inovasi, peraturan, *branding* produk, dan proses digitalisasi melalui *support IT*.

Sedangkan dari sisi permintaan (*demand*), dalam siklus membangun ekosistem ekonomi syariah, harapannya produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha syariah dapat masuk di pasar global ataupun pasar domestik. Tentunya tetap dalam koridor mengedepankan azas perlindungan konsumen.

Penguatan ekosistem ekonomi syariah adalah kerja besar yang memerlukan peran serta aktif semua pihak. Kiai Wapres pada berbagai kesempatan, terutama melalui rapat pleno KNEKS, selalu mengingatkan pemangku kepentingan untuk kerja bersama, saling terhubung (kolaborasi dan sinergi), fokus dan membuat prioritas. Kebijakan yang diambil harus didasarkan pada data (*policy based evidence*), direncanakan dengan matang dan berkelanjutan. Untuk itu Wakil Presiden mendorong perencanaan terstruktur di tingkat Pusat dan Daerah.

Pilar-pilar ekosistem ekonomi syariah akan banyak dibahas pada bagian-bagian berikutnya. Pada bagian ini, akan dibahas elemen infrastruktur diantaranya regulator, pendidikan dan lembaga non pemerintah pada ekosistem syariah yang mendukung pengembangan ekonomi di Indonesia.

Gambar 1. Infrastruktur Ekosistem Syariah



Regulator terdiri dari kementerian dan lembaga yang berperan menerbitkan aturan main serta mengawasi implementasinya. Kementerian dan lembaga itu diantaranya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Bank Indonesia (BI), melalui Direktorat Ekonomi dan Keuangan Syariah BI pada 6 Juni 2017 telah menerbitkan Cetak Biru (*blue print*) Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada tahun 2024, BI telah menyiapkan 4 program kerja yang diharapkan berdampak positif pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Keempat program tersebut adalah: *pertama*, penguatan industri syariah melalui sektor unggulan. Termasuk di dalamnya sektor produk halal dan fesyen muslim; *kedua*, akselerasi keuangan sosial dan komersial syariah. Akselerasi akan dilakukan dengan pengembangan pasar keuangan syariah, melalui instrumen Sukuk BI dan Sukuk Valuta Asing BI. Selain itu melalui program *blended finance* komersial dan sosial, seperti *cash waqf linked sukuk ritel* (CWLS); *ketiga*, optimalisasi digitalisasi keuangan syariah. Program ini dilakukan dengan cara penguatan *platform* pengecekan produk halal yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Halal (Sihalal). Selain itu, BI juga mendorong digitalisasi keuangan sosial syariah yang terintegrasi melalui *platform* Satu Wakaf Indonesia; *keempat*, peningkatan literasi dan perluasan jangkauan ekonomi syariah, melalui *event* Festival Ekonomi Syariah di beberapa tempat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bagian dari regulator yang juga *men-support* pengembangan ekonomi syariah pada sektor keuangan. Peran OJK dalam hal ini paling tidak melakukan dua hal, yakni *pertama*, menetapkan regulasi bagi pelaku di industri jasa keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, industri keuangan non bank (IKNB) Syariah, dan pasar modal syariah. *Kedua*, OJK juga melakukan fungsi pengawasan (*monitoring*) terhadap kinerja yang dijalankan oleh industri jasa keuangan syariah di Indonesia.

Saat ini, berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia kuartal I tahun 2024 yang dirilis oleh OJK, total aset keuangan syariah Indonesia per Maret 2024 sebesar Rp2.650,61 triliun. Dari sisi *market share* yang dicapainya, keuangan syariah mencatatkan *market share*-nya sebesar 11,04%. Capaian *market share*



keuangan syariah masih kalah jauh jika dibandingkan dengan *market share* pada keuangan konvensional yang ada pada angka 88,96%.

Lembaga Penjamin Simpan (LPS) juga menjadi salah satu regulator yang terkait dengan pengembangan keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam kewenangannya untuk menjamin simpanan nasabah pada bank syariah ataupun menjamin polis pada nasabah asuransi syariah. Ada lima fungsi yang diemban oleh LPS, yakni: *pertama*, menjamin simpanan nasabah; *kedua*, menjamin polis asuransi; *ketiga*, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya; *keempat*, melakukan resolusi bank; *kelima*, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK.

Regulator yang lain adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). Kemenkop UKM juga mempunyai kontribusi bagi pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Keberadaan Kemenkop UKM sebagai regulator dalam rangka melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh koperasi syariah (Kopsyah) khususnya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). KSPPS merupakan bagian dari institusi keuangan mikro syariah (IKMS) yang berbadan hukum koperasi. Keberadaan KSPPS menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah, selain bank syariah ataupun perusahaan pembiayaan syariah lainnya.

Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga merupakan bagian regulator yang berkaitan dengan produk halal. BPJPH menjadi personifikasi kehadiran negara dalam mendukung penjaminan produk halal. BPJPH menerbitkan sertifikat halal atas dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan *stakeholder* berikutnya, sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah, yang juga mempunyai kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan adalah pelaku pasar itu sendiri. Pelaku pasar yang ada dalam ekosistem ekonomi syariah dapat dipetakan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari industri perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah, pasar modal syariah, pelaku di industri halal, bisnis syariah dan pariwisata syariah.

Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam membangun ekosistem ekonomi syariah dibutuhkan peran serta dunia pendidikan. Dunia pendidikan berperan dalam menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM)



syariah yang handal dan mempunyai kompetensi pemahaman ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini, sudah banyak perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta, yang membuka Program Studi (Prodi) yang ada kaitannya dengan ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Di antaranya ada Prodi Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Prodi Akuntansi Syariah, Prodi Perbankan Syariah. Harapannya, *output* dari prodi-prodi ini dapat mengisi kebutuhan di industri bisnis dan jasa keuangan syariah di Indonesia.

Masih bagian dari ekosistem ekonomi syariah adalah lembaga pendukung dan lembaga asosiasi. Dalam hal ini dapat dicatatkan peran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui 2 sayap lembaganya, yakni Komisi Fatwa MUI dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Keduanya, *men-support* fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk halal dan fatwa tentang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Selain MUI, lembaga asosiasi yang juga berperan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah di antaranya dulu ada Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), kemudian saat ini ada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI), dan beberapa jaringan kajian mahasiswa di kampus melalui forum kajian ekonomi dan keuangan syariah, seperti Fossei, kemudian di Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada *Sharia Business Law Intellegance* (SBLI).

Dari semua pihak yang berkepentingan dalam proses membangun ekosistem ekonomi syariah di atas perlu adanya penyamaan persepsi. *Pertama*, perlu adanya komitmen bersama yang kuat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ibaratnya, kalau dalam sholat, semua pihak harus dalam barisan (*shaf*) yang sama, yakni barisan pegiat dan pejuang (*mujahid*) ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Jangan sampai barisannya terpecah belah. Sehingga berakibat pada menurunnya proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *Kedua*, memperkuat kerja sama antara semua pihak. Misal, kalau sudah terbentuk komitmen yang kuat untuk membangun ekosistem ekonomi keuangan syariah, bagi lembaga pendidikan bisa memanfaatkan kerjasama dengan bank syariah untuk proses *payroll* gaji dosen dan tenaga kependidikan, atau pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah. ❁



# Memperkokoh Industri Halal

Dalam semangat menyebarkan nilai-nilai kebaikan syariah kepada dunia, Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri halal yang menjangkau semua umat, universal, dan berkelanjutan.

(K.H. Ma'ruf Amin)

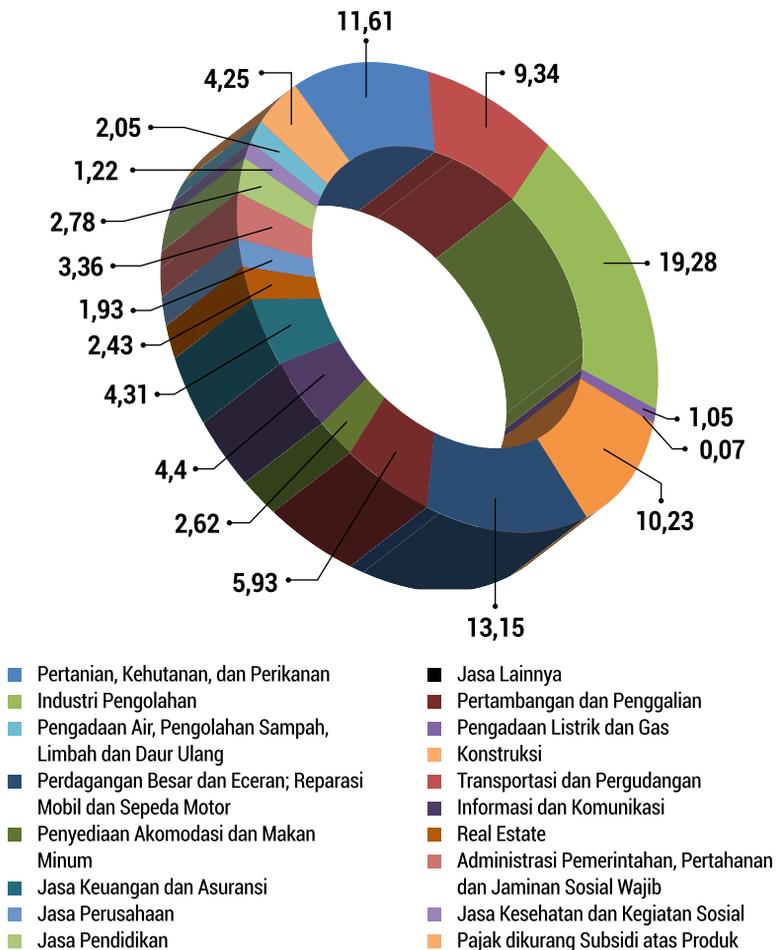
**MUNGKIN**, banyak yang tidak tahu bahwa penghasil produk halal dunia, kebanyakan berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim. Sebagai contoh, penghasil unggas halal berasal dari Brazil dan penghasil daging sapi halal berasal dari Australia. Ini menunjukkan bahwa permintaan produk halal sangat besar sehingga tidak terpenuhi pengadaannya oleh negeri yang mayoritas berpenduduk muslim dan harus dipenuhi oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim.

Selain besar, permintaan produk halal terus meningkat. Peningkatan permintaan produk halal seiring dengan peningkatan literasi masyarakat atas ekonomi syariah, gaya hidup halal dan tuntutan regulasi tentang jaminan produk halal. Peningkatan permintaan ini tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga dirasakan di tingkat global.

Dalam rangka menyambut permintaan tersebut, Kiai Wapres memberikan target agar Indonesia bisa mencapai visinya sebagai produsen halal dunia dan bisa menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru

ekonomi Indonesia di tingkat domestik maupun global. Kiai Wapres memberikan arahan kepada setiap kementerian/lembaga/instansi yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah untuk konsisten bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Kiai Wapres pun mendorong agar Masterplan Industri Halal Indonesia masuk ke agenda Pemerintah dalam pembangunan nasional beberapa

**Persentase Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDB Per Triwulan I 2024**



Sumber: BPS, diolah kembali

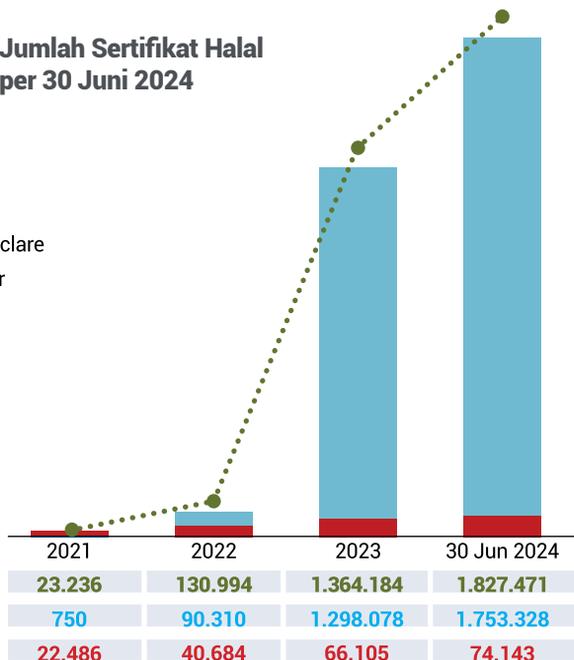
tahun kedepan. Alhasil, pengembangan industri produk halal menjadi fokus Kiai Wapres untuk menunjang tercapainya visi “Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia.”

Menelisik data Badan Pusat Statistik (lihat *Persentase Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDB Per Triwulan I 2024*), tampak bahwa PDB Indonesia pada Triwulan I 2024 didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 19,28 %; diikuti sektor perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil sebesar 13,15%; lalu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,61%. Lebih lanjut, data BPS menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari industri pengolahan berasal dari industri makanan minuman (6,97%) dan industri kimia, farmasi dan obat tradisional (1,86%). Industri pengolahan tersebut menuntut jaminan kehalalan. Namun demikian, pemberian jaminan halal pada produk makanan, farmasi dan obat masih belum dapat diberikan pada semua produk. Berbagai kendala, terutama bagi UMK, masih terbentang, mulai dari kesiapan kelembagaan, ketersediaan SDM, dan anggaran.



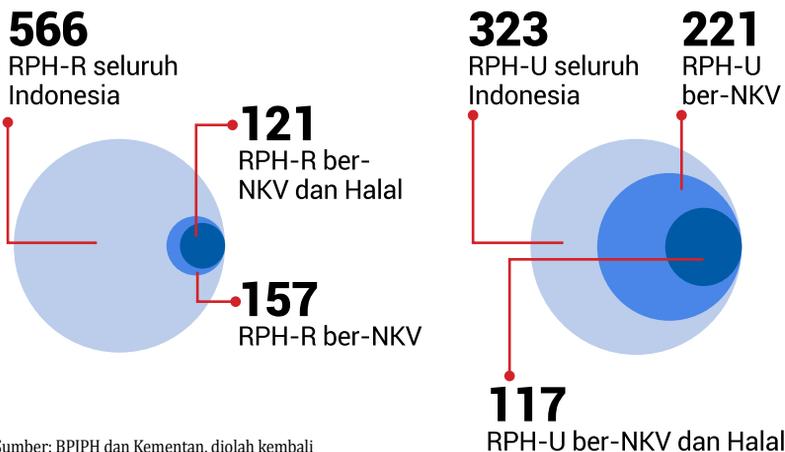
### Jumlah Sertifikat Halal per 30 Juni 2024

- Self Declare
- Reguler
- TOTAL



Sumber: BPIP, diolah kembali

## RPH bersertifikat halal dan ber-NKV per 30 Juni 2024



Sumber: BPJPH dan Kementan, diolah kembali

Saat ini, Pemerintah menargetkan agar seluruh produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan memiliki sertifikat halal pada Oktober 2024. Namun, melihat kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) saat ini, Pemerintah merelaksasi kewajiban sertifikat halal bagi UMK sampai dengan 2026. Menyikapi tantangan ini, Kiai Wapres meminta agar kewajiban sertifikasi halal ini tetap dilanjutkan secara optimis beriringan dengan dorongan upaya edukasi yang diberikan kepada pelaku usaha agar target sertifikasi halal bisa dicapai. Sampai dengan 30 Juni 2024, tercatat sebanyak 1.827.471 sertifikat halal untuk *self declare* telah terbit.

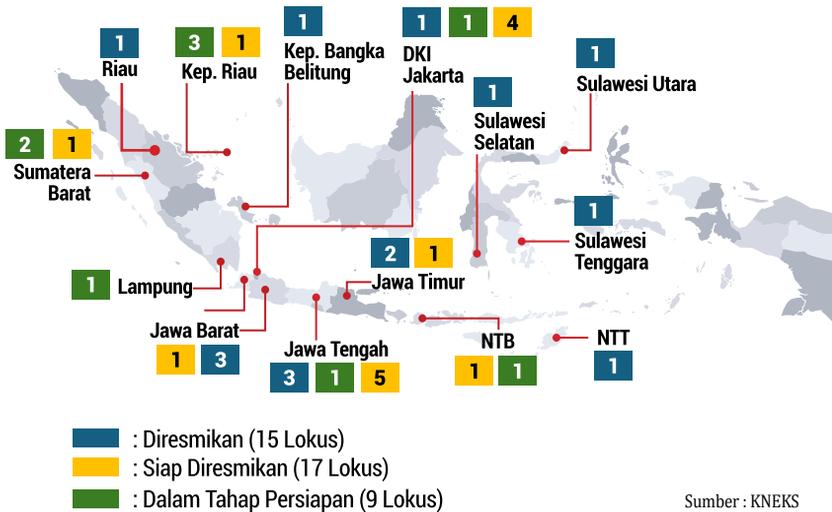
Kiai Wapres meminta agar percepatan jaminan halal dilakukan dengan strategi prioritas pada bahan baku makanan. Implementasinya adalah modernisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Halal. Pola ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan daging halal yang berkualitas. Modernisasi ini diharapkan dapat meningkatkan keterelusuran halal hewan sembelihan serta memberikan nilai tambah pada produk daging halal. Modernisasi RPH Halal juga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan sistem jaminan halal pada sektor hulu dalam rangka mendukung percepatan sertifikasi halal UMKM dan perlindungan konsumen.

Per Juni 2024, tercatat bahwa RPH-Ruminansia ber-NKV berjumlah sebesar 157 dari 566 RPH-R seluruh Indonesia. Kemudian, telah tercapai jumlah 121 RPH-R ber-NKV yang memiliki sertifikat halal. Di sisi lainnya, RPH-Unggas ber-NKV tercatat sebesar 221 dari RPH-U seluruh Indonesia. Diantara RPH-U ber-NKV tersebut, 117 diantaranya telah memiliki sertifikat halal.

Selanjutnya, infrastruktur pendukung proses pemeriksaan produk halal perlu diperbanyak dan diperluas jangkauannya untuk mempercepat implementasi jaminan produk halal di setiap daerah. Melihat hal ini, Kiai Wapres mengarahkan kementerian untuk mendorong terbentuknya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di setiap daerah. Dengan adanya LPH di setiap daerah, proses pemeriksaan produk halal tentunya akan jauh lebih efisien dan efektif. Sampai dengan 30 Juni 2024, tercatat bahwa jumlah LPH di Indonesia sudah mencapai 71 LPH dengan rincian 8 LPH Utama dan 63 LPH Pratama dengan total auditor halal sebanyak 707 orang. LPH tersebut tersebar di 22 provinsi di Indonesia.

Salah satu *enabler* dalam percepatan Sertifikasi Halal dapat dilakukan melalui percepatan sertifikasi halal untuk produk UMKM

### Penyebaran Zona KHAS di Indonesia per 7 Juli 2024





Makanan dan Minuman. Berdasarkan data BPS yang dikeluarkan Desember tahun 2023, jumlah pelaku usaha penyedia jasa makanan dan minuman Indonesia tumbuh 20,76%.

Kiai Wapres sebagai sosok yang ramah dan menggemari makanan lokal Indonesia sangat mengharapkan adanya lokus-lokus zona makanan UMKM yang terjamin kehalalannya, sehingga secara otomatis juga terjamin keamanan dan kesehatan makanan tersebut.

Sosok penggemar kerupuk tersebut menginisiasi agar dibentuknya Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS) di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini Zona KHAS sudah terdapat di 15 titik pada 11 kota di seluruh Indonesia. Pengembangan Zona KHAS tentu diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas.

Kiai Wapres berharap pelaku usaha dapat menyediakan makanan yang halal, aman, dan sehat sebagai sebuah bentuk kepedulian bersama akan pentingnya jaminan produk halal yang akan dikonsumsi. Bagi konsumen, mengonsumsi produk yang bersertifikat halal, aman, dan sehat dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Selain manfaat yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen, Zona KHAS secara tidak langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2022 tumbuh sebesar 5,44 persen (*yoy*) terhadap triwulan II tahun 2021. Pertumbuhan tersebut salah satunya didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga.

Pangan halal, aman, dan sehat merupakan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia dan sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen. Mengonsumsi makanan yang halal, aman dan sehat merupakan hak konsumen, tanpa memandang suku, ras, agama maupun ekonomi. Zona KHAS mampu memberikan pelayanan yang menjamin makanan dan minuman yang dikonsumsi memenuhi kehalalan, kesehatan dan kenyamanan bagi konsumen. Suatu lokasi dapat diresmikan sebagai Zona KHAS jika telah memenuhi beberapa kriteria, antara lain: (i) Memiliki minimal 5 (lima) *tenant*; (ii) Telah bersertifikasi Halal, (iii) Telah dilakukan labelisasi Aman dan Sehat, (iv) memiliki mushalla atau masjid di sekitar Zona KHAS, dan (v) dilengkapi sarana penunjang seperti toilet terpisah laki-laki dan perempuan, tempat cuci tangan, sanitasi cuci yang baik, tong sampah, serta kawasan merokok khusus. Hal ini sejalan dengan arahan Kiai Wapres dalam Rapat Pleno KNEKS

pada bulan Mei 2022 *“Di bidang pengembangan dan Perluasan usaha syariah, agar dapat memperluas fasilitas usaha di bidang kuliner yang berlandaskan nilai syariah melalui Zona KHAS.”*

Dalam rangka hilirisasi industri halal, Kiai Wapres mendorong terbentuknya Kawasan Industri Halal (KIH) lebih cepat lagi di berbagai daerah mengingat payung hukum dari KIH sudah terbit. Konsep KIH dapat berupa Kawasan itu sendiri atau di dalam suatu kawasan industri ada sebagian area yang diperuntukkan bea KIH. Tantangannya adalah pembentukan KIH ini perlu riset dan analisis yang mendalam diperlukan analisis yang baik mengenai nilai strategis dari kawasan tersebut serta kondisi di sekitarnya. Sampai dengan 30 Juni 2024, sudah ada 4 (empat) KIH yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, ada beberapa pengelola kawasan industri lainnya yang berminat untuk mengembangkan zona halal dalam kawasannya. Selanjutnya, diperlukan strategi yang cemerlang untuk menarik pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya di dalam KIH.

Gagasan lain dari Kiai Wapres untuk mempercepat pertumbuhan industri halal adalah dengan meningkatkan level Kawasan Industri Halal (KIH) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal. Peningkatan status tersebut diharapkan makin menarik calon investor untuk berinvestasi dirantai produksi halal. Pengusulan pertama KEK Halal dilakukan terhadap KIH di Sidoarjo. Tantangan ke depan untuk memperbanyak Kawasan serupa adalah perencanaan berbasis riset mulai dari identifikasi target market, jenis produk, ketersediaan bahan baku, proses jaminan kehalalan, tenaga kerja, partisipasi masyarakat sekitar serta isu lingkungan hidup. Melalui riset yang mendalam diharapkan akan memudahkan instansi Pemerintah, pengusaha dan pemangku kepentingan lain dalam mendukung pembangunan KEK Halal.

Kiai Wapres selalu berujar bahwa produk halal Indonesia tidak cukup hanya dikembangkan di Indonesia, beliau menaruh perhatian agar produk-produk halal unggulan Indonesia bisa tembus ke pasar internasional. Lebih lanjut lagi Kiai Wapres sangat fokus dengan gagasannya untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Produsen Produk Halal Dunia. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka parameter utama yang menjadi indikator adalah Nilai Ekspor Produk Halal Indonesia yang didukung oleh kesiapan pelaku usaha UKM Eksportir Produk Halal untuk bersaing di pasar global.



Secara data, nilai ekspor produk halal Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Dalam 5 (lima) tahun terakhir nilai ekspor produk halal Indonesia secara rata-rata tumbuh 10,95%. Nilai ekspor produk halal tahun 2023 mencapai USD50,5 miliar atau setara dengan 20,7% dari total nilai ekspor non-migas nasional. Adapun 5 (lima) negara tujuan ekspor produk halal adalah Amerika Serikat (17,69%), China (13,42%), India (10,19%), Pakistan (5,53%), dan Malaysia (4,29%). Ekspor produk halal Indonesia masih didominasi oleh sektor makanan dan minuman halal sebesar 80,70%.

Kiai Wapres mengungkapkan, saat ini tantangan yang kerap dihadapi oleh pelaku usaha UKM eksportir halal yaitu berkaitan dengan kualitas, kapasitas, dan kontinuitas produk. Secara spesifik empat tantangan tersebut meliputi akses pasar, inkubasi/pendampingan, pembiayaan dan pembayaran, serta MRA sertifikasi halal dan perjanjian perdagangan. Menindaklanjuti tantangan yang dihadapi tersebut maka dibentuk Kelompok Kerja *Indonesia Halal Export Incorporated (IHEI)*. Kelompok Kerja ini bertugas memfasilitasi secara langsung

### Media Briefing Kinerja Ekspor Produk Halal Tahun 2023.

Sumber: Dokumentasi KNEKS



berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha eksportir produk halal sehingga percepatan ekspor produk halal dapat terealisasi dan meningkatkan nilai ekspor produk halal Indonesia.

Di sisi yang lain, Kiai Wapres juga melihat sektor pariwisata ramah muslim merupakan sektor yang dapat menjadi lokomotif pengembangan berbagai sektor pada Industri Halal yang dapat berkontribusi secara signifikan pada ekonomi nasional. Sektor pariwisata Indonesia bangkit kembali setelah diterpa pandemi *covid-19* silam. Sektor ini terus berangsur membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Tidak terkecuali bagi industri perhotelan yang terus mengalami lonjakan wisatawan, sehingga diperlukan inovasi, baik berupa paket wisata kreatif maupun fasilitas menarik. Kiai Wapres melihat bahwa diperlukan kerjasama dari para pemangku kepentingan untuk dapat semakin mendorong kemajuan perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Kiai Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata untuk mengembangkan pariwisata ramah muslim sebagai salah satu tulang punggung ekonomi kita, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan pengalaman tak terlupakan kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Destinasi wisata perlu didorong untuk menyediakan fasilitas akomodasi ramah muslim dan kuliner halal sebagai prioritas, disamping aksesibilitas dan atraksi.

Arahan dari Kiai Wapres membuahkan hasil yang luar biasa bagi pariwisata ramah muslim Indonesia. Alhamdulillah, Pada tahun 2023, Indonesia berhasil kembali meraih peringkat 1 pada *Global Muslim Travel Index (GMTI)* serta meraih *Stakeholder Awareness Campaign of the Year Awards 2023*. Pencapaian ini dapat dipertahankan pada tahun 2024.

Tidak berhenti pada sektor yang memiliki nilai tambah ekonomi, Kiai Wapres juga memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia terkait kesehatan. Saat ini, gaya hidup halal juga sudah menyentuh ke dalam sektor kesehatan. Kiai Wapres dengan cermat melihat pentingnya pengembangan industri kesehatan berkompetensi syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kiai Wapres menegaskan bahwa fokus pengembangan ini berorientasi pada pembentukan ekosistem yang mencakup fasilitas layanan kesehatan berkompetensi syariah, sumber daya manusia dengan kompetensi syariah, farmasi halal, pembiayaan keuangan syariah, catering halal, dan jasa-jasa pendukung lainnya yang berstandar halal.



Saat ini, sudah terdapat Rumah Sakit bersertifikat syariah sebanyak 33 Rumah sakit, 8 di antaranya dalam proses perpanjangan sertifikat syariah. Selain itu, sudah terdapat 1 klinik yang memiliki sertifikat syariah. Di sisi farmasi, sudah terdapat produk farmasi yang tersertifikasi halal sebanyak 41.152 produk per 31 Juni 2024. Tantangan yang dihadapi adalah literasi masyarakat dan operator fasilitas layanan kesehatan yang perlu ditingkatkan terkait kesehatan berkompetensi syariah. Menyikapi hal ini, Kiai Wapres secara khusus meminta Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia (MUKISI) agar konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi, mendorong peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat tentang layanan kesehatan syariah, dan memperluas kolaborasi guna semakin mengukuhkan ekosistem kesehatan syariah nasional

Kiai Wapres dalam beberapa kesempatan menekankan bahwa riset dan inovasi di bidang ekonomi Syariah merupakan faktor yang penting dalam pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Pengembangan ekonomi Syariah khususnya sektor industri halal memerlukan dukungan pilar riset dan inovasi yang strategis, efektif, dan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan industri.

Alhamdulillah Kiai Wapres telah meresmikan 2 pusat riset dan inovasi produk halal di Indonesia yang pendanaan pembangunannya menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk. Pusat riset tersebut adalah Pusat Riset Teknologi Proses Pangan (PRTPP) - BRIN di Yogyakarta sebagai Fasilitas Riset Teknologi Pangan dan Laboratorium Riset Halal Nasional serta Pusat Riset Bioindustri Laut dan Perairan Darat BRIN di Nusa Tenggara Barat sebagai Fasilitas Pengembangan Teknologi Produk Halal Berbasis Maritim Nasional. Di samping itu, Kiai Wapres telah mendorong dibuatnya rencana aksi program prioritas riset dan inovasi halal BRIN yang dilakukan oleh berbagai organisasi riset dan pusat riset di bawah BRIN. Rencana aksi BRIN terkait riset halal prioritas 2022-2024 yaitu mencakup riset *marker and striptest*, riset metode deteksi cepat autentikasi halal, riset *manufacturing* alat uji deteksi halal, riset gelatin dan kolagen halal dalam rantai pasok fasilitasi industri (*non hard science*), riset bahan pangan halal dan riset bahan farmasi dan kosmetik halal. 🌱

# Jasa Keuangan Syariah sebagai Jangkar Ekosistem Syariah

Karena memang ekonomi syariah, terutama perbankan ini merupakan jangkar ekonomi syariah. Menurut saya dan kita mulai dari situ, maka sebenarnya yang akan bisa menggerakkan ini adalah peran daripada perbankan syariah

(K.H. Ma'ruf Amin)

**SEBAGAIMANA** diulas pada bahasan tentang *Ekosistem Ekonomi Syariah*, semua pilar dan infrastruktur ekonomi syariah harus saling terhubung dan saling menguatkan. Namun meskipun semua elemen tersebut perlu dikuatkan, masing-masing elemen atau bahkan sub elemen pada ekosistem syariah memiliki keunikan atau peran tersendiri. Ada yang berperan sebagai akselerator, ada yang berperan sebagai jangkar, ada juga yang memiliki peran-peran lainnya. Yang berperan sebagai jangkar dalam ekosistem ekonomi syariah adalah pilar jasa keuangan syariah (JKS).

Perihal peran JKS sebagai jangkar ekosistem syariah, Kiai Wapres dalam acara pembukaan International Expo di tahun 2024 dari sebuah bank syariah menyampaikan bahwa perbankan syariah harus menjadi jangkar untuk menggerakkan seluruh ekonomi syariah di Indonesia. Kiai Wapres mengimbau agar jaringan dan kolaborasi antara pelaku usaha dan sektor perbankan syariah di berbagai daerah dapat diperkuat, sehingga dapat menjadi pendorong utama dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk halal Indonesia.

Besarnya tugas dan potensi perbankan syariah perlu juga dibarengi dengan penguatan khususnya pada sisi permodalan. Pangsa pasar perbankan syariah yang masih berada pada kisaran 7% menjadi tantangan besar yang perlu diselesaikan bersama. Kiai Wapres sangat memahami hal ini dan konsisten mendorong penguatan perbankan syariah di Indonesia.

Kiai Wapres menyampaikan empat strategi untuk memperkuat perbankan syariah di Indonesia yaitu meningkatkan ketahanan dan daya saing, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional serta memperkuat sinergi dan kolaborasi. Lebih jauh Kiai Wapres menekankan, keberhasilan industri perbankan syariah tidak lepas dari pengaruh faktor *leadership*. Untuk itu Kiai Wapres mengimbau para pemimpin di sektor perbankan syariah untuk berpegang pada prinsip tata kelola, kehati-hatian, inklusif, keadilan, dan keberlanjutan, serta mengaplikasikannya pada seluruh lini proses bisnis yang dijalankan.

**Kunjungan Kiai Wapres ke Jepang pada Maret 2023.**





Kiai Wapres juga menyampaikan arahan yang jelas agar perbankan syariah melakukan upaya proaktif dalam menjangkau nasabah syariah, baik ASN, pegawai BUMN maupun masyarakat umum, dengan mengutamakan keunggulan serta *benefit* berbagai produk dan layanan bank syariah.

Sejalan dengan harapan Kiai Wapres untuk menjadikan perbankan syariah sebagai jangkar penggerak ekonomi, Kiai Wapres senantiasa mendorong perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor diantaranya sektor infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan dan usaha. Bukan hanya pembiayaan syariah dalam negeri, namun Kiai Wapres juga mendorong perbankan syariah menyalurkan pembiayaan untuk pelaku industri halal di luar negeri. Hal ini beliau sampaikan di tengah kunjungan Kiai Wapres ke Jepang pada Maret 2023. Selain itu, dalam event *Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Seminar Series*, Kiai Wapres menyampaikan bahwa pembiayaan dengan skema syariah juga dapat dijadikan alternatif sumber dana transisi energi berkelanjutan.

Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, perbankan syariah dapat tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

## **Akselerasi Pembangunan Infrastruktur melalui Inovasi Sukuk**

Unsur lain selain perbankan syariah pada JKS terkait pasar modal syariah, diantaranya adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang lebih dikenal dengan sukuk negara. Sukuk Negara telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kiai Wapres menegaskan bahwa sukuk Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Capaian ini menunjukkan potensi besar sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional, terutama dari sektor infrastruktur.

Salah satu inovasi yang telah dikembangkan dalam pasar sukuk Indonesia adalah *green sukuk*, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang baru bagi investor yang peduli terhadap isu lingkungan. Selain itu, Pemerintah juga telah me-



luncurkan sukuk ritel, yang memungkinkan partisipasi masyarakat umum dalam pembiayaan negara, tidak hanya terbatas pada pemodal besar.

Potensi pengembangan pasar sukuk di Indonesia masih sangat besar. Kiai Wapres menyoroti pentingnya pemanfaatan sukuk oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya sukuk ritel, masyarakat umum dapat berkontribusi langsung dalam pembiayaan pembangunan negara, sekaligus mendapatkan manfaat dari investasi syariah. Lebih jauh lagi, inovasi terbaru berupa sukuk wakaf menambah variasi produk investasi syariah yang tersedia, membuka peluang bagi pengembangan wakaf produktif melalui instrumen pasar modal.

**Indonesia  
Biodiversity Strategy  
& Action Plan (IBSAP)  
2025-2045.**



Meskipun sukuk Indonesia tercatat sebagai yang terbesar di dunia, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperluas basis investor dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan mekanisme investasi sukuk. Selain itu, inovasi produk dan pengembangan infrastruktur pasar perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing dan relevansi pasar sukuk Indonesia di tingkat global.

Dalam menghadapi tantangan ini, Kiai Wapres memberikan arahan agar pengembangan sukuk terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan ekonomi syariah secara keseluruhan. Beliau menekankan pentingnya sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, terutama infrastruktur, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dengan harapan agar sukuk dapat berkembang semakin besar ke depannya, pemerintah perlu fokus pada edukasi masyarakat, inovasi produk, dan penguatan regulasi untuk mendukung pertumbuhan pasar sukuk yang berkelanjutan. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan pasar modal syariah, khususnya instrumen sukuk, dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional.

**Kiai Wapres juga menekankan pentingnya inovasi produk, termasuk pengembangan asuransi mikro syariah dengan sistem pembayaran yang lebih ekonomis.**



## Merajut Asa: Kiai Wapres dan Visi Besar Industri Asuransi Syariah Indonesia

Unsur berikutnya dari pilar JKS adalah asuransi syariah. Asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak berdirinya asuransi syariah Takaful pada tahun 1994. Selama hampir tiga dekade, industri ini telah tumbuh sebagai bagian integral dari ekonomi dan keuangan syariah nasional. Namun, meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pangsa pasar asuransi syariah masih relatif rendah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga Maret 2024, pangsa pasar industri asuransi syariah terhadap industri asuransi nasional baru mencapai 4%.

Meski demikian, potensi pengembangan asuransi syariah di Indonesia masih sangat besar. Kiai Wapres menegaskan bahwa asuransi syariah memiliki peluang yang luas untuk dikembangkan sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan asuransi syariah mengedepankan nilai-nilai Islam dengan mempertahankan prinsip berbagi risiko, keadilan, dan transparansi. Potensi ini semakin diperkuat dengan adanya peluang ekspansi ke pasar ASEAN melalui *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, yang memungkinkan industri asuransi syariah Indonesia untuk memasarkan produknya secara langsung ke negara-negara di wilayah ASEAN.

Dalam upaya pengembangan industri asuransi syariah, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kiai Wapres menyoroti empat faktor kunci yang harus dipenuhi untuk mengoptimalkan performa industri ini. *Pertama*, peningkatan kualitas SDM yang memiliki kompetensi ekonomi dan keuangan serta memahami prinsip-prinsip syariah. *Kedua*, menjaga nilai-nilai syariah dalam menjalankan bisnis untuk meningkatkan kepercayaan publik. *Ketiga*, pemanfaatan instrumen investasi yang bersifat produktif. Keempat, optimalisasi teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah.

Selain itu, Kiai Wapres juga menekankan pentingnya inovasi produk, termasuk pengembangan asuransi mikro syariah dengan sistem pembayaran yang lebih ekonomis. Hal ini diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan syariah dan menjangkau segmen pasar yang belum terlayani oleh asuransi konvensional. Kiai Wapres juga mendorong penerapan kebijakan spin-off unit usaha syariah untuk memperkuat sektor ini, dengan harapan makin banyak perusahaan asuransi yang beroperasi secara penuh syariah.



Untuk mendukung pengembangan industri asuransi syariah, Kiai Wapres memberikan beberapa arahan. Di antaranya adalah meningkatkan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan pelayanan nasabah, mendorong literasi keuangan syariah di masyarakat, menciptakan produk-produk yang menarik untuk generasi produktif Indonesia, mendukung pelaku UMKM melalui proteksi usaha dan literasi keuangan, serta memperkuat kesiapan industri dalam menghadapi risiko-risiko yang tidak dapat diprediksi.

Dengan adanya potensi yang besar dan dukungan pemerintah, industri asuransi syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kiai Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dan bekerja sama dalam membangun ekosistem asuransi syariah yang efektif, efisien, sehat, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi antara Pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat, asuransi syariah dapat menjadi pendukung utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

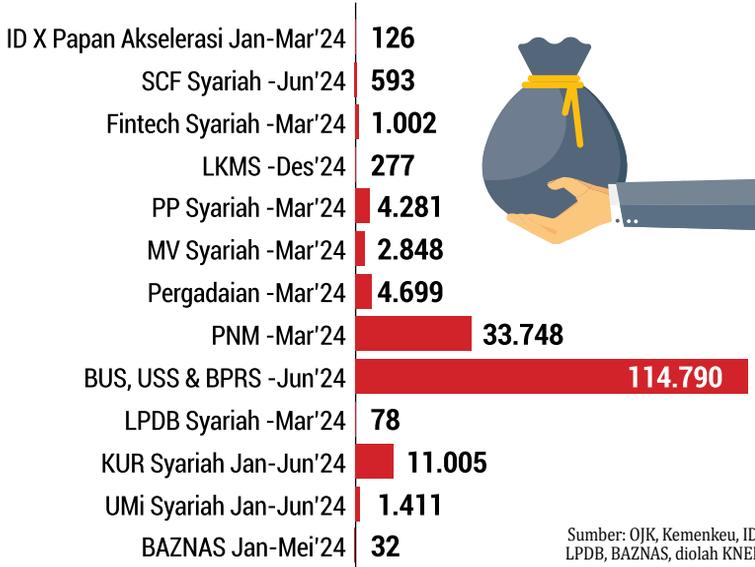
## **Memacu Pembiayaan Syariah Terintegrasi Bagi UMKM Untuk Menumbuhkan Sektor Riil Indonesia**

Kiai Wapres meletakkan fokusnya pada peningkatan kapasitas UMKM Industri Halal. Beliau selalu menyampaikan bahwa UMKM merupakan tumpuan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, untuk menggerakkan sektor riil, maka dukungan Pemerintah serta pihak terkait lainnya perlu difokuskan terhadap UMKM.

Permodalan masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usahanya. Padahal, berbagai alternatif sumber permodalan bagi UMKM telah tersedia. Per Maret 2024, Pembiayaan/Pendanaan Syariah terintegrasi bagi UMKM telah mencapai Rp 174,90 triliun. Penyaluran Pembiayaan kepada UMKM masih didominasi oleh Perbankan Syariah (BUS, UUS dan BPRS) sebesar Rp 114,790 triliun (65,63%) disusul kemudian Unit Usaha Syariah PNM sebesar 33,74 triliun (20,96%).

Kiai Wapres juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha adalah ketidakmampuan UMKM untuk memenuhi kriteria pembiayaan yang disyaratkan oleh berbagai lembaga akibat lemahnya literasi dan kompetensi, namun belakangan ini terlihat bahwa

## Pembiayaan/Pendanaan Syariah Bagi UMKM (Rp, Miliar)



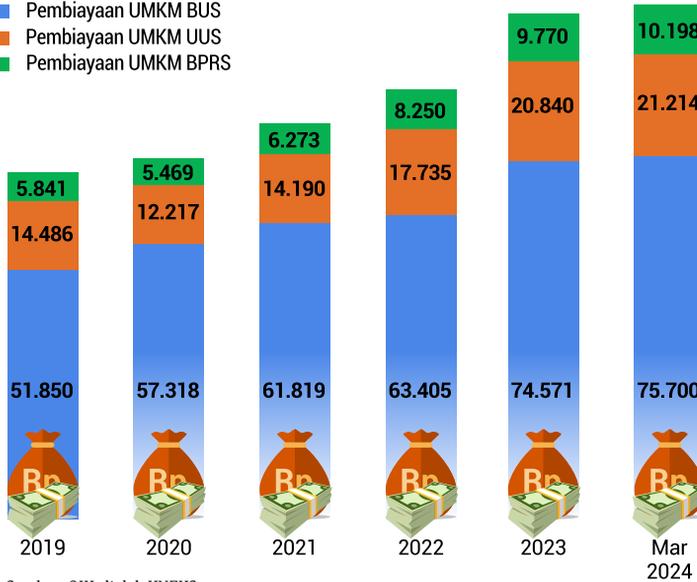
pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan masyarakat telah terliterasi oleh adanya pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM.

Kiai Wapres juga mengharapkan UMKM bisa memiliki dan memanfaatkan alternatif pembiayaan syariah lainnya di luar perbankan. Oleh karena itu, Kiai Wapres mendorong agar UMKM dapat memanfaatkan Layanan Urun Dana atau lebih dikenal dengan *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah untuk mendapatkan pendanaan dengan menerbitkan saham/sukuk.

Meskipun tergolong alternatif pendanaan baru, penerbitan saham/sukuk UMKM melalui SCF Syariah tumbuh cukup signifikan. Per Maret 2024, Jumlah Penyelenggara SCF Syariah yang telah berizin sebanyak 6 Penyelenggara (*Full Pledge* dan *Hybrid*). Jumlah saham dan sukuk UMKM yang telah diterbitkan mencapai Rp 474,09 Miliar dari 106 Penerbit. Dengan nilai tersebut, *market share* SCF Syariah telah mencapai 43%.

## Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah UMKM (Rp, Miliar)

- Pembiayaan UMKM BUS
- Pembiayaan UMKM UUS
- Pembiayaan UMKM BPRS



Sumber: OJK, diolah KNEKS

Kiai Wapres sangat jelas menyampaikan arahnya terkait pembiayaan bagi UMKM dalam berbagai kesempatan bahwa “*Kementerian/Lembaga terkait agar meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pepadanan bisnis (business matching) UMKM dengan Lembaga Keuangan Syariah*”

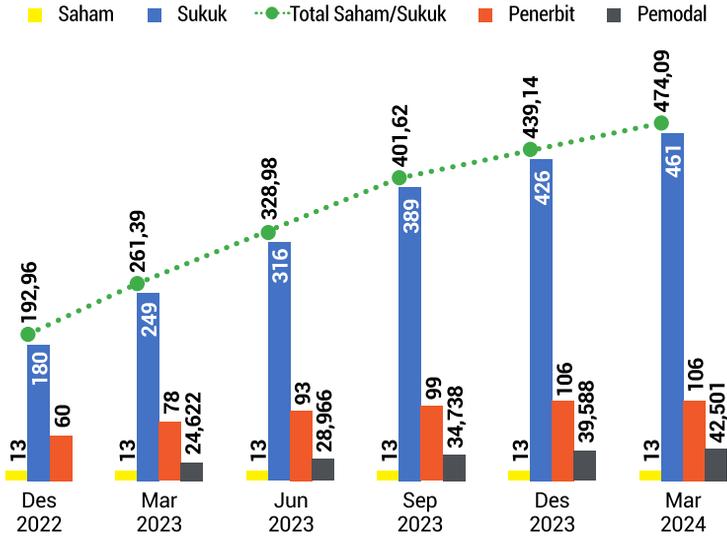
### **BMT 4.0: Digital Transformation and Sustainability**

Dua orang ustadzah muda, nampak asyik memainkan HP-nya. Mereka berdua, bukan sedang bermain *game* ataupun menonton drama korea, namun sedang melakukan transaksi digital dari BMT yang ada di pondok pesantren tempat mereka mengajar. BMT yang ada di pondok pesantren tersebut adalah salah satu alumni pelatihan BMT 4.0 yang diselenggarakan oleh KNEKS.

Program pelatihan tersebut adalah salah satu program prioritas KNEKS yang dicanangkan oleh Kiai Wapres sebagai ketua harian KNEKS, yakni BMT 4.0: *Digital Transformation and Sustainability*.



## Perkembangan Penerbitan Saham/Sukuk UMKM



Sumber: OJK & ALUDI diolah KNEKS

Program digitalisasi untuk penguatan BMT menjadi salah satu program prioritas menunjukkan dukungan Kiai Wapres terhadap BMT. Kiai Wapres menilai *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) memegang peranan penting karena sebagai lembaga keuangan yang menangani UMKM. BMT merupakan institusi keuangan mikro syariah (IKMS) yang mensenyawakan fungsi sosial dan fungsi komersial dalam melayani masyarakat menengah bawah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan BMT untuk dapat menjadi solusi penguatan ekonomi umat.

.....

**“Menjadi kewajiban kita untuk menguatkan BMT-BMT yang kita miliki agar terbukti menjadi solusi bagi penguatan ekonomi umat sehingga dapat direplikasi di berbagai negara muslim lainnya.”**



**Wapres meluncurkan  
Indonesia Sharia  
Economic Outlook  
(ISEO) 2024.**

Salah satu bentuk dukungan Kiai Wapres terhadap BMT dapat dilihat dari sambutan Beliau pada acara *BMT Summit 2020*.

Lebih lanjut Kiai Wapres menyampaikan, BMT merupakan lembaga keuangan yang sesuai untuk membantu UMKM karena berbeda dengan lembaga perbankan lainnya, BMT memiliki kelebihan untuk memberikan pembiayaan tanpa memerlukan persyaratan yang rumit bagi UMKM. Lembaga ini juga memberikan pendampingan kepada nasabah untuk mengembangkan kegiatan usaha dan juga melakukan pembinaan karakter dan perilaku hidup yang baik.

Pada perbankan, transaksi digital saat ini telah mendominasi dibandingkan dengan transaksi melalui *teller* atau kantor cabang. Sebagai contoh BRI yang transaksinya tumbuh hingga 249,5% *year on year* (yoy) di

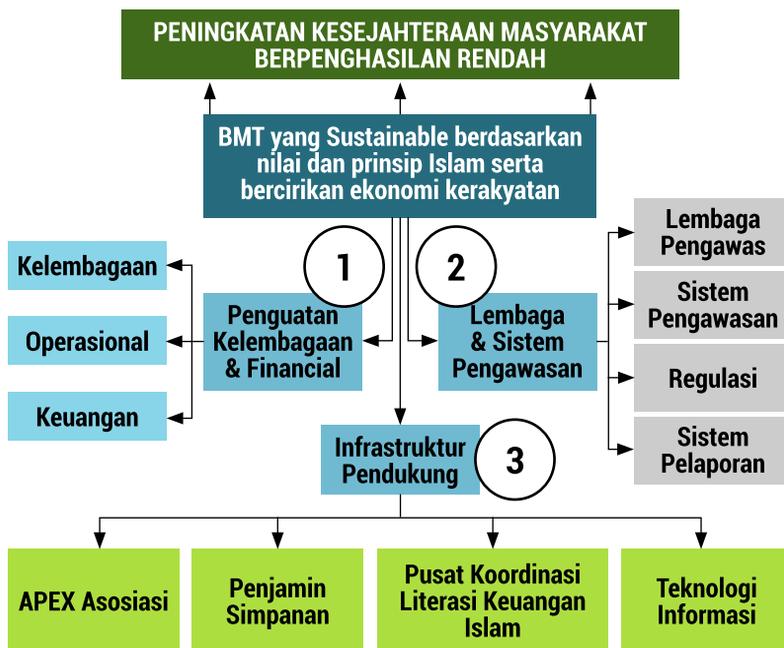
2021, didominasi oleh transaksi digital sebesar 96,7% sedangkan transaksi melalui *teller* atau kantor cabang hanya 3,3%.

KNEKS sebagai lembaga yang Kiai Wapres sebagai ketua hariannya, telah melakukan kajian yang menghasilkan tiga pilar strategi pengembangan BMT, sebagaimana terlihat gambar di bawah ini.

Selanjutnya, pada tahun 2022 KNEKS melakukan kajian yang hasilnya menyatakan bahwa ada satu elemen, yang bila itu dikuatkan, maka akan menguatkan elemen-elemen lain pada pilar tersebut bahkan pilar-pilar penguatan Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) lainnya. Elemen tersebut adalah digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, maka IKMS akan kuat dari sisi pilar bisnis, pengawasan dan infrastruktur pendukungnya. Selain memperkuat IKMS-nya, adanya digitalisasi IKMS diharapkan dapat lebih memberdayakan pengusaha mikro.

Kondisi yang ada di perbankan relatif sudah baik dengan mengadopsi teknologi digital, berbeda dengan Institusi Keuangan Mikro (IKM) dan IKMS. Sebagian IKM atau IKMS sudah ada yang mengadopsi

### Tiga Pilar Strategi Penguatan BMT



teknologi digital namun jumlahnya masih sangat sedikit. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari hasil kajian OJK tentang digitalisasi IKM tahun 2021 yang dilakukan pada 1.371 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari 33 Provinsi baik yang sudah ataupun belum diawasi oleh OJK. Kajian ini menunjukkan bahwa LKM yang diawasi oleh OJK 60% belum terdigitalisasi, sedangkan LKM yang berada di luar pengawasan OJK 55% belum terdigitalisasi. Oleh karena itu, digitalisasi IKMS menjadi salah satu dari 13 program prioritas KNEKS. Salah satu bentuk dukungan program prioritas tersebut, KNEKS telah melakukan serangkaian sosialisasi dan *training* IKMS 4.0 di berbagai provinsi di antaranya di Jawa Barat, NTB, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Yogyakarta, Riau dan Sulawesi Selatan.

*Training-training* tersebut diberikan kepada IKMS yang terkategori Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS mendapat prioritas untuk mendapatkan pelatihan tentang digitalisasi sehubungan jumlahnya yang banyak dan mayoritas belum terdigitali-

Melihat produk  
UMKM di  
Palangkaraya, di sela  
Pengkukuhan KDEKS  
Kalimantan Tengah.



## Digitalisasi BMT di Ponpes Ar Risalah Padang



sasi. Sampai dengan Maret 2023 untuk KSPPS dan LKMS pada data KNEKS tercatat 564 IKMS yang telah terdigitalisasi. Jumlah tersebut melampaui target yakni 500 IKMS terdigitalisasi sampai akhir 2024. Dengan digitalisasi diharapkan peran strategis BMT dalam memberdayakan UMKM kita kuat dan makin banyak lagi UMKM yang dijangkau. Di Indonesia, IKMS adalah persenyawaan antara fungsi sosial (*Baitul Maal*) dan fungsi bisnis (*Baitut-tamwii*l).

Dengan adanya digitalisasi pada sebuah BMT, selain memungkinkan adanya layanan keuangan digital berbasis HP, juga menjadikan setoran penghimpunan zakat, infak dan wakaf uang, dapat dilakukan melalui HP atau transfer dari bank umum. 🌱

# Dana Sosial dan Pemberdayaan Umat

Sebenarnya bagi kita umat Islam, wakaf ini kan merupakan suatu bagian dari syariat Islam, yang merupakan sesuatu yang dianjurkan dan memiliki peran penting di dalam rangka pemberdayaan masyarakat (umat), dalam rangka *takwiyatul ummah*, penguatan umat.

(K.H. Ma'ruf Amin)

**B**ERKEMEJA putih lengan panjang, Kiai Wapres tampak khusyu' berdoa bersama dengan seorang amil zakat. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di masjid atau kantor amil zakat, namun di Istana Negara dan diliput berbagai media! Pembayaran zakat yang dilakukan oleh Kiai Wapres yang juga dilakukan bersama dengan Presiden Joko Widodo, bukan untuk riya atau pamer kebajikan. Namun kegiatan tersebut adalah bentuk dukungan Pemerintah untuk mendorong pelaksanaan kewajiban kaum muslimin Indonesia dalam membayar zakat.

Tidak hanya zakat, yang merupakan salah satu dari dana sosial syariah, Kiai Wapres memiliki kepedulian yang tinggi terhadap dana sosial syariah secara keseluruhan sebagaimana yang disampaikan dalam sambutannya pada peresmian peluncuran Ruang Amal Indonesia pada tanggal 14 Mei 2024.

Kiai Wapres menyatakan, "*Pengelolaan dana sosial syariah harus terus dipacu agar semakin berdampak pada sektor-sektor pendidikan, kesehatan, dakwah, advokasi, kemanusiaan, dan ekonomi.*"



Selain zakat, dana sosial syariah yang lainnya adalah dana wakaf, infaq dan lain-lain. Tanpa bermaksud mengesampingkan dana sosial syariah lainnya, pada buku ini yang dikupas adalah zakat dan wakaf.

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam atau badan usaha yang kemudian diberikan kepada yang berhak (mustahik). Sedangkan wakaf adalah memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Di Indonesia, zakat dan wakaf telah dipayungi aturan setingkat undang-undang. Untuk wakaf dipayungi oleh Undang - Undang nomor 41 tahun 2004 sedangkan zakat dipayungi oleh UU nomor 23 tahun 2011.

### **Wakaf Tunai**

Pada awal 2021, Presiden Joko Widodo dan Kiai Wapres memulai Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Langkah ini menegaskan lagi komitmen dan implementasi

**Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin serahkan zakat melalui BAZNAS.**



**Peresmian  
Peluncuran Ruang  
Amal Indonesia  
14 Mei 2024.**

Sumber : BPMI Setwapres

gagasan Kiai Wapres untuk mengembangkan instrumen wakaf. Wakaf tidak seolah terbatas pada aset tetap, seperti tanah

Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia bertumbuh cukup pesat dan menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari data penghimpunan zakat dan wakaf yang selalu meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya penghimpunan serta besarnya potensi zakat dan wakaf didorong pula dengan fakta bahwa Indonesia memiliki jumlah populasi muslim terbesar dunia dan menurut penelitian *CAF World Giving Index* tahun 2023, Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia.

Data yang di-*release* KNEKS menunjukkan pertumbuhan penghimpunan dana sosial dari 2022 ke 2023 adalah 43,7%. Jumlah mustahik per 2023 sebesar 123,3 juta orang, sedangkan jumlah muzaki sebesar 92,4 juta

orang. Jumlah mustahik yang keluar dari garis kemiskinan sebesar 25.027 dan mustahik yang naik kelas menjadi muzaki 5.888 orang.

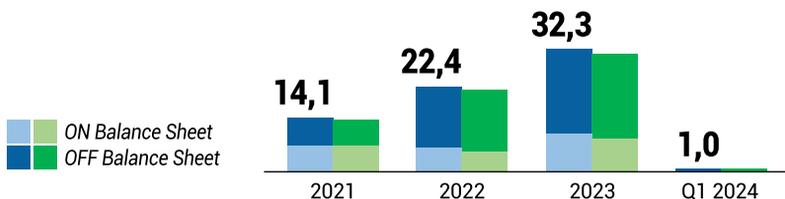
## Transformasi Pengelolaan Zakat Nasional

Terkait zakat, Kiai Wapres mendorong masyarakat muslim untuk berzakat tidak sekedar tertunaikan kewajiban sebagai suatu kesalahan individu, namun juga mendorong agar penunaian zakat yang berdampak kepada masyarakat sebagai wujud kesalahan sosial. Beliau berkeyakinan bahwa zakat dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini misalnya dapat kita lihat dalam pernyataannya pada saat Beliau *membuka* Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Forum Zakat, 16 Juli 2024.

“Saya meyakini dengan adanya gerakan zakat yang masif, niscaya akan menghasilkan daya yang kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat.”

Kiai Wapres mendorong semua pihak untuk serius mendorong pengelolaan zakat yang profesional karena potensi penghimpunan dana zakat yang cukup besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Potensi zakat nasional tersebut menurut data BAZNAS RI mencapai Rp 327,6 triliun.

Data Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL Nasional (Rp. Triliun)



Sumber: BAZNAS, 2024

\* Pelaporan data Q1 2024 baru 55% entitas



Tren penghimpunan zakat nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu : Penghimpunan zakat nasional tahun 2021 sebesar Rp 14,1 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 22,47 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp 32,3 triliun. Pada tahun 2024 ini, BAZNAS RI menetapkan target penghimpunan zakat nasional sebesar Rp 41 triliun.

Tren peningkatan penghimpunan zakat nasional dari tahun ke tahun tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

*Pertama*, Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban beragama terutama umat islam mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terbukti dengan adanya kenaikan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah terutama tingkat literasi zakat nasional, pada tahun 2020 skor literasi zakat nasional sebesar 66,78 %, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 75,26 %.

*Kedua*, sebagai komitmen mendukung penumbuhan penghimpunan zakat nasional. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir (2015 – 2024) rutin mengadakan kegiatan penyerahan zakat di istana yang dilakukan secara langsung oleh Presiden RI, acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, beberapa Menteri termasuk Kepala Lembaga Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian/Lembaga, serta Kepala Daerah.

Kegiatan penyerahan zakat istana ini sangat berdampak terhadap peningkatan penghimpunan zakat nasional. Hal ini disebabkan adanya contoh penunaian zakat oleh pemimpin tertinggi negara beserta para pejabat negara dalam hal penunaian zakat individu yang dilakukan rutin setiap tahun. Kegiatan ini mendorong aparatur sipil negara serta masyarakat secara luas untuk juga menunaikan zakat kepada lembaga zakat terpercaya baik BAZNAS maupun LAZ.

*Ketiga*, semakin bertumbuhnya stakeholder dan inovasi pengelolaan zakat nasional, diantaranya yaitu terdapat : 1 BAZNAS RI, 34 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kabupaten / Kota, 44 LAZ Nasional, 35 LAZ Provinsi, dan 74 LAZ Kabupaten / Kota. Tidak hanya dari aspek kelembagaan yang semakin bertumbuh, akan tetapi dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana zakat semakin banyak lembaga zakat yang melakukan inovasi digitalisasi pengelolaan zakat sehingga masyarakat semakin mudah dalam menunaikan zakat dan mendapatkan akses laporan penyaluran zakat secara digital.

## Transformasi Pengelolaan Wakaf Uang Nasional

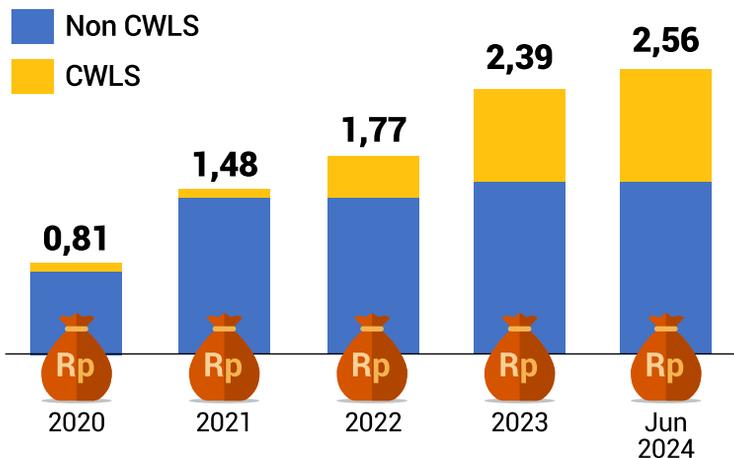
Selain potensi zakat yang besar, potensi wakaf yang ada di Indonesia pun sangat besar. Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2021 merilis potensi wakaf tunai (uang) mencapai Rp 180 triliun per tahun. Selain wakaf uang, potensi tanah wakaf pun sangat besar. Jumlah tanah wakaf yang diperoleh dari data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama tahun 2022 sebanyak 440.512 lokasi, dengan luas 57.263 Ha. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk masjid, mushola, sekolah, makam, pesantren, dan aset sosial lainnya.

Tren akumulasi wakaf uang nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu : Akumulasi wakaf uang nasional tahun 2019 sebesar Rp 255 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 810 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 1,48 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 1,77 triliun, dan tahun 2023 sebesar Rp 2,39 triliun. kemudian sampai dengan Juni 2024 akumulasi wakaf uang mencapai Rp 2,56 triliun.

Tren akumulasi wakaf uang nasional yang meningkat dari tahun ke tahun tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

*Pertama*, sebagai komitmen mendukung penumbuhan wakaf nasional, Gerakan Nasional Wakaf Uang diluncurkan oleh Presiden dan Wakil Presiden pada 25 Januari 2021. Hal ini kemudian didukung pula oleh pemerintah daerah, seperti Pemerintah Provinsi Riau dengan

**Data Wakaf Uang Nasional**  
(Rp. miliar)





**Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) yang diluncurkan Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin di SMA Trensains Tebuireng, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.**

Gerakan Riau Berwakaf dan Pemerintah Sumatera Barat dengan Gerakan Minangkabau Berwakaf. Tidak ketinggalan pula oleh pemerintah daerah, Kementerian Agama juga berinisiatif meluncurkan Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag sebagai percontohan untuk dilakukan oleh Kementerian / Lembaga lainnya.

*Kedua*, Sebagai bagian inovasi penumbuhan wakaf uang, Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), nazhir wakaf dan perbankan syariah berhasil menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Pada tahun 2023, proporsi CWLS sebesar 35 % dari akumulasi wakaf uang nasional yaitu sejumlah Rp 840,7 miliar yang terdiri dari CWLS Ritel sebesar Rp 189,8 miliar dan CWLS *Private Placement* sebesar Rp 650,8 miliar. Inovasi melalui CWLS diakui dunia dan terbukti menjadi solusi mengatasi persoalan sosial ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan oleh *Islamic Development Bank (IsDB)* kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas ditetap-



kannya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai pemenang untuk *IsDB Prize For Impactful Achievement in Islamic Economic* tahun 2023.

*Ketiga*, semakin bertumbuhnya *stakeholder* maupun pengembangan program perwakafan nasional, diantaranya yaitu terdapat: 432 nazhir wakaf uang, 49 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, 4.459 peserta dan 113 asesor sertifikasi nazhir, 44 lokasi inkubasi wakaf produktif Kementerian Agama, dan 1 *campaign* dengan pendanaan Rp 2,6 miliar proyek wakaf melalui *security crowdfunding syariah*. Pertumbuhan *stakeholder* dan inovasi pengembangan program perwakafan nasional lainnya adalah diluncurkannya program *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Perbankan Syariah pada tahun 2023. 🌱

# Wirausaha Menggerakkan Bisnis Syariah

Di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, salah satu dari empat fokus itu adalah membangun usahawan, usaha-usaha syariah, pebisnis syariah, sebab pengusaha ini saya nyebutnya sebagai penumpangnya, lembaga keuangan itu bisnya ya, industri halal itu bisnya, semua, asuransi, semua bisnya. Kalau tidak ada penumpangnya, ini tidak jalan. Oleh karena itu, pembangunan, para pelaku bisnis itu menjadi sesuatu yang niscaya, yang harus.

(K.H. Ma'ruf Amin)

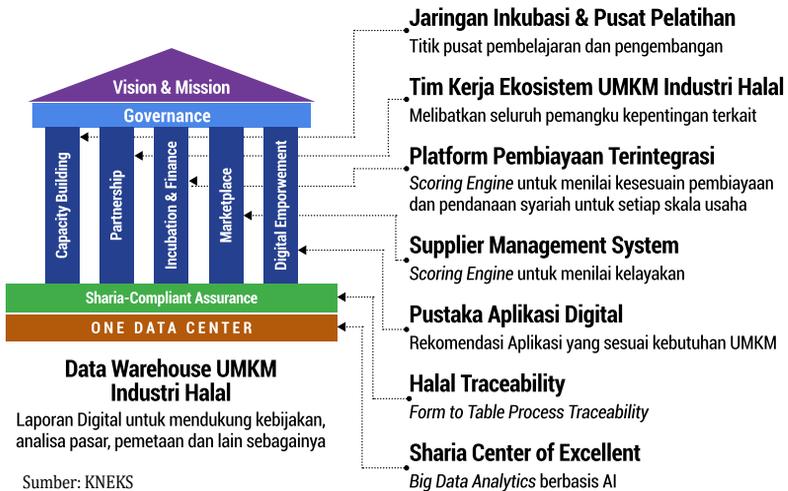
**K**IAI Wapres dengan nada guyon berujar bahwa walaupun pilar industri halal, keuangan syariah dan dana sosial telah tertata rapi tapi jika tidak ada orang yang mau menjadi pengusaha maka semua infrastruktur yang tersedia tidak akan "bergerak" dan memberikan manfaat penuh bagi masyarakat. Perumpamaan yang kerap disampaikan Wakil Presiden adalah ibarat bus kota, sopir tersedia, kendaraan bagus, bahan bakar penuh tapi jika tidak ada penumpangnya maka bus tersebut tidak ada gunanya. Kiai Wapres juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sudah saling bersinergi menyiapkan berbagai instrumen dan ekosistem untuk menggerakkan Wirausaha Bisnis Syariah.

Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal, merupakan salah satu program yang digagas pemerintah bertujuan untuk mengkolaborasikan berbagai inisiatif/program terkait pembinaan dan pengembangan UMKM Industri halal dari berbagai Kementerian dan Lembaga maupun pemangku kepentingan lainnya agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, kontribusi UMKM

Industri Halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat.

Terdapat 5 (lima) pilar strategi dalam mengembangkan UMKM Industri Halal yaitu (1) peningkatan kapasitas UMKM; (2) kemitraan; (3) inkubasi dan pembiayaan/pendanaan (4) akses pasar dan; (5) pemberdayaan digital.

### Pilar Strategi Pengembangan UMKM Industri Halal



Pada berbagai kesempatan, Kiai Wapres selalu mendorong agar umat Islam antusias menjadi wirausaha. Seruan itu di-tabligh-kan di berbagai komunitas, termasuk kalangan pesantren.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha tangguh maka penyiapan “lahan subur” yang memadai menjadi tantangan. Lembaga Pendidikan perlu dimampukan untuk mendidik calon wirausaha, termasuk bekal dari sisi teknologi informasi dan kemampuan digital. Peningkatan kapasitas UMKM (*Pilar Strategi Pertama*) menjadi sangat penting, termasuk digitalisasi bisnis UMKM diintegrasikan ke dalam kegiatan Inkubasi UMKM. KNEKS telah menyusun 8 (delapan) Modul Dasar UMKM Berbasis Syariah pada tahun 2021, yaitu: 1. Prinsip & Etika Bisnis Islam; 2. Manajemen Kekayaan Syariah; 3.



Manajemen SDM Syariah; 4. Akuntansi Berbasis Syariah; 5. UMKM Go Digital Syariah; 6. Modul Dasar Pemasaran Islam; 7. Manajemen Produksi & Operasi Syariah; dan 8. Sistem Manajemen Mutu Syariah.

Pada tahun 2022, peningkatan kapasitas UMKM dilakukan pada Industri Securities Crowdfunding (SCF) Syariah berupa penerbitan



Untuk bersaing secara global, dilakukan peningkatan kapasitas UMKM melalui Inkubasi Bisnis pada usaha rintisan berbasis teknologi (*Startup*).

Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM, dan Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Investor. Kemudian disusun 4 (empat) Modul UMKM Industri Halal berbasis Digital, yaitu: 1. Akuntansi dan Fintech Syariah berbasis Di-

gital; 2. Etika Bisnis Syariah berbasis Digital; 3. Pemasaran Syariah berbasis Digital; dan 4. Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman.

Modul pelatihan tersebut telah dimanfaatkan dan disosialisasikan kepada 500 Akademisi dan pendamping UMKM, 5.150 UMKM, dan 3.500 Pesantren. Implementasi modul UMKM pada Pesantren dimaksudkan agar Pesantren dapat menjadi contoh pengembangan bisnis berbasis jaringan yang merupakan bagian dari konsep inkubasi bisnis syariah. Inkubasi bisnis syariah adalah hal mendasar yang krusial mengingat banyaknya jumlah UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, KNEKS turut mengupayakan inkubator bisnis syariah yang sehat di antaranya melalui penyusunan Pedoman Inkubator Bisnis Syariah.

Upaya peningkatan kapasitas UMKM berlanjut pada tahun 2023 melalui penerbitan 8 (delapan) modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Pendamping UMKM, yaitu: 1. Penyusunan Studi Kelayakan Usaha; 2. Akses Pembiayaan UMKM; 3. Restrukturisasi Perusahaan; 4. Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan; 5. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Aktivitas Usaha, Pembiayaan dan Pendanaan; 6. Pengelolaan Dana Pembiayaan UMKM; 7. Pendanaan Investasi Bagi UMKM; dan 8. Mengelola Dana Investasi UMKM.

Kemitraan (*Pilar Strategi Kedua*) telah tergambarkan pada pembahasan sebelumnya di Industri Produk Halal (seperti Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat) dan Jasa Keuangan Syariah (seperti SCF Syariah) dengan dukungan yang diberikan bagi UMKM.

Inkubasi dan pembiayaan/pendanaan (*Pilar Strategi Ketiga*) dilakukan KNEKS antara lain dengan menyediakan aplikasi *Business Matching* Pembiayaan yang merangkul Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Melalui aplikasi ini, UMKM dapat melakukan simulasi pengajuan permohonan pembiayaan / pendanaan yang lebih sesuai dengan profilnya, sehingga fokus kepada LKS yang peluangnya terbesar akan menyetujui permohonan pembiayaannya. Pengguna aplikasi ini telah mencapai 761 UMKM, 24 Lembaga Pendamping, dan 17 LKS (BUS, UUS, BMT, P2P, SCF Syariah, Pegadaian, dan PNM).

Untuk bersaing secara global, dilakukan peningkatan kapasitas UMKM melalui Inkubasi Bisnis pada usaha rintisan berbasis teknologi (*Startup*). Salah satu langkah konkrit dalam inkubasi usaha rintisan (*Startup*) adalah melalui kerjasama antar LKS dalam permodalan usaha rintisan (*Startup*). Pada tahun 2024 dilaksanakan penyelenggaraan *Demo Day Startup Industri Halal*. Agenda ini diha-



rapkan dapat berkelanjutan dan memacu semangat para pelaku bisnis usaha rintisan (*Startup*).

Akses Pasar (*Pilar Strategi Keempat*), khususnya akses pasar luar negeri (ekspor) dilakukan KNEKS dengan kajian, rekomendasi dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga melalui Kelompok Kerja *Indonesia Halal Export Incorporated* (IHEI).

Pemberdayaan Digital (*Pilar Strategi Kelima*) di antaranya melalui penyediaan modul dan pelatihan UMKM Industri Halal berbasis Digital sebagaimana disebutkan di atas.

Semua Pilar Strategi di atas didukung oleh pengembangan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES) yang mulai ada berbentuk *dashboard* dengan 80 data set dari 19 Produsen Data. Dashboard data ini akan terus dikembangkan agar lebih terintegrasi.

Kiai Wapres dalam berbagai arahannya secara jelas selalu mengungkapkan “*Wirausaha dan bisnis Syariah adalah kunci dalam mengakselerasi ekonomi syariah Indonesia. Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk mengakselerasi pengembangan UMKM industri halal...*” 🌱



# Orkestrasi Percepatan Ekonomi Syariah di Daerah

Pembentukan KDEKS menjadi sebuah ikhtiar membumikan ekonomi dan keuangan syariah agar semakin meluas, berdampak signifikan bagi perekonomian wilayah dan pada akhirnya memperkuat ekonomi nasional.

(K.H. Ma'ruf Amin)



**ALUNAN** nada indah sebuah orkestra, ternyata lahir dari harmoni beragam alat musik dengan beragam cara memainkannya. Keindahan nada tersebut didapat dari petikan gitar, tabuhan perkusi, gesekan biola dan lain-lain, yang dipandu oleh seorang dirigen yang piawai.

Demikian pula dengan keberhasilan ekonomi syariah, merupakan hasil orkestrasi beragam kelembagaan dan unsur masyarakat yang memiliki peran berbeda-beda. Dengan pemisalan tersebut, maka di tingkat nasional, KNEKS merupakan dirigen untuk sebuah orkestrasi yang terdiri dari 16 kementerian dan lembaga. Sedangkan orkestrasi di daerah dipandu oleh KDEKS sebagai dirigennya.

Adanya dirigen orkestrasi di tingkat daerah oleh KDEKS merupakan salah satu kebijakan strategis Kiai Wapres. Tepatnya, pada Rapat Pleno KNEKS tanggal 30 November 2021, Kiai Wapres, sebagai Ketua Harian KNEKS, menetapkan 13 program prioritas KNEKS, yang salah satunya adalah pembentukan KDEKS di daerah-daerah.



Kelembagaan KDEKS sebagai dirigen ekonomi syariah di daerah tetap menyesuaikan dengan kultur organisasi dan kearifan lokal di setiap provinsi. Hal ini terbukti dengan pola struktur organisasi KDEKS yang bervariasi. Sebagian besar KDEKS melibatkan komponen masyarakat umum yang menduduki jabatan di Manajemen Eksekutif KDEKS. Beberapa KDEKS mengadopsi pendekatan kolaborasi antar lembaga dengan menempatkan pejabat lembaga terkait ekonomi dan keuangan syariah sebagai *ex-officio* pada manajemen eksekutif.

Pada awal tahun 2022 beberapa provinsi telah menginisiasi pembentukan KDEKS, di antaranya provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Barat telah mengesahkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 1 tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang di dalamnya mengatur tentang KDEKS. Penetapan pembentukan KDEKS melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat serta Pengukuhannya terlaksana pada

**Pengukuhan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Selatan (Sumsel).**



Pastikan program berjalan sesuai rencana, Wapres minta KDEKS Provinsi Jabar susun rencana aksi dan target berkesinambungan.

23 April 2024. Adapun penetapan KDEKS di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berbarengan dengan acara Launching Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) di Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 April 2022. Gubernur Sumatera Barat mengumumkan pembentukan KDEKS Provinsi Sumatera Barat pada sambutan beliau di hadapan Kiai Wapres. Pembentukan KDEKS di Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 500-315-2022, tertanggal 7 April 2022.

Pada awal bulan April 2023, Kiai Wapres berkesempatan menyaksikan pengukuhan pengurus KDEKS Provinsi Jawa Tengah, di Alun-Alun Masjid Kauman, Semarang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Kiai Wapres berharap keberadaan KDEKS dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“KDEKS juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan literasi kepada masyarakat”, ujar Kiai Wapres yang diwartakan oleh laman [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id).



Lebih jauh Kiai Wapres melihat bahwa potensi ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Tengah cukup besar. Pada sektor jasa keuangan syariah, BPD Jateng sudah memiliki unit syariah BPD Jateng Syariah. “Ke depan Propinsi Jawa Tengah diharapkan memiliki perbankan syariah yang mandiri, terpisah dari perbankan induknya”, tambah Kiai Wapres. Potensi lainnya yang dapat digali, ujar Kiai Wapres, adalah penerbitan sukuk daerah dan KBPU syariah, untuk pembiayaan pembangunan daerah, mengingat besarnya skala ekonomi Propinsi Jawa Tengah. Selain itu, imbuh Kiai Wapres, dalam pengembangan dana sosial syariah, potensi pengembangan zakat dan wakaf di Jateng juga sangat besar. Kolaborasi antara KDEKS dengan Baznas, BWI dan Lembaga Amil Zakat diharapkan akan semakin menyukseskan program-program yang ada, seperti zakat untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil, maupun peningkatan partisipasi wakaf uang dan pengembangan wakaf produktif.

**Pengukuhan  
KDEKS Provinsi  
Papua Barat Daya.**

Tidak hanya sampai di sini, masih menurut Kiai Wapres, potensi pada sektor Kawasan Industri Halal (KIH), pariwisata ramah muslim, zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS), dan program-program lainnya sebenarnya masih dikembangkan. Untuk itu, ia meminta KDEKS terus menjalin koordinasi dan kolaborasi strategis dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, khususnya dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Jateng.

Selanjutnya, pada Senin (28/8/23) Kiai Wapres, sebagai Ketua Harian KNEKS, menyaksikan pengukuhan 5 KDEKS yang dilakukan oleh Plt. Direktur Eksekutif KNEKS, Taufik Hidayat. Lima KDEKS yang dikukuhkan adalah Propinsi Kepulauan Bank Belitung, Nusa Tenggara Barat, Banten, Lampung dan DKI Jakarta. Acara pengukuhan ini dilaksanakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Dalam sambutannya, Kiai Wapres menyampaikan bahwa melalui KDEKS yang telah terbentuk di Propinsi, sektor-sektor unggulan di daerah akan semakin tergali dan berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi

**Pengukuhan KDEKS  
Provinsi Kalimantan  
Utara (Kaltara).**





wilayah serta pada gilirannya dapat sanggup menjadi penyanggah ketahanan ekonomi nasional.

Pada kesempatan pengukuhan ini, Kiai Wapres menyampaikan 3 pesan ke lima KDEKS. **Pertama**, perlu menyusun program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara inovatif, terarah dan terukur dengan cermati dan kenali potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti program *quick wins* yang ditetapkan tiap daerah, serta diselaraskan dengan program strategis pada tingkat pusat. KNEKS agar memandu dan memastikan proses ini berjalan baik. Beberapa program KNEKS yang mesti didukung daerah, seperti percepatan sertifikasi halal produk UMK, sertifikasi halal Rumah Potong Hewan, serta peningkatan literasi maupun inklusi ekonomi dan keuangan syariah. **Kedua**, mengaktifkan kerja kolaborasi multipihak, termasuk antar-KDEKS, dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan keberlanjutan serta aktivitas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah berjalan adalah modal awal

**Pengukuhan  
KDEKS Provinsi  
Maluku Utara.**



Saksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Sulut, Wapres minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berdampak nyata pada masyarakat.

yang sangat baik, dan mesti terus diperluas, sehingga nilai-nilai kebaikan ekonomi syariah makin berdampak dan dirasakan nyata oleh masyarakat. **Ketiga**, memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, diperlukan membangun integrasi dan keselarasan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tiap daerah dengan rencana pembangunan nasional. Khususnya dengan memasukkan program ke dalam kerangka perencanaan dan penganggaran di daerah. Melalui ketiga hal tersebut,



diharapkan ekonomi dan keuangan syariah di 5 wilayah ini akan terus melaju sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pada kesempatan yang lain, Selasa (3/11/23), Kiai Wapres, melakukan pengukuhan KDEKS Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Beliau menekankan pengembangan industri halal. Beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi kontribusi kita terhadap industri halal kecil sekali. Oleh karena itu, kita ingin mengembangkan industri halal ini. Jangan hanya menjadi konsumen halal, tapi industri dan halalnya sangat rendah. Karena itu, Beliau menyatakan bahwa Indonesia harus

menjadi produsen halal terbesar di dunia. Merupakan sebuah ironi, ternyata Indonesia kalah oleh Brasil yang muslimnya minoritas dalam pengadaan unggas halal ke Timur Tengah.

Terkait dengan pengembangan ekonomi syariah di daerah, mungkin ada yang berpendapat bahwa itu hanya akan ada di daerah yang mayoritasnya muslim. Namun ada fakta yang menarik bahwa di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya non muslim, ternyata pemerintah daerahnya bersemangat mendirikan KDEKS, contohnya KDEKS di Provinsi Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah bersifat inklusif, artinya tidak hanya untuk orang islam namun untuk semua golongan.

**Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Aceh.**

Sekelumit cerita dari Provinsi Sulawesi Utara dan Papua Barat Daya. Provinsi Sulawesi Utara mayoritas penduduknya adalah Non Muslim. Pada akhir tahun 2021, beberapa pekan setelah peresmian layanan Syariah BPJS





Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan Surat ke KNEKS yang berisi ketertarikan Pemprov untuk turut menerapkan layanan Syariah BPJS TK untuk pekerja di Provinsi Sulut. Semangat dan antusiasme yang tinggi juga ditunjukkan oleh Provinsi Sulawesi Utara untuk turut membentuk KDEKS Provinsi Sulawesi Utara. KDEKS Sulawesi Utara ditetapkan pada 18 Maret 2024, dan dikukuhkan dihadapan Kiyai Wapres pada 4 April 2024.

Semboyan “Torang Samua Basudara” yang dijunjung Masyarakat Sulawesi Utara sangat sejalan dengan prinsip universalitas Ekonomi dan Keuangan syariah. Pemerintah provinsi dan masyarakat menyadari bahwa layanan syariah dan ramah muslim pada berbagai sektor ekonomi adalah bentuk toleransi sekaligus optimalisasi potensi daerah. Kekayaan dan keindahan alam, kekayaan budaya, produk seni dan kerajinan tangan daerah serta berbagai hasil maritim semakin meningkat nilai ekonominya dengan penambahan layanan ramah muslim

**Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan peresmian Grebeg UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta.**

## Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah hingga Oktober 2024



### Perkembangan pembentukan KDEKS:

- **6 KDEKS terbentuk tahun 2022:** KDEKS Provinsi Sumatera Barat: Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
- **19 KDEKS terbentuk tahun 2023 (per Februari 2024):** KDEKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Gorontalo, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.
- **6 KDEKS terbentuk tahun 2024 (per Oktober 2024):** KDEKS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya dan Maluku.

dan juga sertifikasi halal. Hal ini memperbesar daya tarik wisatawan muslim domestik dan internasional, serta meningkatkan nilai tambah produk daerah. Posisi geografis provinsi Sulut yang berpotensi sebagai alur lalu lintas logistik nasional dan Asia-Pasifik juga berpotensi besar sebagai salah satu *logistic halal hub* untuk wilayah timur Indonesia dan juga Asia Pasifik.

Kisah senada juga datang dari provinsi Papua Barat Daya. Berawal dari sosialisasi muatan Ekonomi dan keuangan syariah pada rancangan RPJPN 2025-2029 sekaligus sosialisasi Pembentukan KDEKS, pada bulan Maret 2024. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik inisiatif strategis pembentukan KDEKS Papua Barat Daya. Kemajemukan masyarakat yang secara demografi didominasi non-muslim, dengan semangat inklusif dan universal turut antusias mengadopsi pengembangan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan



ekonomi daerah. KDEKS Papua Barat Daya ditetapkan pada 30 Mei 2024 dan dikukuhkan pada 6 Juni 2024. Pada sambutan Pengukuhan KDEKS, Kiai Wapres menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Papua Barat Daya sebagai Provinsi pertama yang membentuk KDEKS di Pulau Papua. Meski belum genap dua tahun, namun telah menunjukkan komitmen tinggi untuk mulai mengakselerasi gerak pertumbuhan ekonomi syariah dan pemerataan kesejahteraan secara selaras, inklusif. Beliau secara khusus menyampaikan pesan kepada KDEKS agar mengembangkan program ekonomi syariah sesuai potensi dan kearifan lokal, seperti kemajemukan etnis Papua Barat Daya sebagai aset penting pendorong pembangunan ekonomi inklusif.

Selain itu, update dari wilayah Timur Indonesia lainnya adalah provinsi Bali. Saat buku ini disusun, pemerintah provinsi Bali juga dengan antusias tengah menyiapkan pembentukan KDEKS Provinsi Bali. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah bersifat inklusif, artinya tidak hanya untuk orang islam namun untuk semua golongan.

Setelah terbentuknya 31 KDEKS ini maka tantangan ke depan adalah KDEKS dapat terbentuk di seluruh provinsi serta mendorong KDEKS bergerak dinamis sehingga mampu mengakselerasi ekonomi syariah sebagai *new engine of growth* ekonomi nasional cepat terwujud. Namun, di sisi lain untuk memacu kinerja dan semangat pemerintah daerah provinsi dalam mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah pusat hadir memberikan penghargaan yang dapat menjadi rujukan untuk berbagi pengalaman sukses dalam pengembangan ekonomi syariah di berbagai daerah. Penghargaan tersebut diberi nama Anugerah Adinata Syariah. 🌟



# Literasi Mengungkit Akselerasi

“Semakin tinggi literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat, maka akan semakin tinggi pula penggunaan barang dan jasa yang halal dan sesuai syariah oleh masyarakat”

(K.H. Ma'ruf Amin)

**ACAPKALI** terdengar suara “miring” tentang keuangan syariah. yang menggambarkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah masih kurang. Pelurusan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, telah dibahas di bagian awal buku ini.

Rendahnya pemahaman masyarakat di Indonesia tentang ekonomi syariah dikuatkan dengan hasil survey literasi keuangan ekonomi syariah pada tahun 2023 dengan angka 28%. Meskipun angka tersebut naik dari tahun 2022 pada angka 22%, namun tetap memprihatinkan karena berarti mayoritas penduduk Indonesia tidak memahami ekonomi syariah.

Literasi ekonomi syariah penting, karena dengan penguasaan pengetahuan akan ekonomi syariah, maka dukungan terhadap ekonomi syariah pun muncul. Oleh karena itu, tidak heran Kiai Wapres memberikan target bahwa pada tahun 2025, tingkat literasi ekonomi syariah harus mencapai 50%. Ini adalah tantangan sekaligus memacu semangat para pemangku kepentingan.

Upaya ke arah pemenuhan target telah dilakukan. Dalam rangka mengakselerasi ekonomi syariah, Kiai Wapres menggagas beberapa strategi yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ekonomi syariah, pembuatan *brand* ekonomi syariah, dan pembuatan Strategi Nasional Literasi Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah (SNLIEKSI). Menurut Kiai Wapres pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah merupakan salah satu strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung strategi utama.

Dari gagasan ini maka Pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi menyelesaikan acuan kurikulum program studi S1 Ekonomi Syariah dan Buku Panduan Praktik Magang Ekonomi Syariah. Dengan adanya gagasan diatas diharapkan dapat melahirkan *influencer* baru yang bisa membantu akselerasi literasi mengenai ekonomi syariah di lingkungannya. Menurut Kiai Wapres nantinya *influencer* ini dapat membuat konten-konten variatif dan inovatif membahas ekonomi dan keuangan syariah, maka masyarakat akan semakin tertarik dan mudah memperoleh pemahaman terkait ekonomi dan keuangan syariah sejak dari awal.

Peran *Influencer* dalam meliterasi juga harus didukung dengan beberapa *tools* untuk meyakinkan masyarakat terhadap perhatian Pemerintah mengenai ekonomi syariah. Menjawab dari kebutuhan tersebut Kiai Wapres meminta kementerian dan lembaga agar membuat *Nation Brand* terkait Ekonomi Syariah.

Akhirnya, Pada 2021 Kiai Wapres resmi meluncurkan *brand* ekonomi syariah yang merupakan suatu logo atau simbol. Logo atau simbol tersebut digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *Brand* tersebut yang merepresentasikan ekonomi syariah Indonesia dengan memenuhi karakter 8K, yakni kesejahteraan, kesetaraan, kepedulian, keberpihakan, kenyamanan, kebanggaan, karakter, dan kolaborasi.

### Logo Brand Ekonomi Syariah





*Brand* ekonomi syariah juga bertujuan membantu meningkatkan literasi, edukasi, dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Logo Brand Ekonomi Syariah ini dapat digunakan oleh siapa saja sebagai pendukung *public campaign* mengenai ekonomi syariah.

Selain pembuatan Brand Ekonomi Syariah sebagai simbol negara juga disadari bahwa perlu langkah terstruktur dan sistematis untuk mencapai skor tersebut. Dalam rangka mencapai target 50%, telah disusun strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah (SNLIEKSI).

Ikhtiar Pemerintah dalam upaya akselerasi ekonomi syariah telah dilakukan. Kiai Wapres menekankan peran media sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan independen dapat memperbanyak informasi dan pemberitaan terkait ekonomi dan keuangan syariah termasuk UMKM menjadi salah satu upaya kita meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

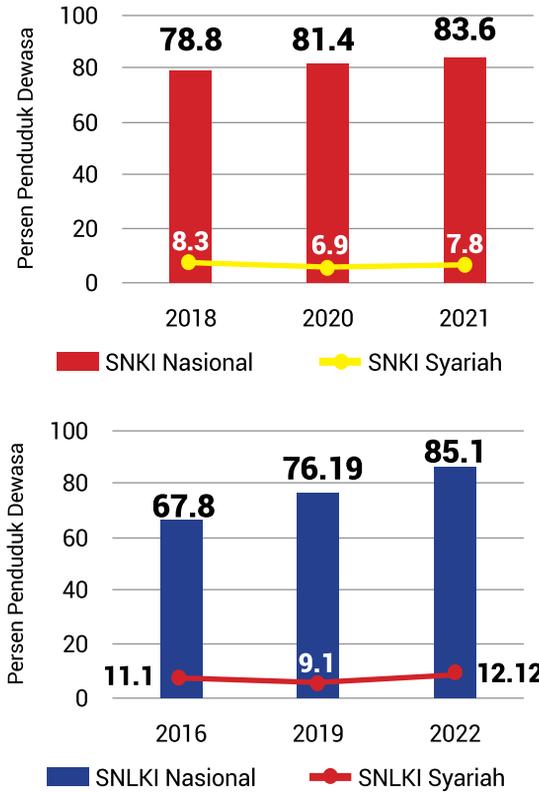
Tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan program yang telah disusun pada SNLIEKSI dengan program dan kegiatan pada Kementerian/Lembaga. Selain itu, hal yang lebih menantang dari sekedar mengejar skor literasi dalam dokumen, adalah bagaimana “menggerakkan” umat untuk ambil bagian menerapkan ekonomi syariah dan menjadikan ekonomi syariah sebaga *lifestyles*.

## Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Seperti halnya literasi ekonomi syariah yang masih rendah, inklusi keuangan syariah pun masih rendah. Inklusi keuangan syariah adalah akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan syariah. Inklusi keuangan syariah menjadi indikator strategis karena dapat menunjukkan seberapa banyak masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari keuangan syariah.

Pada tahun 2022 Inklusi keuangan syariah mencapai 12,12%, sedangkan inklusi keuangan nasional yang mencapai 85,1% berdasarkan survei dari OJK. Dengan demikian ada kesenjangan yang cukup jauh antara inklusi keuangan konvensional dengan inklusi keuangan syariah.

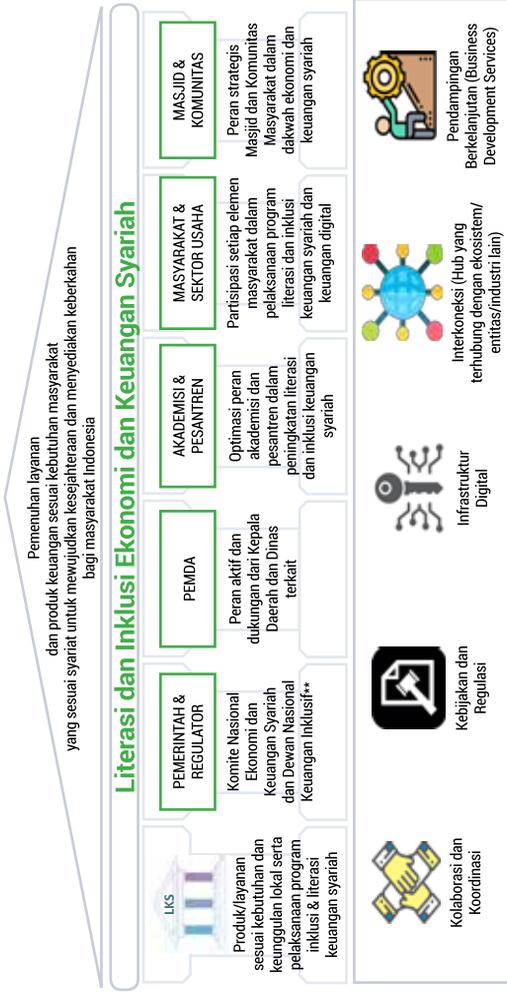
### Inklusi Keuangan Syariah versi SNKI dan OJK.



Sumber: Sekretariat DNKI dan OJK.

Atas data tersebut Kiai Wapres menuturkan bahwa dengan indeks inklusi yang masih rendah tersebut, merupakan kesempatan untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah, khususnya menggunakan basis teknologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, utamanya kepada mereka yang sama sekali belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Melalui lembaga, di mana Kiai Wapres sebagai ketua hariannya, yakni KNEKS, dilakukan program yang merupakan kolaborasi literasi dan inklusi keuangan syariah, dengan bagan program sebagai berikut.

## Skema Kolaborasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.



Pencapaian Tujuan Inklusi Keuangan Syariah

Kolaborasi Edukasi/Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Fondasi, Standardisasi & Digitalisasi

Sumber: KNEKS

Perluasan jangkauan layanan keuangan syariah dilakukan berbasis kolaborasi dan berbasis komunitas. Hal tersebut dilakukan untuk membawa layanan keuangan syariah ke tengah masyarakat untuk mengatasi kelangkaan titik akses. Konsep yang dikedepankan adalah penyediaan berbagai jenis layanan keuangan syariah melalui lembaga atau komunitas yang sudah dekat dengan masyarakat dan dapat menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Bentuk lain dari program yang menjadi solusi agar makin banyak masyarakat yang bisa mengakses keuangan syariah adalah dengan program Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS). ULKS adalah konsep penyediaan berbagai jenis layanan keuangan syariah keagenan pada Lembaga Pendidikan Islam (Pesantren, Diniyah, Madrasah), Masjid dan Musholla, Komunitas Keagamaan, hingga Lembaga Ekonomi/Keuangan Perdesaan BUMDes/BUMDes Bersama.

#### Peta Lokasi Sosialisasi ULKS *Offline* dan *Remote*



Pada tahun 2023, sosialisasi dan implementasi *piloting* ULKS dilakukan pada 8 provinsi yang melibatkan 64 Pondok Pesantren dan sekolah Islam, 7 Masjid, 78 BUMDes dan 55 LPM Perguruan Tinggi. Pelaksanaan program bekerjasama dengan KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah), Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Tim Percepatan Akses Keuangan Dearah/TPAKD (Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan), serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Hingga Juli 2024, sosialisasi ULKS telah dilaksanakan oleh KNEKS bersama BSI (PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk), BMI (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk), serta berbagai institusi keuangan sosial syariah di 5 Provinsi sejak 2021-2022. Pada tahun 2023-2024, fokus wilayah pelaksanaan program dilakukan di Indonesia bagian Tengah dan Timur bersama BPD Syariah, UUS BPD, maupun lembaga keuangan syariah milik Pemda setempat.

### **Pelatihan BMT Pesantren Untuk Inklusi Keuangan Syariah**

Potensi pesantren di bidang ekonomi perlu dimanfaatkan mengingat pesantren memiliki komunitas, salah satunya melalui pengembangan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) antara lain melalui jaringan pesantren, baik yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Komunitas ini merupakan pasar *captive* tersendiri karena kebutuhan dari komunitas tersebut dapat menciptakan aktifitas ekonomi, baik di dalam maupun di luar lingkungan pesantren. Lebih jauh lagi, jika SDM pesantren dibekali keahlian tertentu yang bernilai tambah, maka daya saing ekonomi pesantren juga akan meningkat. Dengan demikian, aktifitas ekonomi pesantren dapat memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat pesantren dan masyarakat yang lebih luas.

Hal ini sesuai pesan Kiai Wapres pada peringatan HSN 2021:

• • • • •

**“Pesantren diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional baik melalui pengembangan bidang keuangan seperti program Bank Wakaf Mikro, BMT, atau usaha ultra mikro lainnya maupun sektor rill.”**



Untuk mendukung peran strategis pesantren, KNEKS bersama Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) telah melakukan pelatihan BMT/IKMS 4.0 kepada Pesantren. Pelatihan tersebut dilakukan pada medio 2022 hingga 2023 di Provinsi Aceh (7 pesantren/dayah), Lampung (12 pesantren), Jawa Barat (16 pesantren), Jawa Tengah (35 pesantren), dan Jawa Timur (8 pesantren) yang keseluruhannya melibatkan 78 Pondok pesantren. 🌱

# EPILOG

## Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Memakmurkan bumi ini dengan berbagai upaya, sebab-sebab kemakmuran itu, *asbabul imarah*, yaitu berbagai kegiatan ekonomi, baik di bidang perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, kelautan. Dan untuk mewujudkan itu kuncinya, atau *miftahul imarah*, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi.

(K.H. Ma'ruf Amin)

### Ekonomi Syariah di Kancan Tren Ekonomi Global

**TREN** ekonomi global ke depan bukan lagi pada sistem ekonomi yang hanya mengutamakan profit (materi) semata. Sistem ekonomi global yang menjadi tren adalah yang tidak hanya mengejar profit, sebagai contoh makin dikenalnya istilah 3P (*profit, planet* dan *people*) dalam sistem ekonomi terutama dalam praktik bisnis. Tiga P dikenal juga sebagai *Triple Bottom Line* (TBL) erat kaitannya dengan tiga proposisi penting, yaitu *economic prosperity, environmental quality*, dan *social justice*. Istilah 3P dipopulerkan oleh John Elkington melalui bukunya *Cannibal with Forks* tahun 1994. Buku ini menjadi buah bibir di kalangan akademisi maupun pengusaha karena kritik tajamnya mengenai pembangunan dan industrialisasi yang mengeliminasi lingkungan hidup secara eksplisit.

Selain itu tren berikutnya adalah sistem ekonomi yang berkelanjutan yakni sistem ekonomi yang tidak



hanya memberi manfaat saat ini namun memberikan dampak manfaat yang berkelanjutan. Sistem ekonomi yang berkelanjutan sangat penting di tingkat global karena beberapa alasan utama.

Alasan *pertama* adalah adanya peningkatan kesadaran global akan dampak perubahan iklim. Tren peningkatan kesadaran kepada ekonomi berkelanjutan dipicu atas peningkatan frekuensi bencana terkait cuaca dan dampak nyata perubahan iklim. Sedangkan ekonomi berkelanjutan memprioritaskan perlindungan lingkungan, yang esensial untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kesadaran global tersebut telah menimbulkan tekanan publik dan permintaan konsumen terhadap produk dan layanan berkelanjutan yang mendorong pemerintah dan perusahaan swasta untuk mengadopsi sistem ekonomi atau praktik bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, kesadaran tersebut berdampak kepada adanya komitmen global, seperti *Paris Agreement* yang menekankan pentingnya transisi ke ekonomi rendah karbon untuk mencapai target pengurangan emisi.

*Kedua*, adalah karena adanya pertumbuhan jangka panjang dan resiliensi ekonomi. Dengan fokus pada keberlanjutan, ekonomi global dapat mencapai pertumbuhan jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya alam, kesehatan lingkungan serta kondisi sosial masyarakat. Ekonomi yang berkelanjutan meningkatkan resiliensi terhadap krisis ekonomi dan bencana alam dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Ekonomi yang berkelanjutan menawarkan risiko yang lebih rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, yang penting untuk stabilitas ekonomi global.

*Ketiga*, adalah kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip 3P berkembang menjadi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang terintegrasi dalam ekonomi berkelanjutan, mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan. Ekonomi adalah untuk masyarakat. Tentu akan menjadi permasalahan global ketika terjadi gejolak sosial yang tinggi akibat kesenjangan ekonomi yang tinggi dan permasalahan sosial lainnya. Kesejahteraan sosial akan mendukung ekonomi yang stabil dan resiliensi ekonomi.

Dengan demikian, sistem ekonomi berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi global dapat berlangsung secara harmonis dengan lingkungan dan masyarakat, memastikan kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan.

Terkait sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar profit dan tidak hanya mengejar keuntungan saat ini saja namun berkelanjutan, justru ada pada sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah sistem yang ada untuk mewujudkan tujuan dari adanya syariah Islam yang dikenal sebagai *maqoshid syariah*. Ada lima *maqoshid syariah* yakni: (1) memelihara agama (*hifz al-din*) (2) Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*) (3) Memelihara akal (*hifz al-'aql*) (4) Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*) (5) Memelihara harta (*hifz al-maal*).

Dengan demikian pengembangan ekonomi syariah di Indonesia bukan memencilkan Indonesia dari pergaulan ekonomi global justru sesuai dengan tren global saat ini. Visi menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama ekonomi Indonesia, sesuai dengan tren arus utama ekonomi global.

### Visi Ekonomi Syariah Indonesia

Dari uraian sebelumnya maka dapat kita pahami bahwa apa yang diperjuangkan oleh Kiai Wapres memiliki perspektif global. Mengarusutamakan ekonomi syariah adalah untuk mengangkat ekonomi Indonesia agar unggul di kancah global. Untuk itu, melalui KNEKS di mana Pak Kiai Wapres sebagai ketua hariannya, telah dirancang visi “Pengarusutamaan ekonomi syariah dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros ekonomi syariah dunia.”

Visi tersebut merupakan muara dari implementasi *maqoshid syariah*. Setiap dimensi *maqoshid syariah* bila dirumuskan dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa visi ekonomi syariah tersebut berdasarkan dimensi (1)

.....

Setiap dimensi *maqoshid syariah* bila dirumuskan dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa visi ekonomi syariah tersebut berdasarkan dimensi (1) agama (2) Kesehatan (3) intelektual (4) keberlanjutan (5) kesejahteraan ekonomi.

agama (2) Kesehatan (3) intelektual (4) keberlanjutan dan (5) kesejahteraan ekonomi.

Ada beberapa sasaran yang harus dicapai oleh ekonomi syariah untuk mencapai visi tersebut, yakni (1) Peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional. Kontribusi tersebut dapat diukur dari persentasi aktivitas usaha syariah terhadap PDB Nasional; (2) Peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. Peningkatan ini dapat dilihat dari indikator persentase kontribusi ekonomi syariah dalam menurunkan rasio gini dan indeks kedalaman kemiskinan; (3) Peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilihat dengan indikator persentase kontribusi ekonomi syariah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (4) Menaikkan peringkat ekonomi syariah di kancah global, dengan indikator peringkat Indonesia meningkat dari lembaga pemeringkat ekonomi syariah internasional.

Gambaran masa depan ekonomi syariah, bagaikan sebuah bangunan, di mana visi dapat dimisalkan sebagai atap yang merupakan ujung tertinggi dari sebuah bangunan, dengan beberapa pilar dan pondasinya. Untuk pilar, ada dua jenis pilar. Jenis pertama adalah pilar program utama, dan satu pilar *enabler*.

Pondasinya ada empat yakni (1) produktivitas ekonomi (2) Pemerataan ekonomi (3) Stabilitas ekonomi (4) perlindungan sosial.

Untuk pilar program utama terdiri dari (1) penguatan industri halal (2) penguatan UMKM industri halal dan koperasi syariah (3) Penguatan keuangan syariah (4) penguatan dana sosial syariah.

Bila visi pengarusutamaan ekonomi syariah tersebut dibuat dalam sebuah bagan, maka akan menjadi bagan berikut ini.



## Modal Dasar Ekonomi Syariah Indonesia

Selain merujuk ke preferensi sistem ekonomi yang menjadi tren secara global, visi ekonomi syariah didasari oleh modal dasar potensi ekonomi syariah di Indonesia.

**Jumlah Penduduk Muslim Terbesar di Dunia.** Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 jumlah populasi Muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa atau setara 88,7% dari populasi nasional. *Times Prayer - Global Muslim Population 2024* melaporkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia, setara dengan sekitar 12% dari total populasi muslim global. Dengan demikian, Indonesia memiliki modal dasar yang sangat kuat dalam mengembangkan ekonomi syariah, mengingat mayoritas penduduk adalah umat Islam. Potensi pasar yang besar ini menciptakan peluang signifikan bagi pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip syariah, seperti sektor perbankan, keuangan, maupun industri produk halal.

**Industri Halal Terbesar Ketiga di Dunia.** Peringkat ekonomi Syariah Indonesia di tingkat global telah mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)*, ekonomi Syariah Indonesia naik ke peringkat ke-3 pada tahun 2023 dari peringkat ke-11 pada tahun 2018 (SGIER,2023). Demikian pula, peringkat keuangan syariah dalam *Islamic Finance Development Report 2023 (IFDI)* Indonesia naik ke peringkat 3 pada tahun 2022 dari peringkat ke-10 pada tahun 2018 serta peringkat ke-3 dalam *Global Islamic Finance Report 2023 (GIFR)*. Sektor pariwisata ramah Muslim di Indonesia juga mengalami peningkatan dalam *Global Muslim Travel Index* yaitu menempati peringkat ke-2 pada tahun 2022 dan peringkat ke-1 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, sektor keuangan Syariah Indonesia menempati posisi 10 besar dalam kepemilikan total aset keuangan syariah di tingkat global, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri keuangan syariah dunia. Proyeksi laporan SGIER (2023), pada tahun 2025 yaitu konsumsi produk halal diperkirakan akan mencapai USD2,8 triliun dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 7,5% dalam periode 4 tahun ke depan. Oleh karena itu, pengembangan industri halal di Indonesia menjadi keniscayaan, guna memanfaatkan potensi pasar yang luas dan berkembang pesat tersebut.



**Ekspor Produk Halal Indonesia.** Indonesia memiliki potensi ekspor produk halal yang cukup besar. Pada tahun 2022 nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai USD61,59 miliar atau meningkat 7,9% dibandingkan tahun 2021 (Kementerian Perdagangan, 2022). Di tingkat global, permintaan produk industri halal terus meningkat. Pada tahun 2022 permintaan produk makanan halal global mencapai USD2.221,3 triliun dan diperkirakan tumbuh 11,1%, mencapai US\$4,1 triliun pada tahun 2028. Selain makanan halal, produk farmasi dan kosmetik halal serta fesyen Muslim global juga diproyeksikan tumbuh tinggi.

**Pendapatan Semakin Tinggi dan Ekonomi Relatif Stabil.** Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2022, Indonesia resmi naik ke kategori pendapatan menengah atas menurut klasifikasi Bank Dunia. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia dan memberikan banyak implikasi bagi pembangunan negara ini secara keseluruhan, beberapa diantaranya adalah perubahan pola konsumsi, adanya penekanan perhatian pada pendidikan dan sumber daya manusia, dan tantangan berkelanjutan lainnya.

Meningkatnya posisi Indonesia menjadi *upper middle income* ini didorong oleh faktor-faktor penentu, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, meskipun menghadapi tantangan global seperti volatilitas pasar dan perubahan geopolitik. Selain itu, Pemerintah Indonesia yang fokus pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan investasi baik dari dalam dan luar negeri turut memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor-sektor kunci. Dengan populasi yang besar dan mayoritas berusia muda, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam hal tenaga kerja dan pasar yang kuat.

**Kesadaran Beragama dan Kedermawanan Sosial.** Tercatat 98% masyarakat Indonesia, termasuk Muslim, menganggap penting peran agama dalam hidup mereka (Pew Research Center, 2023). Tingginya kesadaran beragama di Indonesia dapat memiliki dampak positif pada berbagai aspek, termasuk kedermawanan sosial, yang menjadikan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia (World Giving Index CAF, 2023). Kedermawanan sosial dapat mendorong investasi dalam masyarakat, baik melalui sumbangan waktu, tenaga, atau



sumber daya keuangan. Hal ini dapat menghasilkan manfaat jangka panjang dalam bentuk infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya.

**Konektivitas digital.** Jumlah pengguna internet di Indonesia periode 2022 - 2023 mencapai 215,63 juta pengguna atau setara 68,19% populasi Indonesia. Hal ini menunjukkan penetrasi internet yang luas di negara ini, dan menciptakan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah secara *online*. Selain itu, Indonesia juga memiliki 167,0 juta pengguna sosial media, yang setara dengan 60,4% dari total populasi. Kehadiran yang kuat di platform sosial media memberikan tambahan dimensi bagi pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia.

## Tantangan Ekonomi Syariah Indonesia

Meskipun ekonomi syariah berkesesuaian dengan tren ekonomi global, namun untuk mencapai visi Ekonomi Syariah yang dicanangkan oleh Kiai Wapres dihadapkan dengan beberapa tantangan. Tantangan-tantangan yang paling menanti penanganan adalah :

### TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MASIH RENDAH

Berdasarkan laporan di tahun 2023, literasi keuangan syariah Indonesia Indonesia masih rendah yakni sebesar 9,14% sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan konvensional (literasi 49,68% dan inklusi 85,10%).

Masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan suatu ironi pada suatu negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak dunia. Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*. RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa.

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, berdampak kepada rendahnya *share market* keuangan syariah. Dengan literasi yang baik tentang keuangan syariah, seorang muslim lazimnya akan memilih produk keuangan syariah dibandingkan dengan produk keuangan konvensional.



Berdasarkan laporan *Indonesia Sharia Economic Outlook 2024*, per Juli 2023 *market share* keuangan komersial Syariah mencapai 10,89% dan perbankan Syariah masih stagnan di angka 7,7%. Jumlah pelaku industri perbankan Syariah cenderung stabil dalam kurun 3 tahun terakhir. Per Agustus 2023 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 13, Unit Usaha Syariah sebanyak 20 dan BPR Syariah sebanyak 172. Per September 2023 aset perbankan Syariah sebesar Rp831 triliun atau sekitar 7,4% dari total perbankan nasional.

### COMPETITIVENESS EKONOMI SYARIAH

Seperti diuraikan di bagian sebelumnya, salah satu keunggulan ekonomi syariah adalah basis *value*, seperti keberlanjutan, kepedulian sosial dan *value* lainnya. Namun itu saja tidak cukup. Ekonomi syariah perlu memiliki *competitiveness* atau keunggulan daya saing. Daya saing yang dimaksud diantaranya adalah terkait harga atau *cost*, kecepatan dan kualitas layanan, dan mudah diakses. Dengan demikian, masyarakat memilih untuk menggunakan ekonomi syariah, tidak semata aspek keyakinan (bagi muslim) atau yang bersifat *value*. Tantangan utama untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah adalah terkait efisiensi, teknologi digital dan inovasi.

Untuk sektor keuangan syariah, salah satu penyebab utama rendahnya efisiensi adalah masih kecilnya skala (*size*) bank syariah. Dalam industri keuangan ada rumusan, *size does matter*, ukuran lembaga keuangan menentukan. Untuk itu ke depan diperlukan adanya tambahan lagi bank umum syariah berukuran besar, minimal sebesar BSI. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya penambahan modal besar yang disuntikkan pada bank syariah, atau mergernya beberapa bank syariah. Untuk institusi keuangan mikro syariah (IKMS), dapat dilakukan dengan melakukan merger atau membentuk *apex* IKMS. *Apex* yang dimaksud adalah bergabungnya beberapa IKMS dalam suatu wadah dengan adanya lembaga pengayom. Lembaga pengayom tersebut bisa bank, koperasi sekunder atau lembaga pemerintah, seperti LPDB.

Perwujudan efisiensi, kecepatan dan kemudahan layanan bisa dilakukan ketika teknologi digital diterapkan dengan baik di lembaga-lembaga syariah, baik keuangan ataupun sektor riil. Berkenaan dengan ini, lembaga-lembaga syariah perlu mengejar ketertinggalannya. Salah satu kendala yang umumnya ada, sehubungan lembaga-lembaga



syariah umumnya baru, adalah dukungan keuangan untuk pengadaan teknologi digital. Mengatasi permasalahan tersebut, maka kerjasama antar lembaga-lembaga keuangan syariah, perusahaan-perusahaan di industri halal, serta perguruan tinggi menjadi keniscayaan sehingga tercipta pengadaan teknologi digital yang berkualitas, terjangkau tanpa mengurangi penghargaan profesionalitas para pelaku yang terlibat dalam pembangunan teknologi digitalnya.

Tantangan berikutnya adalah inovasi. Hingga saat ini, inovasi di ekonomi syariah masih perlu mengejar ketertinggalannya dibandingkan ekonomi konvensional. Sebagai contoh untuk sektor jasa keuangan syariah, masih dinilai merupakan adopsi dari produk keuangan konvensional di pasaran. Dana yang terbatas untuk *R & D* dapat menghambat kemampuan institusi untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain kurangnya dana riset, faktor selanjutnya adalah lagi-lagi karena kurangnya tenaga ahli dan spesialisasi dalam industri keuangan syariah. Keterbatasan jumlah tenaga ahli dan spesialisasi dalam keuangan syariah dapat menjadi hambatan dalam melakukan riset dan inovasi di bidang keuangan syariah. Kurangnya SDM yang terampil dalam bidang keuangan syariah, terutama yang memiliki latar belakang teknis dan keuangan yang kuat, dapat membatasi kemampuan industri untuk mengembangkan produk-produk inovatif. Tentang keterbatasan SDM ini akan diulas pada bagian selanjutnya. Selain itu, pasar keuangan syariah cenderung lebih konservatif dalam menerima produk-produk baru dibandingkan dengan pasar keuangan konvensional. Konservatisme pasar ini dapat menghambat inovasi produk baru karena adanya ketidakpastian atau resistensi dari para pemangku kepentingan.

### **KETERBATASAN SDM YANG TERAMPIL DAN KOMPETEN**

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kompeten terkait ekonomi syariah merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri keuangan syariah. Saat ini jumlah SDM yang kompeten dalam bidang keuangan Syariah sangat kurang di Indonesia.

Berdasarkan *Islamic Finance Development Report 2022* Indonesia menduduki peringkat 1 dalam bidang pendidikan karena memiliki jumlah penyedia kursus dan gelar keuangan syariah terbanyak yaitu mencapai 200 (Malaysia sebanyak 93 dan Bahrain sebanyak



71). Pada tahun 2021 sudah terdapat 954 program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 15 nomenklatur program studi ekonomi dan keuangan syariah. Penyederhanaan nomenklatur dan penyempurnaan kurikulum menjadi salah satu isu untuk meningkatkan daya saing dan internasionalisasi pendidikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan laporan dari *Indonesia Sharia Economic Outlook 2024* pada periode tahun 2016 – November 2023 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) keuangan syariah sudah melakukan sertifikasi profesi untuk lebih dari 18 ribu asesi. Banyaknya lulusan dan sertifikasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah semestinya dapat mempercepat pengembangan industri keuangan syariah namun ternyata 80-90% SDM di dalam industri keuangan syariah bukan berasal dari bidang syariah. Hal ini disebabkan karena lulusan tersebut tidak dilengkapi dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan industri. Karena dari perspektif dunia usaha lebih mudah dan murah memanfaatkan SDM yang ada untuk kemudian diberikan *skill* dan pengetahuan terkait keuangan syariah daripada merekrut pegawai baru walaupun memiliki *background* keuangan syariah. Selain itu industri keuangan syariah yang perlu melakukan rekrutmen pegawai, cenderung lebih banyak merekrut SDM dari industri keuangan konvensional karena SDM keuangan konvensional dianggap lebih memahami industri, lebih memahami perilaku konsumen dan memiliki pengalaman serta *softskill* yang baik.

Hal ini dapat menyulitkan industri keuangan syariah untuk menarik dan mempertahankan SDM yang kompeten. Perubahan dan inovasi yang cepat juga dapat menjadi faktor keterbatasan SDM yang terampil dan kompeten karena perubahan yang cepat dalam industri keuangan, termasuk keuangan syariah, mengharuskan adanya adaptasi yang cepat juga dari SDM yang ada. Kurangnya SDM yang terampil dalam mengikuti perkembangan dan inovasi industri dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah.

### **KONSISTENSI SERTA KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

Alhamdulillah, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Tentu hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan dan program Pemerintah yang mendukung ekonomi syariah. Mekanisme konstitusional Indonesia menetapkan pergantian



pemerintahan setiap 5 tahun. Diperlukan konsistensi dan upaya berlanjut untuk mengembangkan ekonomi syariah. Konsistensi dan keberlanjutan itu tampaknya mendapatkan momentum yang tepat untuk berkembang. Ekonomi syariah setidaknya tercantum pada 4 misi Asta Cita Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran. Pada misi Asta Cita ke 2 disebutkan : “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”. Pada misi Asta Cita ke 3 ditetapkan tentang pengembangan industri kreatif yang didalamnya tercantum industri syariah, disamping komponen lainnya yaitu pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, usaha rintisan dan maritim berbasis komunitas. Pada misi Asta Cita ke 4 dicantumkan vaksin yang halal sebagai bagian dari upaya memperkuat system Kesehatan nasional.

Capaian dan *ghiroh* ekonomi syariah perlu dirawat dan bahkan ditingkatkan sesuai dengan misi pemerintahan ke depan. Orkestrasi ekonomi syariah yang telah dibangun akan lebih menawan kinerjanya jika terjadi penguatan pelembagaan ekonomi syariah. Membentuk badan khusus yang menangani ekonomi syariah menjadi salah satu langkah penting untuk merawat keberlanjutan. 🌱

# TESTIMONI



MENTERI KEUANGAN  
**Sri Mulyani**

“**Pengembangan** ekonomi syariah merupakan kebutuhan pembangunan di Indonesia, selain sebagai manifestasi ajaran Islam”.

GUBERNUR BANK INDONESIA (BI)  
**Perry Warjiyo**



“**Akselerasi** pengembangan ekonomi keuangan syari’ah baik di daerah maupun secara nasional sangatlah penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan arus baru ekonomi Indonesia ke depan”.



KETUA DEWAN KOMISIONER OJK

**Mahendra Siregar**



“**Bank** syariah menghadapi tantangan utama tidak hanya berupa tingkat literasi dan inklusi yang masih rendah, tapi juga terkait ketepatan penyediaan layanan dan inovasi produk.

Karena itu, koordinasi, kerja sama dan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mendukung terjadinya sinergi yang berorientasi pada peningkatan kinerja bank syariah, sangat diperlukan. Saya yakin perbankan syariah akan terus berkembang karena kemampuannya menyediakan berbagai jenis pendanaan yang tidak hanya fleksibel tetapi juga inovatif”.



KETUA UMUM MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES)

**Erick Thohir**

“**Ekonomi** syariah seperti segelas air segar di tengah air laut. Ia menjadi solusi alternatif yang menawarkan akses ekonomi inklusif yang resilien di tengah sistem ekonomi konvensional”.



KETUA BADAN EKONOMI  
SYARIAH (BES) KADIN

**Taufan Eko Nugroho  
Rotorasiko**

“**Dengan** jumlah penduduk mayoritas muslim, potensi usaha dalam sektor ekonomi syariah sangat tinggi. Seperti potensi usaha di bidang haji dan umroh, di mana setiap tahun terdapat 190 triliun, tapi ini akan dikembangkan lagi bagaimana pengusaha-pengusaha Indonesia bisa memanfaatkan potensi ini”.



KETUA UMUM DEWAN  
PENGURUS PUSAT HIMPUNAN  
EKONOMI BISNIS PESANTREN

**K.H. Moh. Hasib Wahab  
Chasbullah**

“**Sebagaimana** hadis ‘Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla daripada Mukmin yang lemah,’ Bagaimana pesantren menjadi tangan yang di atas, tangan yang memberi, bukan tangan yang menengadahkan, karena tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta-minta”.

REKTOR UIN AR RANIRY

**Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag**



“**K.H. Ma’ruf Amin** Bukan Hanya Tokoh Ekonomi Syariah Indonesia, Lebih Besar dari itu Bapak K.H. Ma’ruf Amin adalah Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Fungsi seorang Bapak, membesarkan, melindungi, mengajarkan dan membimbing sehingga ekonomi syariah menjadi kekuatan besar untuk menuju Negara Indonesia yang Makmur, bermartabat dan menjadi rujukan Internasional”.

